

PEMBERDAYAAN WANITA TANI BERBASIS KELOMPOK WANITA TANI

Eko Murdiyanto | Kristiyoningsih | Vi'in Ayu Pertiwi |
Dwiyana Anela Kurniasari | Sekar Inten Mulyani | Medea
Ramadhani Utomo | Fitrotul Laili | Miqdad Muhammad | Moh
Muchlis Djibran | Rosnita



PT. GHANI PRESS GROUP

PEMBERDAYAAN WANITA TANI BERBASIS KELOMPOK WANITA TANI

Penulis:

Eko Murdiyanto | Kristiyoningsih | Vi'in Ayu Pertiwi |
Dwiyana Anela Kurniasari | Sekar Inten Mulyani | Medea
Ramadhani Utomo | Fitrotul Laili | Miqdad Muhammad | Moh
Muchlis Djibran | Rosnita

Desain Cover:

Umar Khasan

Layouter:

Tyas Dzawil Istiqomah

Editor Naskah:

Savitri Winawati Hidayat

14 x 21 cm, v-192

ISBN: 978-634-97150-5-8

Anggota IKAPI: No. 468/JTI/2026

Diterbitkan oleh: PT GHANI PRESS GROUP



Alamat:

Bumi Permata Raya Blok 8 No. 14 Tanjung, Lamongan

HP. 0896-5710-0105

Email: ptghanipress@gmail.com

Website: <https://ghanipress.com/>

© Hak Cipta 2026 pada penulis

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Pemberdayaan terhadap wanita tani saat ini memegang peran penting sehingga memiliki perkembangan yang sangat dinamis. Dinamisasi ini dikarenakan munculnya wanita tani sebagai bagian penting rumah tangga tani dalam berusaha tani dimulai semenjak orang mengenal bercocok tanam. Pada saat kegiatan bercocok tanam dimulai berkembang pula pembagian kerja yang nyata antara laki-laki dan perempuan. Pembagian kerja ini muncul karena pekerjaan dibidang pertanian membuka ruang untuk dapat dilakukan khusus oleh laki-laki atau perempuan.

Pembagian kerja dalam bidang pertanian pada akhirnya akan mendorong timbulnya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini perlu diberikan sebuah lembaga sebagai wadah pengembangan laki-laki dan perempuan. Kaum laki-laki terwadahi dalam kelompok tani baik bidang pertanian, perikanan, peternakan maupun perkebunan. Kelompok tani yang dibentuk sebagai bentuk dukungan untuk memperkuat kapasitas petani dan kelembagaan.

Demikian juga dengan perempuan yang memerlukan perlindungan dan dukungan untuk dapat memperkuat kapasitas dan kelembagaan. Untuk itu dibentuklah Kelompok Wanita Tani sebagai wadah bagi kaum wanita untuk mengekspresikan berbagai pemikiran dibidang pertanian. Kelompok Wanita Tani sebagai wadah bagi perempuan juga sekaligus wadah pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan lahan, mengolah hasil panen, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi keluarga. Buku ini membahas

tentang perempuan yang bergerak di bidang pertanian dan perannya dalam usahatani. Selain itu buku ini juga membahas peran kelompok wanita tani dalam memberikan wadah bagi wanita tani dalam mendukung pengembangan kapasitas wanita tani melalui kegiatan pemberdayaan dalam kelompok wanita tani.

Pada akhirnya puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat-Nya kepada para penulis sehingga buku ini dapat tersaji dhadapan para pembaca sekalian. Semoga buku ini memberi manfaat kepada akademisi, praktisi dan peminat pemberdayaan masyarakat terutama bagi pemberdayaan wanita tani.

Yogyakarta, Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
BAB II	
PERAN WANITA DALAM SISTEM AGRIBISNIS	13
BAB III	
PEMBERDAYAAN WANITA TANI DALAM SISTEM PANGAN BERKELANJUTAN.....	21
BAB IV	
PERSPEKTIF GENDER DALAM PEMBERDAYAAN WANITA TANI BERKELANJUTAN.....	35
BAB V	
PEMBERDAYAAN WANITA TANI DAN KEMANDIRIAN EKONOMI RUMAH TANGGA.....	53
BAB VI	
MODEL KONSEPTUAL PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI.....	67
BAB VII	
STRATEGI EKOLOGIS UNTUK PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK WANITA TANI.....	97

BAB VIII	
PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI MELALUI PENYULUHAN DIGITAL	115
BAB IX	
PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI BERBASIS URBAN FARMING	133
BAB X	
PENGUATAN KELOMPOK WANITA TANI DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN.....	151
DAFTAR PUSTAKA	165
BIODATA PENULIS	187

BAB I

PENDAHULUAN

Pemberdayaan merupakan paradigma pembangunan manusia semenjak digulirkannya SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Tujuan pembangunan berkelanjutan mendorong perlindungan sosial, akses terhadap layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi agar semua orang dapat hidup layak. Oleh karena itu pendekatan pembangunan yang dilakukan harus berpusat pada rakyat (*people center development*) dengan mendorong prakarsa masyarakat dan partisipasi dari bawah.

➤ Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kualitas hidup individu maupun kelompok melalui partisipasi aktif, pemanfaatan potensi lokal, serta pemecahan masalah secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat berfokus pada usaha memindahkan masyarakat dari posisi ketergantungan menuju kemandirian ekonomi, sosial, dan politik yang berkelanjutan. Chamber (1995) pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam

pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable*. Chamber (1995) pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) tetapi lebih sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sementara Mardikanto & Soebiato (2019), mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Berdasarkan hal ini maka pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi tanggungannya. Mardikanto & Soebiato (2019) sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Hal ini mengandung arti bahwa pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pembangunan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat haruslah berpihak pada kepentingan masyarakat, sehingga tidak lepas dari pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai model pembangunan yang berdimensi rakyat. Untuk itu maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain:

- a. GBHN Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah” antara lain dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan

bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI”

- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa “ hal-hal yang mendasar dalam undangundang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan-kembangkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran serta masyarakat”
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan social masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, social dan politik”

Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut tergambar dengan jelas bahwa pemberdayaan memiliki misi mengembangkan kemampuan dan kemandirian dan secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Kemandirian dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah tingkat kemajuan yang harus dicapai sehingga masyarakat dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidupnya berdasarkan kekuatannya sendiri secara berkelanjutan.

➤ Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip pemberdayaan masyarakat merupakan panduan dasar yang menekankan pada partisipasi aktif, kesetaraan, kemandirian (keswadayaan), dan keberlanjutan untuk meningkatkan kapasitas serta taraf hidup masyarakat. Hal ini memberi makna bahwa mengubah kelompok masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya, mandiri, dan mampu mengatasi masalahnya sendiri dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa prinsip pemberdayaan, yaitu (Najiati dkk, 2005):

Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan berarti sama tingkatan, kedudukan atau pangkatnya. Kesetaraan menunjukkan pada tingkat yang sama antara masyarakat dengan lembaga pelaksana program pemberdayaan masyarakat, dan para pihak yang terlibat dalam program pembangunan. Hal-hal yang dibangun dalam hubungan yang setara adalah dengan mengembangkan mekanisme untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan keahlian. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap orang saling mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga terjadi proses saling belajar.

Kesalahan yang sering terjadi dalam proses pemberdayaan adalah para pelaksana kegiatan biasanya memposisikan diri sebagai guru yang serba tahu, sedangkan masyarakat dianggap sebagai murid yang perlu diberi

pengetahuan yang beragam dengan mendengarkan apa yang diberikan dan diperintahkan kepada masyarakat.

Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Partisipatif merupakan polapendekatan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan berasal dari bawah. Meskipun demikian partisipasi masyarakat belum dapat disebut sebagai pemberdayaan apabila belum ada unsur memberikan kewenangan atau sebagian kewenangan dan memberikan dorongan untuk lebih berdaya.

Namun selama ini kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan belum memberikan kesempatan dan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk menentukan nasib sendiri melalui program-program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Sampai saat ini program pembangunan yang dilakukan dirancang dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan baik di pemerintahan maupun lembaga yang memberikan dana. Keterlibatan masyarakat masih sebatas sebagai bentuk mobilisasi dan belum pada tahap partisipasi.

Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan melainkan sebagai subjek yang memiliki

kemampuan sedikit. Tidak sedikit program pemberdayaan masyarakat hanya menyalurkan bantuan cuma-cuma yang lebih dominan daripada peningkatan kapasitas masyarakat. Hal ini disebabkan karena bantuan yang bersifat langsung dapat dinikmati oleh anggota masyarakat yang mendapatkan bantuan. Namun peningkatan kapasitas merupakan proses yang lambat dan hasilnya tidak langsung terlihat.

Dukungan dan bantuan yang diberikan secara langsung mungkin bisa menjadi motivasi bagi masyarakat, namun sumber utama untuk peningkatan kapasitas dan kemandirian berasal dari masyarakat. Oleh karena itu pemberdayaan seharusnya berorientasi jangka panjang dengan memberdayakan masyarakat dalam hal kualitas pengetahuan dan keterampilan sehingga masalah yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan oleh masyarakat sendiri.

Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri (Rindi, 2019). Harus diingat bahwa proses pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang instan dan bukan sekedar pelaksanaan program pembangunan, namun merupakan proses yang terus-menerus, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pemahaman ini menjadi sangat penting karena banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang hanya berorientasi pada program pembangunan yang dibatasi waktu dan pendanaan, sehingga apabila program tersebut sudah selesai, pelaksana program dan masyarakat tidak memikirkan

kelanjutan program. Upaya untuk mencapai keberkelanjutan program dapat dilakukan dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi dan terus membangun komunikasi dan koordinasi yang baik antara masyarakat dengan pelaksana program. Oleh karena itu, salah satu yang menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat adalah suatu pemberdayaan yang sebenarnya apabila memiliki prinsip keberlanjutan.

Keempat prinsip tersebut harus diterapkan agar proses pemberdayaan dapat menciptakan masyarakat mandiri khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Beberapa indikator keberhasilan penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan antara lain:

- a. Masyarakat berperan sebagai aktor dalam pembangunan.
- b. Program pembangunan yang dilaksanakan didasarkan pada partisipasi masyarakat yang dilibatkan mulai dari pembuatan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan hingga pengelolaan hasil pembangunan.
- c. Masyarakat berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya, baik berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun keuangan.
- d. Program pembangunan yang dilaksanakan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan

➤ Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan diatas maka tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memungkinkan dan memandirikan individu atau masyarakat agar terlepas dari kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Pemberdayaan dilakukan dengan menggali potensi lokal sehingga akan berlangsung secara berkelanjutan.

Secara rinci meningkatkan kemandirian merupakan upaya **mengurangi** ketergantungan pada pihak luar dengan membangun kapasitas, keterampilan, dan kepercayaan diri masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan apabila masyarakat diberdayakan berdasarkan kemampuan sendiri dan potensi yang dimilikinya. Mardikanto dan Soebiato (2019), tujuan pemberdayaan masyarakat meliputi beragam upaya perbaikan, yaitu:

a. Perbaikan Pendidikan (*Better Education*)

Perbaikan pendidikan mengharuskan pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk Pendidikan yang lebih baik. Perbaikam Pendidikan melalui pemberdayaan tidak terbatas pada perbaikan materi, metode, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat tetapi perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup. Semangat belajar ini diharapkan dapat memelihara semangat untuk selalu meningkatkan keberdayaan masyarakat

b. Perbaikan Aksesibilitas (*Better Accessibility*)

Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitas, terutama dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan perakatan, Lembaga pemasaran. Peningkatan akses ini diharapkan dapat menjadikan keberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

c. Perbaikan Tindakan (*Better Action*)

Berbekal perbaikan pendidikan dan aksesibilitas yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik. Tindakan yang semakin baik ini akan mendorong individu dan masyarakat memiliki sikap dan perilaku yang dapat menjaga dan mendorong dalam

pemanfaatan dan menjaga keberlanjutan program pemberdayaan.

d. Perbaikan kelembagaan (*Better Institution*)

Berdasarkan pada perbaikan tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Hal ini disebabkan karena lembaga dan mitra sangat menaruh perhatian yang besar terhadap perilaku dan tindakan dari individu dan masyarakat. Tidak dapat disangsikan lagi bahwa perbaikan kelembagaan sangat dipengaruhi dan mempengaruhi perbaikan tindakan individu dan masyarakat.

e. Perbaikan usaha (*Better Business*)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. Bisnis yang semakin baik sangat mendukung daya saing individu dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena perbaikan bisnis dalam konteks pemberdayaan merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan daya saing masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

f. Perbaikan pendapatan (*Better Income*)

Perbaikan bisnis yang dilakukan akan menghasilkan perbaikan pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya. Hal ini merujuk pada peningkatan daya beli, pengeluaran keluarga, dan pendapatan bersih masyarakat melalui peningkatan usaha/bisnis dan produktivitas. Perbaikan pendapatan merupakan indikator keberhasilan ekonomi dalam proses pemberdayaan untuk mencapai kemandirian masyarakat.

g. Perbaikan lingkungan (*Better Environment*)

Perbaikan lingkungan dalam konteks pemberdayaan adalah pendekatan berbasis komunitas yang bertujuan meningkatkan kualitas ekosistem atau lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri. Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan konservasi. Dalam kegiatan ini masyarakat menjadi subjek utama yang didampingi, bukan sebagai objek dalam program pemberdayaan. Perbaikan lingkungan dilakukan setelah adanya perbaikan pendapatan masyarakat, karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas dari masyarakat.

h. Perbaikan kehidupan (*Better Living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. Perbaikan kehidupan dalam proses pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan posisi tawar masyarakat untuk mencapai taraf hidup lebih baik, secara ekonomi, fisik, maupun sosial. Perbaikan kehidupan ini memiliki tujuan agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sendiri sehingga dapat keluar dari kemiskinan.

i. Perbaikan masyarakat (*Better Community*)

Perbaikan masyarakat dalam pemberdayaan merupakan suatu proses meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat melalui partisipasi aktif, perbaikan kelembagaan, dan pengembangan usaha produktif. Fokus utama perbaikan masyarakat ini adalah memampukan masyarakat dalam memecahkan masalah

dengan potensi lokal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, sejahtera, dan mandiri. Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik. Kondisi ini diharapkan akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

BAB II

PERAN WANITA DALAM SISTEM AGRIBISNIS

Sistem agribisnis tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kegiatan on-farm semata, melainkan sebagai sistem terpadu yang mencakup rantai nilai dari hulu (sarana produksi, teknologi, pembiayaan) hingga hilir (pengolahan, distribusi, pemasaran, konsumsi). Oleh karena itu, pandangan tradisional yang menempatkan wanita tani hanya sebagai tenaga pembantu dalam produksi pertanian perlu dikritisi, karena dalam praktiknya wanita tani terlibat luas di berbagai subsistem mulai dari penyediaan sarana produksi, pengelolaan usaha tani, pengolahan hasil, hingga pemasaran. Peran multisektor ini sering tidak terlihat (*invisible role*), sehingga mereka belum mendapatkan pengakuan, akses sumber daya, dan pemberdayaan yang optimal dalam pembangunan agribisnis.

➤ Peran Wanita dalam Agribisnis

Sistem agribisnis sebenarnya tidak terlepas dari peran serta wanita dalam seluruh subsistem kegiatannya. Pada subsistem agribisnis hulu mulai dari penyediaan bibit, pupuk, irigasi, serta pengelolaan modal wanita telah dilibatkan dalam pengambilan keputusannya. Di tingkat on-farm, mereka terlibat langsung sebagai tenaga kerja pada penanaman, pemeliharaan, pengendalian hama, hingga panen.

Pada subsistem hilir, wanita turut serta dalam pengelolaan pengolahan hasil panen, distribusi serta menjual hasilnya. Dalam subsistem jasa penunjang seperti transportasi, penyimpanan hasil panen, pelatihan, dan penyebaran informasi teknis. Selain itu, wanita tani juga berperan menciptakan nilai tambah dengan mengolah hasil pertanian menjadi produk siap saji yang dapat meningkatkan penghasilan keluarga.

Peran wanita dalam sistem agribisnis sangatlah banyak, namun tidak banyak dari mereka yang menganggarkan hal tersebut sehingga tidak mendapat pengakuan resmi khususnya dalam pembiayaan tenaga kerja wanita seringkali tidak terhitung sebagai modal dalam kegiatan pertanian skala rumah tangga. Kurang sadarnya kaum perempuan akan perannya dalam pertanian membuat perempuan jarang dilibatkan dalam berbagai hal seperti tidak menjadi anggota kelompok tani, distribusi hasil panen, dan sebagainya. Padahal dengan sadarnya perempuan akan peran pentingnya dalam pertanian tentu akan mengoptimalkan pembangunan pertanian di Indonesia (Putri & Anzari, 2021). Dengan demikian, pemberdayaan peran wanita tani menjadi kebutuhan mendesak agar peran mereka diakui dan dikembangkan secara optimal, sehingga wanita tidak hanya menjadi bagian dari sistem agribisnis tetapi juga pelopor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan produktivitas, inovasi, dan keberlanjutan pertanian dengan mengoptimalkan kesejahteraan keluarganya sendiri.

➤ **Kendala dan Tantangan Wanita Tani dalam Pemberdayaan**

Pemberdayaan peran wanita tani menghadapi dua kendala utama: internal (bersumber dari diri) dan eksternal (dari lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan kebijakan). Kendala internal meliputi rendahnya pendidikan, keterbatasan akses informasi, lemahnya kepercayaan diri, budaya patriarki, beban ganda (domestik dan produktif), serta rendahnya literasi digital dan keuangan. Buruh tani perempuan terbiasa menjadi tenaga kerja pendukung dan belum memiliki kesadaran kelas (Kinasih & Wulandari, 2021). Amheka et al, (2020) peran wanita tani dalam mencurahkan waktu kerjanya pada usahatani padi sawah rendah karena tidak semua tahapan dalam kegiatan usahatani padi sawah diikuti oleh wanita tani sehingga wanita tani lebih terfokus pada kegiatan domestik (pekerjaan rumah tangga).

Kendala eksternal muncul dari struktur sosial dan kelembagaan yang kurang memihak pada peran wanita tani. Norma masyarakat secara tidak langsung memberikan batasan pada wanita dan meminggirkan partisipasi mereka dalam organisasi tani. Dari sisi kultural, norma patriarki masih kuat melekat dalam masyarakat pedesaan. Perempuan dianggap memiliki kodrat domestik yang membuat mereka tidak layak menempati posisi strategis (Kasim & et. al, 2025). Akses terhadap sumber daya seperti lahan, pupuk bersubsidi, alsintan, dan permodalan formal sangat terbatas karena persyaratan administratif yang lebih mengutamakan laki-laki. Program penyuluhan masih didominasi pendekatan teknis tanpa memperhatikan waktu dan lokasi yang mudah dijangkau wanita tani.

Kendala dari kelembagaan dan kebijakan pemerintah belum sepenuhnya melibatkan wanita tani. Organisasi tani didominasi laki-laki, beberapa kebijakan masih belum menjadikan wanita tani sebagai sasaran target keberhasilannya, misalnya dengan persyaratan kepemilikan sertifikat tanah yang umumnya atas nama laki-laki. Kesenjangan upah kerja juga dialami oleh wanita tani, adapun faktor penyebab kesenjangan upah meliputi kebiasaan turun-temurun dalam penetapan upah, stereotipe pemilik lahan, sikap menerima dari pekerja perempuan, dan tidak adanya aturan tertulis mengenai standar pengupahan (Nurmala & Kahanna, 2026). Sementara itu, modernisasi pertanian menciptakan hambatan baru berupa rendahnya literasi digital, terbatasnya perangkat, dan mahalnya kuota data, ditambah infrastruktur pedesaan yang tidak merata, justru menggeser peran tradisional wanita tani tanpa menyediakan akses adil terhadap teknologi baru. Produktivitas lahan petani padi perempuan secara rata-rata lebih rendah sekitar 2,3 % dibanding petani padi laki-laki, hal tersebut dikarenakan perbedaan karakteristik antara petani perempuan dan laki-laki, khususnya pada capaian pendidikan dan adopsi mekanisasi dan penggunaan internet, dimana petani perempuan relatif lebih tertinggal dari petani laki-laki (kadir & Praseyo, 2023).

Seluruh kendala ini menghasilkan dampak yang luas bagi wanita tani, pada tingkat individu wanita merasa menjadi mudah lelah dan kekurangan waktu karena peran ganda yang melekat pada dirinya. Secara struktural aspirasi wanita tani seringkali terabaikan. Akibatnya, terbentuklah lingkaran setan yang membuat wanita tani sulit untuk keluar dari ketidakberdayaan. Sehingga perlu adanya penguatan pada diri wanita tani melalui kegiatan pemberdayaan, pelatihan agribisnis dan sekolah lapang.

➤ Strategi Pemberdayaan Wanita dalam Agribisnis

Pemberdayaan wanita dalam agribisnis adalah sangat penting untuk mewujudkan program ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan yang melibatkan banyak pihak. Meskipun wanita tani memberikan kontribusi yang sangat besar hampir di seluruh rantai subsistem agribisnis, mereka tetap menghadapi kendala dalam pengembangannya. Sebagai upaya pengembangan wanita tani dibutuhkan strategi yang efektif meliputi peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis, penguatan akses terhadap sumber daya pertanian, pembentukan kelompok tani perempuan, serta penguatan etos kerja dan kemandirian ekonomi (Kasim & et al, 2025).

Pengembangan potensi wanita tani dilakukan dengan meningkatkan kemampuan berpikir dan keterampilan teknis. Sebagai contohnya perlu dilakukan pelatihan agribisnis praktis seperti penanganan hasil panen, membuat catatan keuangan dan memasarkan produk olahan. Pendekatan efektif bisa dilakukan melalui sekolah lapang berperspektif gender yang dipandu oleh penyuluh pertanian dan fasilitator setempat.

Beberapa lembaga seperti kelompok wanita tani (KWT) dan koperasi perempuan perlu diperkuat agar wanita tani memiliki daya tawar yang lebih kuat. Wanita tani yang terlibat dalam kelompok tani cenderung memiliki peran tinggi dalam pengambilan keputusan usahatani, baik dalam *fase intelligence, design*, maupun *choice* (Oktariana & Suharyani, 2021). Pemberdayaan wanita dalam kelompok tani menunjukkan tingkat yang cukup tinggi, khususnya dalam kemampuan berusaha dan memenuhi kebutuhan ekonomi. Peran wanita tani mencakup: menjadi wirausaha paruh waktu maupun utama, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, peningkatan kesejahteraan, perluasan relasi pertemanan, serta

mengisi waktu luang dengan kegiatan produktif (Windiasih & et al, 2023).

➤ **Dampak Pemberdayaan Wanita Tani terhadap Pengembangan Agribisnis**

Wanita tani yang diberdayakan melalui pelatihan dan diberikan akses ke sarana produksi, hasil pertanian langsung meningkat dan biaya menjadi lebih efisien. Mereka bisa memilih benih unggul, mengelola pupuk dengan baik, serta memberantas hama secara tepat. Akibatnya, biaya produksi lebih rendah dan panen lebih banyak. Setelah panen, mereka juga terampil menyimpan dan mengolah hasil pertanian sehingga mengurangi jumlah hasil yang terbuang. Dengan begitu, pemberdayaan wanita tani membantu menciptakan sistem agribisnis yang lebih produktif, hemat, dan berkelanjutan.

Pemberdayaan wanita tani memberikan dampak yang baik dalam peningkatan ekonomi dan sosial kelembagaan. Kemampuan mengolah hasil panen menjadi produk siap konsumsi seperti keripik dan selai memberikan nilai tambah dan nilai jual yang lebih tinggi, sehingga rantai kegiatan agribisnis menjadi lebih panjang dan peluang meningkatkan penghasilan menjadi lebih besar. Interaksi dalam organisasi wanita tani memungkinkan adanya berbagi informasi dan pengalaman yang menambah pengetahuan anggota sehingga berdampak baik pada peningkatan rasa percaya diri dan kemampuan bernegosiasi. Dengan demikian, memberdayakan wanita tani dapat memperkuat kerja sama sosial, meluncurkan rantai pasok, serta menciptakan kelembagaan yang lebih inklusif.

Kesimpulannya, pemberdayaan wanita tani membawa dampak positif yang luas, baik bagi diri mereka sendiri, keluarga, maupun masyarakat luas. Dengan didukung oleh pelatihan, akses sumber daya, kebijakan yang berpihak, dan kerja sama berbagai pihak, wanita tani dapat menjadi penggerak utama agribisnis yang produktif, efisien, dan inklusif. Tanpa pemberdayaan yang serius, potensi besar wanita tani akan terus terhambat oleh kendala struktural yang sudah lama berlangsung.

BAB III

PEMBERDAYAAN WANITA TANI

DALAM SISTEM PANGAN

BERKELANJUTAN

Bab ini membahas tentang pentingnya pemberdayaan wanita tani dalam kerangka sistem pangan berkelanjutan. Bab ini mengeksplorasi konsep utama wanita tani dan sistem pangan berkelanjutan, peran wanita tani dalam sistem pangan berkelanjutan ditinjau dari dimensi pemberdayaan, akses dan ketimpangan sumber daya wanita tani dan strategi untuk memperkuat kapasitas wanita tani dalam sistem pangan berkelanjutan. Dengan menempatkan petani perempuan sebagai pusat transformasi sistem pangan, masa depan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dapat dicapai.

Wanita tani memiliki peran fundamental dalam mengelola produksi pertanian dan ketahanan pangan rumah tangga. Wanita Tani berperan aktif dalam budidaya tanaman pertanian, pengelolaan ternak, pengolahan pasca panen, sistem pemasaran, dan persiapan makanan utamanya untuk keberlanjutan pangan keluarga. Terlepas dari kontribusinya, wanita tani sering kali masih kurang diakui dalam kebijakan dan program pembangunan pertanian. Keterbatasan akses sumber daya dan pengambilan keputusan masih menjadi tren isu gender.

Namun, pemberdayaan wanita tani bukan hanya masalah keadilan gender, tetapi juga jalur strategis untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih luas yaitu keberlanjutan pangan. Ketika wanita tani memiliki akses yang setara terhadap sumber daya produktif dan dukungan kelembagaan, hasil pertanian meningkat, gizi pangan rumah tangga meningkat, kemiskinan menurun, dan masyarakat menjadi lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan pergerakan pasar. Oleh karena itu, pemberdayaan wanita tani semakin diakui sebagai penggerak utama transformasi sistem pangan yang berkelanjutan.

➤ **Konsep Pemberdayaan Wanita Tani dan Sistem Pangan Berkelanjutan**

Konsep Pemberdayaan Wanita Tani

Pemberdayaan diartikan oleh World Bank (2007) yaitu meningkatkan kemampuan individu atau kelompok untuk membuat pilihan yang bertujuan, dan mengubah pilihan tersebut menjadi tindakan dan hasil yang diinginkan. Pemberdayaan merupakan suatu daya atau kekuatan dimana proses dalam memberikan kemampuan kepada seseorang dari yang sebelumnya belum memiliki kekuatan menjadi mampu untuk melakukannya (Handono et al., 2020). Beberapa pendekatan pemberdayaan berfokus pada pemberian kesempatan kepada individu untuk mengakses aset, informasi, pilihan, dan peluang sehingga mereka mampu memperbaiki situasi mereka sendiri (Pettit, 2012). Pemberdayaan akan lebih baik jika melibatkan proses kolaboratif dimana orang yang kurang berdaya akan sumber daya yang bernilai, dikerahkan untuk meningkatkan akses dan kontrol atas sumber daya tersebut, sehingga dapat membantu memecahkan masalah pribadi maupun masyarakat (Pertiwi et al., 2025).

Dengan meningkatnya kesadaran gender dalam pembangunan, pemberdayaan semakin dikaitkan dengan wanita. Akter et al., (2017) pemberdayaan perempuan dianggap sebagai 'prasyarat' untuk mencapai ketahanan pangan global. Seperti halnya yang disampaikan oleh Lukman (2024) pemberdayaan wanita adalah proses mencapai kesetaraan melalui modifikasi struktur masyarakat dimana kedudukan perempuan akan meningkat apabila mampu berdiri sendiri dan menghadapi permasalahan.

Pemberdayaan wanita tani mengacu pada proses di mana wanita tani memperoleh kapasitas, kepercayaan diri, sumber daya, dan kemampuan untuk membuat keputusan strategis tentang kehidupan dan mata pencaharian mereka. Dandona, (2015) pemberdayaan perempuan diukur dari kemampuan seorang perempuan dalam mengambil keputusan rumah tangga, relatif terhadap kemampuan suaminya dalam mengambil keputusan rumah tangga. Pemberdayaan itu sendiri telah diukur dari mobilitas fisik relatif seorang perempuan, keamanan ekonomi, kemampuan pengambilan keputusan, kebebasan dari kekerasan dalam rumah tangga, serta kesadaran dan partisipasi politik. Sejumlah besar literatur menemukan bahwa akses perempuan terhadap pekerjaan di luar rumah meningkatkan daya tawar rumah tangganya.

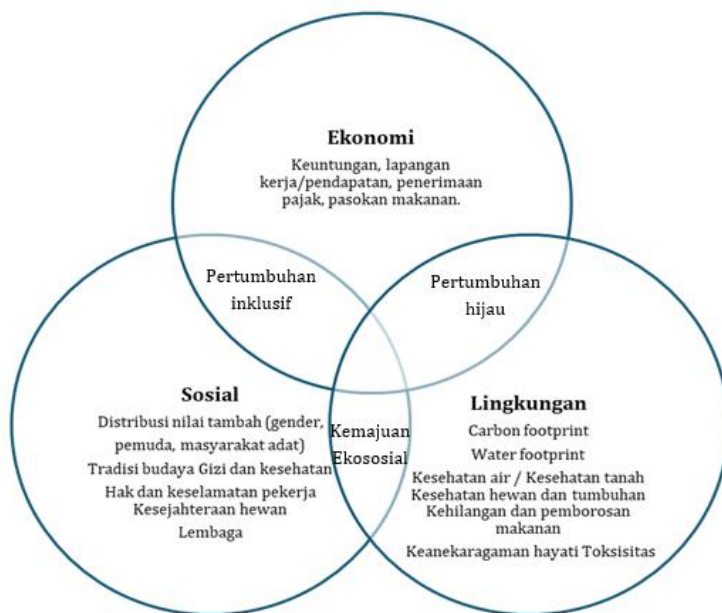
Wanita tani didefinisikan sebagai petani tidak kentara (*infisile farmer*), namun tenaga kerjanya mampu menyumbangkan tenaga kerja pertanian dan keluarga, serta wanita disektor pertanian mampu meningkatkan produksi mereka dalam usaha pertanian untuk menstabilkan ekonomi keluarga (Ollenburger et al., 1996). Wanita tani pada dasarnya yakni para wanita yang memiliki peran dalam aktivitas pertanian *on-farm* maupun *off-farm* dalam upaya mencapai ketahanan pangan rumah tangga. Wanita tani dikumpulkan

dalam suatu organisasi yang bernama KWT (Kelompok Wanita Tani). KWT ini sebagai wadah dalam menyelesaikan permasalahan pertanian dan berkeaktivitas serta berinovasi terhadap teknologi pertanian yang dapat diaplikasikan pada masyarakat (Nasir et al., 2019). KWT juga berperan sebagai wahana belajar, wahana kerjasama dan sebagai unit produksi (Pribadi et al., 2021).

Konsep Sistem Pangan Berkelanjutan

Sistem pangan berkelanjutan adalah sistem pangan yang memberikan ketahanan pangan dan gizi untuk semua mencakup ekonomi, sosial dan lingkungan (FAO, 2018). Demi terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan, maka secara keseluruhan harus memenuhi keberlanjutan ekonomi, manfaat yang luas bagi masyarakat (keberlanjutan sosial) dan berdampak positif atau netral terhadap lingkungan (keberlanjutan lingkungan) (Garibaldi & Frimawaty, 2024).

Dalam hal ini wanita terutama wanita tani tanpa disadari telah mengimplementasikan ketiga unsur dalam sistem berkelanjutan pangan. Wanita tani memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan. Naika & Pawar (2026) Wanita tani tidak hanya berperan dalam produksi pangan, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui praktik pertanian berkelanjutan, penguatan komunitas, serta konservasi sumber daya alam.



Gambar 1. Sistem Keberlanjutan Pangan (FAO, 2018)

Keluarga sejahtera diartikan sebagai keluarga yang dapat memenuhi beberapa kebutuhan anggotanya baik kebutuhan sandang, pangan, papan dan beberapa indikator lainnya. Pangan menjadi salah satu dari indikator penting terwujudnya keluarga sejahtera. Pangan adalah bahan-bahan yang dapat dimakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan tubuh, terdapat dalam bentuk padat maupun cair (Indriani, 2015). Manusia dalam kesehariannya membutuhkan pangan untuk diolah menjadi makanan yang siap dikonsumsi. Dalam hal ini yang mempunyai peran besar dalam penyediaan pangan utamanya adalah wanita.

➤ Peran Wanita Tani dalam Sistem Pangan Berkelanjutan

Pemberdayaan wanita tani menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan pada sektor pertanian Indonesia. Berbagai macam permasalahan yang dihadapi dalam sektor pertanian seperti rendahnya produktivitas pertanian, ketergantungan masyarakat pedesaan pada sektor pertanian, namun pendapatan per kapita masih tergolong rendah. Wanita memiliki peran yang besar dalam berbagai tahapan pertanian mulai dari produksi, pengolahan hasil pertanian hingga pemasaran produk pertanian (Primanthi et al., 2024).

Namun, tanpa pemberdayaan, wanita tani di pedesaan sering kali terhambat oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan pemberdayaan, wanita tani dapat memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya pertanian dan teknologi, serta lebih aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, yang secara langsung dapat mendorong peningkatan produktivitas pangan sehingga terwujud sistem pangan yang berkelanjutan baik di tingkat rumah tangga maupun masyarakat.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Elizabeth (2007) peran dan status wanita dalam mengurus keberlangsungan rumah tangga lebih tinggi dibanding pria (kepala keluarga). Bahkan wanita tani menanggung beban ganda yang mana tidak hanya bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga, tetapi juga terlibat dalam aktivitas *on farm*, *off farm*, maupun *non farm* (Oktoriana et al., 2021). Sama halnya yang dikemukakan oleh Nataliningsih (2017) wanita diposisikan untuk melakukan tiga peran yaitu berperan sebagai Istri, Ibu Rumah Tangga, dan Ibu Keluarga.

Tabel 1. Peran Wanita Tani dalam sistem pangan berkelanjutan

Tahapan sistem pangan	Peran wanita tani	Contoh praktik
Produksi pangan	Budidaya pertanian pangan, hortikultura, ternak	Tumpangsari, penggunaan pupuk organik, agroforestri
Proses pengolahan	Mengolah hasil panen menjadi produk bernilai tambah	Pengolahan hasil pangan lokal (kripik, tepung, selai)
Distribusi	Menyalurkan hasil produksi pertanian ke pasar	Distribusi melalui pasar pertanian lokal
Akses pangan	Memastikan ketersediaan pangan bergizi dan terjangkau untuk keluarga serta mengelola pendapatan untuk akses pangan dan input pertanian	Penyimpanan pangan secara tepat, pengelolaan keuangan rumah tangga
Konsumsi	Menyediakan makanan bergizi seimbang untuk keluarga dan mengurangi pemborosan pangan	Menu seimbang berbasis bahan pangan lokal, penyimpanan dan pengolahan sisa pangan
Pengelolaan limbah	Mendaur ulang limbah	Kompos dari limbah dapur

		rumah tangga, daur ulang kemasan
--	--	--

Wanita tani memiliki peran cukup besar dalam aspek produksi, distribusi, maupun konsumsi. Kontribusi dominan Wanita tani dalam menjaga ketersediaan pangan rumah tangga melalui budidaya, pengelolaan, dan pemanfaatan hasil panen. Selain itu, persentase cukup tinggi pada aspek distribusi menggambarkan kemampuan strategis perempuan dalam mengatur keuangan rumah tangga, merencanakan pengeluaran, dan memastikan kecukupan pangan setiap hari. Sedangkan pada aspek konsumsi, Wanita tani berperan penting dalam menjaga kesehatan dan pola konsumsi keluarga, meskipun masih menghadapi kendala dalam diversifikasi pangan (Nurhayati et al., 2025).

Pertiwi et al., (2024) wanita memiliki peran reproduktif lebih besar daripada peran produktif. Peran produktif diartikan sebagai peran dalam aktivitas yang diberi imbalan berupa uang atau barang, sedangkan peran reproduktif berkaitan dengan aktivitas mengurus rumah tangga demi keberlangsungan hidup sebuah keluarga. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa Wanita juga memiliki peran besar dalam keduanya. Wanita tani memiliki peran produktif untuk menjaga kelangsungan sistem pangan dengan membantu dalam pengolahan, penanaman, pemupukan, pembasmian hama penyakit tanaman, penyiangan dan pemanenan. Sedangkan dalam peran resproduktif Wanita memiliki peran besar dalam merawat anak, menyiapkan dan mengantar sekolah anak, memasak, membersihkan rumah, bahkan beberapa Wanita di pedesaan masih harus mencari tambahan nafkah untuk keluarga demi kelangsungan hidup anggota rumah tangga.

Sedangkan wanita buruh tani mempunyai peran tradisional mereka sebagai istri dan ibu, yang mencakup tanggung jawab domestik seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan merawat anak-anak. Selain itu, mereka juga diharapkan untuk berperan sebagai pekerja pertanian, yang mencakup aktivitas fisik berat seperti menyiapkan lahan, menanam, merawat, dan memanen tanaman. Peran ganda ini menciptakan situasi di mana perempuan harus membagi waktu dan energi mereka antara pekerjaan domestik dan pekerjaan pertanian, sering kali tanpa dukungan yang memadai dari anggota keluarga laki-laki. Ekspektasi sosial yang mengharuskan perempuan untuk menjalankan kedua peran ini sekaligus menyebabkan beban kerja yang berlebihan dan berkelanjutan (Suparman et al., 2024).

➤ **Akses dan Ketimpangan Sumber daya Wanita Tani**

Keterbatasan akses terhadap kepemilikan lahan, kredit pertanian, layanan penyuluhan, teknologi modern, peluang pelatihan, dan ruang pengambilan keputusan terus membatasi produktivitas dan kemajuan sosial-ekonomi mereka. Ketidaksetaraan struktural ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan perempuan tetapi juga melemahkan ketahanan dan keberlanjutan sistem pangan. Secara historis, peran gender dalam pertanian dibentuk oleh aspek budaya, ekonomi, dan sosial dengan pembagian tugas yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (Hasibuan et al., 2025). Posisi perempuan dalam pertanian seringkali belum mendapat pengakuan yang setara dengan laki-laki, yang mengakibatkan potensi mereka belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan

Tabel 2. Akses dan ketimpangan Wanita tani terhadap sumberdaya

Sumberdaya	Bentuk ketimpangan	Dampak terhadap Wanita tani
Lahan	Hak milik lahan lebih banyak dimiliki oleh laki-laki daripada perempuan	Keterbatasan dalam pengambilan Keputusan produksi pertanian
Keuangan	Akses kredit formal lebih didominasi laki-laki	Sulit mengembangka usahatani
Pengetahuan dan ketrampilan	Kesempatan perempuan untuk mengikuti pelatihan/penyuluhan lebih kecil	Adopsi inovasi terhadap teknologi lebih lambat
Teknologi dan informasi	Penguasaan teknologi dan informasi pasar didominasi oleh laki-laki	Hasil produksi lebih rendah dan daya saing terbatas
Kelembagaan dan pengambilan keputusan	Keterwakilan Wanita dan pengambilan keputusan dalam kelompok tani masih rendah	Kebijakan kurang sensitif gender
Tenaga kerja dan waktu	Beban ganda Wanita tani (peran produktif, reproduktif dan sosial) kurang diakui dan upah perempuan lebih rendah	Kelelahan dan penghasilan kecil

Primanthi et al. (2024) perempuan masih memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi, pengetahuan, pengambilan keputusan dan kurangnya pelatihan. Kasim et al., (2025) salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan formal maupun non-formal bagi wanita di sektor pertanian. Dalam banyak kasus, wanita tani masih kurang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan pertanian modern, peningkatan kapasitas kewirausahaan, dan teknologi tepat guna yang relevan dengan kebutuhan mereka. Rendahnya tingkat pendidikan ini berdampak langsung pada minimnya keterlibatan Wanita tani dalam pengambilan keputusan strategis dalam rumah tangga tani maupun komunitas pertanian yang lebih luas.

Feminis liberal menyatakan bahwa wanita dan laki-laki harus memiliki kesetaraan dan kesempatan yang sama. Namun, kenyataannya kaum wanita sering mengalami diskriminasi di sektor publik. Wanita mendapatkan akses untuk bekerja di sektor pertanian namun tidak menghasilkan upah yang sama karena mereka mengalami perbedaan upah. Feminis Marxis, perempuan cenderung dieksploitasi karena posisi mereka sebagai buruh daripada pemilik tanah (modal) (Amalia et al., 2022).

➤ **Strategi Pemberdayaan Wanita Tani dalam Sistem Pangan Berkelanjutan**

Beberapa strategi pemberdayaan wanita tani dilakukan dalam menjaga keberlanjutan sistem pangan. Salah satunya yaitu melakukan pengolahan produk pertanian seperti yang dilakukan oleh Siswantoro et al. (2025) yang melakukan pemberdayaan pada masyarakat utamanya wanita tani di pedesaan untuk melakukan pengolahan produk pertanian menjadi makanan yang siap dikonsumsi sebagai bentuk

diversifikasi pangan masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan bahan baku pangan lokal seperti ubi mbothe/talas dan juga labu siam yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat desa. Ini sebagai bentuk dukungan terhadap wanita tani dalam sistem pangan berkelanjutan.

Arti et al., (2022) strategi wanita tani untuk menjaga keberlanjutan sistem pangan dengan cara mendirikan usaha kelompok ternak itik dengan menggunakan modal usaha sendiri dan didukung lembaga penyedia modal melalui pelaksanaan kegiatan, meningkatkan manajemen pemeliharaan dengan menerapkan teknologi pakan dan obat – obatan serta mengembangkan prospek usaha dengan cara memanfaatkan kandang yang dimiliki kelompok.

Strategi lain yang dilakukan untuk memberdayakan wanita tani di pedesaan biasanya adalah memanfaatkan lahan kecil atau pekarangan di sekitar rumah untuk ditanami dengan sayur atau tanaman yang dapat menghasilkan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap hari nya. Seperti halnya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Alpandari & Prakoso (2022), wanita tani telah mengetahui teknik budidaya tanaman sayur dan mampu meningkatkan kembali motivasi untuk menanam sayur di pekarangan rumah mereka apalagi kondisi lahan pekarangan yang dimiliki oleh masyarakat tergolong luas dan sangat berpotensi untuk dikembangkan untuk menjaga ketahanan pangan rumah tangga.

Kastanja et al., (2019) optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan menanam berbagai jenis tanaman pertanian dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Suarsana et al., (2023) menggambarkan dalam tulisannya bahwa anggota KWT (Kelompok Wanita Tani) secara umum telah memahami teknis

budidaya tanaman di pekarangan, namun masih perlu peningkatan pengetahuan terkait pengendalian serangan hama dan penyakit serta pemanfaatan irigasi yang efektif.

Bentuk strategi pemberdayaan lainnya yaitu memberdayakan Wanita tani dengan meningkatkan kesadaran dan keterampilan perempuan serta mengubah perilaku dalam penanganan limbah sampah organik rumah tangga. Strategi pemberdayaannya dilakukan dengan memberikan layanan penyuluhan untuk memfasilitasi pengolahan sampah organik dapur menjadi *Biowash*, *Eco-Enzyme* dan pupuk kompos. Hasil yang cukup memuaskan didapatkan dari hasil evaluasi kegiatan pemberdayaan wanita pedesaan untuk mengurangi permasalahan sampah (Ardyati et al., 2023).

Dengan demikian strategi pemberdayaan wanita tani sangat berkontribusi terhadap keberlanjutan sistem pangan melalui beberapa strategi seperti peningkatan kapasitas wanita tani, akses sumber daya, penguatan kelembagaan, serta penerapan praktik pertanian berkelanjutan yang mendukung dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan sistem pangan.

BAB IV

PERSPEKTIF GENDER DALAM PEMBERDAYAAN WANITA TANI BERKELANJUTAN

➤ Gender dan Peran Wanita Tani Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Konsep Gender dalam Pembangunan Pertanian

Gender merupakan konsep sosial yang membedakan peran, fungsi, tanggung jawab, dan posisi laki-laki serta perempuan dalam kehidupan masyarakat. Gender berbeda dengan jenis kelamin karena gender dibentuk melalui konstruksi sosial, budaya, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Dalam kehidupan sosial, peran gender seringkali menciptakan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam sektor pertanian (Hayati et al., 2024).

Dalam pembangunan pertanian, perempuan memiliki peran yang sangat penting. Namun hingga saat ini masih terdapat ketimpangan gender yang menyebabkan perempuan belum memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan secara setara dengan laki-laki. Perempuan sering diposisikan hanya sebagai tenaga pendukung dalam aktivitas pertanian, padahal mereka memiliki kontribusi besar dalam proses produksi, pengolahan hasil, hingga pemasaran hasil pertanian (Quisumbing et al., 2014).

Konsep kesetaraan gender dalam pembangunan pertanian menekankan bahwa laki-laki dan perempuan harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses sumber

daya pertanian seperti lahan, modal, teknologi, pendidikan, pelatihan, dan kelembagaan pertanian. Kesetaraan gender bukan berarti menyamakan laki-laki dan perempuan secara mutlak, melainkan memberikan kesempatan yang adil sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu (Sarungallo et al., 2022).

Pembangunan pertanian yang responsif gender berkaitan erat dengan konsep gender mainstreaming atau pengarusutamaan gender. Gender mainstreaming merupakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program (Morgan et al., 2016). Tujuan utama pengarusutamaan gender adalah menciptakan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Dalam konteks global, kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan utama *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada tujuan ke-5 yaitu *Gender Equality* (BAPPENAS, 2023). SDGs menempatkan perempuan sebagai aktor penting dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk pada sektor pertanian dan ketahanan pangan. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan pertanian dapat meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan keluarga, serta mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan.

Di Indonesia, isu gender dalam sektor pertanian masih menjadi tantangan besar. Data Badan Pusat Statistik (2018) menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam sektor pertanian masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kondisi ini diperkuat oleh Kurniasari et al. (2025) perempuan tani masih mengalami keterbatasan akses terhadap informasi, teknologi, penyuluhan, dan pengambilan keputusan dalam kegiatan pertanian.

Banyak perempuan tani belum memiliki akses terhadap pendidikan pertanian, teknologi modern, pelatihan, serta pengambilan keputusan dalam kelembagaan pertanian. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan mengalami keterbatasan dalam mengembangkan kapasitas diri dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pembangunan pertanian berbasis gender menjadi pendekatan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani secara berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan perempuan bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek utama yang memiliki hak dan kemampuan dalam menentukan arah pembangunan pertanian.

Peran Wanita Tani dalam Kehidupan Sosial Ekonomi

Wanita tani memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada aktivitas domestik rumah tangga, tetapi juga mencakup kegiatan produktif dalam sektor pertanian (Wulpiah, 2017). Dalam banyak keluarga petani, perempuan terlibat aktif dalam hampir seluruh tahapan kegiatan pertanian, mulai dari penanaman, pemeliharaan tanaman, panen, pengolahan hasil pertanian, hingga pemasaran produk.

Dalam sektor pertanian, wanita tani berperan sebagai tenaga kerja utama yang membantu meningkatkan produktivitas usaha tani keluarga. Husodo et al. (2020) perempuan tani terlibat aktif dalam berbagai aktivitas pertanian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perempuan seringkali terlibat dalam kegiatan yang membutuhkan ketelitian dan ketekunan seperti penyemaian

benih, penyiangan gulma, sortasi hasil panen, serta pengolahan hasil pertanian.

Selain berperan dalam kegiatan produktif, wanita tani juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketahanan pangan keluarga. Fitrah dan Luthfiyah (2018) perempuan memiliki peran penting dalam pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan rumah tangga. Perempuan berperan dalam menentukan pola konsumsi keluarga, pengelolaan bahan pangan, serta pemenuhan kebutuhan gizi keluarga.

Peran wanita tani juga sangat penting dalam penguatan ekonomi keluarga. Banyak perempuan mengembangkan usaha sampingan berbasis hasil pertanian seperti pengolahan makanan, usaha mikro, kerajinan rumah tangga, hingga pemasaran produk secara mandiri. Aktivitas ekonomi tersebut membantu meningkatkan pendapatan keluarga dan mengurangi kerentanan ekonomi rumah tangga tani. Manto et al. (2023) Kelompok Wanita Tani (KWT) memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan keluarga petani.

Di tingkat sosial, wanita tani memiliki kontribusi besar dalam pembangunan masyarakat desa. Perempuan aktif dalam kegiatan kelompok tani, kelompok wanita tani, PKK, koperasi, dan berbagai organisasi sosial masyarakat. Keterlibatan perempuan dalam kelembagaan sosial mampu memperkuat solidaritas masyarakat, meningkatkan partisipasi sosial, serta mendukung keberhasilan program pembangunan desa. Alfayanti et al. (2021), keberhasilan program kelompok wanita tani sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif anggota perempuan dalam kegiatan kelompok.

Namun demikian, kontribusi besar perempuan dalam sektor pertanian seringkali belum mendapatkan pengakuan yang setara. Banyak perempuan tani masih dianggap sebagai

pekerja tambahan dalam usaha tani keluarga. Padahal, tanpa keterlibatan perempuan, keberlangsungan aktivitas pertanian dan ketahanan pangan keluarga akan sulit tercapai.

Perempuan tani juga memiliki peran strategis dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Kurniasari et al. (2025) keterlibatan perempuan dalam pertanian dapat memperkuat pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga tani. Perempuan cenderung memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan keberlanjutan produksi pangan. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam program pertanian berkelanjutan dapat menjadi kekuatan penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pemberdayaan wanita tani menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Melalui pendidikan, pelatihan, akses teknologi, dan penguatan kelembagaan, perempuan dapat meningkatkan kapasitas diri dan menjadi lebih mandiri secara ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, pembangunan pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan gender.

Ketimpangan Gender dalam Sektor Pertanian

Meskipun perempuan memiliki kontribusi besar dalam sektor pertanian, hingga saat ini masih terdapat berbagai bentuk ketimpangan gender yang menyebabkan perempuan belum memperoleh hak dan kesempatan yang setara dengan laki-laki. Ketimpangan gender dalam sektor pertanian dapat dilihat dari keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya, pendidikan, teknologi, kelembagaan, serta pengambilan keputusan (Hayati et al., 2024).

Salah satu bentuk ketimpangan gender yang paling sering terjadi adalah keterbatasan akses terhadap lahan pertanian. Kurniasari et al. (2025) perempuan tani Tengger mengalami keterbatasan akses terhadap lahan, kelembagaan, teknologi, dan penyuluhan pertanian. Dalam banyak masyarakat pedesaan, kepemilikan lahan masih didominasi oleh laki-laki sehingga perempuan mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan pemerintah, kredit usaha, maupun program pemberdayaan pertanian.

Selain itu, perempuan tani juga memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian modern. Teknologi pertanian umumnya dirancang berdasarkan kebutuhan laki-laki sehingga kurang ramah terhadap perempuan. Kondisi ini menyebabkan perempuan kesulitan meningkatkan produktivitas kerja dan efisiensi usaha tani.

Ketimpangan gender juga terjadi dalam akses pendidikan dan pelatihan pertanian. Banyak perempuan tani memiliki tingkat pendidikan rendah sehingga sulit memahami inovasi pertanian modern. Frola et al. (2024) rendahnya akses pendidikan perempuan berdampak terhadap rendahnya kemampuan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan partisipasi pembangunan. Selain itu, kegiatan penyuluhan pertanian lebih sering ditujukan kepada laki-laki sebagai kepala keluarga atau pemilik lahan sehingga perempuan kurang mendapatkan informasi dan pengetahuan baru mengenai teknik budidaya maupun pengelolaan usaha tani.

Dalam kelembagaan pertanian, perempuan juga masih memiliki partisipasi yang rendah. Banyak kelompok tani masih didominasi oleh laki-laki sehingga perempuan jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Padahal,

perempuan memiliki pengalaman dan pengetahuan penting dalam pengelolaan pertanian dan ketahanan pangan keluarga.

Ketimpangan gender juga dipengaruhi budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat pedesaan. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama, sedangkan perempuan lebih diarahkan pada pekerjaan domestik rumah tangga (Nggai, 2022). Akibatnya, perempuan sering mengalami beban kerja ganda karena harus menjalankan aktivitas domestik sekaligus membantu pekerjaan pertanian.

Kondisi ketimpangan gender berdampak pada rendahnya kesejahteraan perempuan tani. Keterbatasan akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan menyebabkan perempuan sulit mengembangkan usaha tani secara optimal. Selain itu, rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan pertanian dapat menghambat keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Untuk mengatasi ketimpangan gender dalam sektor pertanian, diperlukan berbagai strategi pemberdayaan yang berorientasi pada kesetaraan gender. Pendekatan *Gender and Development* (GAD) dinilai mampu meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan pertanian (Niyonkuru & Barrett, 2021). Strategi tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan, teknologi, modal usaha, serta penguatan kelembagaan perempuan tani.

Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan *stakeholder* pertanian memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan pertanian yang responsif gender. Dengan terciptanya kesetaraan gender, perempuan tani dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan pertanian dan pembangunan masyarakat berkelanjutan. Kesetaraan gender dalam sektor pertanian bukan hanya menjadi isu

perempuan semata, tetapi merupakan bagian penting dalam menciptakan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

➤ Analisis Gender dan Kondisi Sosial Ekonomi Wanita Tani

Kondisi sosial ekonomi wanita tani menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Wanita tani memiliki kontribusi besar dalam kegiatan pertanian, baik sebagai tenaga kerja keluarga maupun pengelola usaha tani. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketimpangan gender dalam akses sumber daya, pengambilan keputusan, dan kesempatan pengembangan kapasitas. Oleh karena itu, diperlukan analisis gender untuk memahami posisi wanita tani dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Materi ini disusun berdasarkan strategi pemberdayaan wanita tani Suku Tengger di Kabupaten Probolinggo.

Kondisi Sosial Ekonomi Wanita Tani

Kondisi sosial ekonomi wanita tani dapat dilihat dari aspek usia, pendidikan, jumlah anggota keluarga, pendapatan, dan kesejahteraan rumah tangga. Kurniasari et al. (2025), sebagian besar wanita tani di Desa Sukapura berada pada kelompok usia 56–58 tahun sebesar 46,15%. Kondisi ini menunjukkan bahwa regenerasi petani perempuan masih rendah sehingga sektor pertanian didominasi kelompok usia lanjut.

Dari aspek pendidikan, mayoritas wanita tani hanya menempuh pendidikan tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan keterbatasan kemampuan wanita tani dalam mengakses teknologi pertanian, informasi pasar, serta inovasi usaha tani modern. Frola et al. (2024) rendahnya akses

pendidikan perempuan berdampak terhadap keterbatasan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Jumlah anggota keluarga wanita tani di Sukapura rata-rata berkisar 1–4 orang. Kondisi ini memengaruhi pembagian tenaga kerja dalam rumah tangga tani. Dalam praktiknya, anggota keluarga seperti suami dan anak turut membantu kegiatan usaha tani kentang. Namun, ketahanan ekonomi keluarga masih bergantung pada pendapatan hasil pertanian yang relatif tidak stabil.

Pendapatan wanita tani sebagian besar berada pada kisaran Rp1.000.000–Rp2.000.000 per bulan. Pendapatan tersebut tergolong rendah karena dipengaruhi fluktuasi harga hasil panen, tingginya biaya produksi, serta keterbatasan akses pasar. Beberapa wanita tani melakukan pekerjaan tambahan seperti menjual hasil pekarangan atau usaha kecil rumah tangga untuk menambah pendapatan keluarga.

Kondisi sosial ekonomi wanita tani menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam menopang ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan, akses modal usaha, penguatan kelompok wanita tani, dan peningkatan pendidikan menjadi langkah strategis dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Wulpiah (2017) pemberdayaan perempuan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Manto et al. (2023) kelompok wanita tani berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga petani.

Gender Framework Analysis (GFA) dalam Pertanian

Gender Framework Analysis (GFA) merupakan pendekatan analisis gender yang digunakan untuk melihat pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pertanian.

Analisis ini mencakup aktivitas produktif, aktivitas reproduktif, akses terhadap sumber daya, kontrol terhadap sumber daya, serta manfaat yang diperoleh dari sumber daya tersebut.

Dalam kegiatan produktif pertanian kentang di Desa Sukapura, laki-laki lebih dominan pada aktivitas yang membutuhkan tenaga berat seperti pengolahan lahan, pemupukan dasar, pengangkutan hasil panen, dan pengendalian hama. Sebaliknya, perempuan lebih banyak terlibat pada kegiatan penyiangan, penyulaman tanaman, dan membantu proses panen.

Pada aktivitas reproduktif, seluruh pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengasuh anak dilakukan oleh perempuan. Kondisi ini menunjukkan adanya beban ganda pada wanita tani karena selain bekerja di sektor pertanian, perempuan juga bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan rumah tangga.

Dalam aspek akses terhadap sumber daya, laki-laki memiliki akses lebih besar terhadap alat pertanian, kelompok tani, kegiatan penyuluhan, dan akses kredit usaha tani. Sebagian besar wanita tani tidak dilibatkan dalam forum kelompok tani maupun pelatihan pertanian sehingga keterbatasan informasi dan teknologi masih menjadi hambatan utama.

Kontrol terhadap sumber daya juga masih didominasi laki-laki. Pengambilan keputusan terkait penggunaan alat pertanian, penjualan hasil panen, akses modal, dan keikutsertaan dalam penyuluhan dilakukan oleh kepala keluarga laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan belum memiliki posisi yang setara dalam pengambilan keputusan usaha tani.

Meskipun demikian, wanita tani tetap memperoleh manfaat ekonomi dari hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Oleh sebab itu, pendekatan *Gender and Development* (GAD) menjadi penting untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan pertanian melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan kelembagaan wanita tani. Morgan et al. (2016) gender mainstreaming diperlukan untuk menciptakan kesetaraan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Fitrah dan Luthfiyah (2018) pemberdayaan perempuan tani melalui pemanfaatan pekarangan dan penguatan modal sosial mampu meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan di pedesaan.

Budaya Lokal dan Ketimpangan Gender pada Masyarakat Tani

Budaya lokal memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan peran gender dalam masyarakat tani. Pada masyarakat agraris tradisional seperti masyarakat Tengger, budaya patriarki masih menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama dalam rumah tangga maupun usaha tani. Perempuan lebih sering diposisikan sebagai pendukung kegiatan domestik dan pelengkap kegiatan pertanian.

Sistem pewarisan juga menjadi faktor yang memperkuat ketimpangan gender. Dalam masyarakat Tengger, lahan pertanian umumnya diwariskan kepada anak laki-laki sebagai penerus utama keluarga. Perempuan tetap dapat memperoleh warisan, namun dalam jumlah lebih kecil atau dalam bentuk lain. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan memiliki keterbatasan kepemilikan lahan dan akses ekonomi.

Nilai sosial budaya masyarakat turut memengaruhi pembagian kerja berdasarkan gender. Perempuan dianggap bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, sedangkan laki-laki dipandang sebagai pencari nafkah utama. Akibatnya, perempuan mengalami beban kerja ganda dan memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas seperti penyuluhan atau pelatihan pertanian.

Sarungallo et al. (2022) budaya patriarki dalam masyarakat tradisional menyebabkan ketimpangan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi. Hal yang sama dijelaskan oleh Nggai (2022) budaya adat sering kali memperkuat posisi subordinat perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Meskipun demikian, budaya lokal juga memiliki potensi sebagai dasar penguatan pemberdayaan perempuan. Nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan modal sosial masyarakat desa dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kelompok wanita tani. Aziz et al. (2019) modal sosial memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan produktivitas dan keberhasilan pembangunan pertanian masyarakat pedesaan.

Oleh karena itu, strategi pemberdayaan wanita tani perlu mempertimbangkan aspek budaya lokal agar program pemberdayaan dapat diterima masyarakat. Pendekatan berbasis budaya lokal, pelibatan tokoh adat, penguatan pendidikan perempuan, dan peningkatan akses terhadap sumber daya menjadi langkah penting dalam mengurangi ketimpangan gender pada masyarakat tani.

➤ Strategi Pemberdayaan Wanita Tani Berkelanjutan

Pemberdayaan wanita tani merupakan upaya meningkatkan kapasitas, akses sumber daya, dan peran perempuan dalam pembangunan pertanian. Strategi pemberdayaan yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi, budaya lokal, kesetaraan gender, dan keberlanjutan lingkungan. Pada masyarakat Tengger di Desa Sukapura, wanita tani memiliki peran penting dalam kegiatan pertanian kentang, namun masih mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, teknologi, modal, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemberdayaan berbasis *Gender and Development* (GAD) yang partisipatif dan sesuai dengan karakteristik budaya lokal masyarakat Tengger.

Strategi Penguatan Kapasitas Wanita Tani

Penguatan kapasitas wanita tani dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, organisasi, dan kemampuan usaha tani. Salah satu strategi utama adalah pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT). Kelompok wanita tani menjadi wadah pembelajaran bersama, penguatan solidaritas, serta sarana akses informasi dan bantuan pemerintah. Pembentukan kelompok wanita tani juga dapat meningkatkan posisi tawar perempuan dalam kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat desa.

Alfayanti et al. (2021), keberhasilan kelompok wanita tani dipengaruhi oleh partisipasi anggota, kepemimpinan kelompok, dan kepuasan anggota terhadap program yang dijalankan. Kelompok wanita tani juga berfungsi sebagai media komunikasi, penguatan modal sosial, dan peningkatan kapasitas perempuan dalam pengelolaan usaha pertanian.

Strategi berikutnya adalah penyelenggaraan sekolah tani perempuan atau sekolah lapang wanita tani. Program ini

bertujuan meningkatkan pengetahuan perempuan mengenai budidaya pertanian, pengelolaan usaha tani, teknologi pertanian, serta diversifikasi usaha. Sekolah tani perempuan menjadi media pembelajaran berbasis praktik yang dapat meningkatkan keterampilan dan kemandirian wanita tani.

Pelatihan pertanian juga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan wanita tani dalam budidaya tanaman, pengendalian hama, pengolahan hasil, dan pemasaran produk pertanian. Pelatihan dapat dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan penyuluh pertanian, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan kelompok tani. Husodo et al. (2020), pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan kelompok wanita tani mampu meningkatkan keterampilan usaha dan kepercayaan diri perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif.

Selain itu, pelatihan pascapanen menjadi strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Wanita tani dapat dilatih mengolah kentang menjadi produk olahan seperti keripik, frozen food, atau produk makanan lainnya. Pengolahan hasil pertanian akan membantu meningkatkan pendapatan keluarga dan mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah.

Penguatan kapasitas juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman hortikultura dan pangan rumah tangga. Strategi ini mampu mendukung ketahanan pangan keluarga sekaligus menjadi sumber tambahan pendapatan rumah tangga. Fitrah dan Luthfiyah (2018) pemanfaatan pekarangan berbasis modal sosial dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan tani secara berkelanjutan.

Pemberdayaan Ekonomi dan Akses Permodalan

Pemberdayaan ekonomi wanita tani bertujuan meningkatkan pendapatan, kemandirian usaha, dan kesejahteraan keluarga petani. Strategi utama dalam pemberdayaan ekonomi adalah diversifikasi usaha pertanian. Ketergantungan pada satu komoditas seperti kentang menyebabkan petani rentan terhadap fluktuasi harga dan serangan hama. Oleh karena itu, wanita tani perlu didorong mengembangkan usaha tanaman hortikultura, tanaman pangan, atau usaha pengolahan hasil pertanian.

Diversifikasi usaha dapat memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga tani. Selain budidaya tanaman, wanita tani juga dapat mengembangkan usaha kuliner, pengolahan pangan lokal, kerajinan, atau agrowisata berbasis budaya lokal Tenger. Wulpiah (2017), pemberdayaan ekonomi perempuan berpengaruh besar terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan ketahanan ekonomi rumah tangga.

Akses permodalan menjadi salah satu kendala utama wanita tani dalam mengembangkan usaha pertanian. Banyak perempuan mengalami kesulitan memperoleh pinjaman karena keterbatasan aset, status kepemilikan lahan, dan rendahnya akses terhadap lembaga keuangan. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan perlu melibatkan koperasi, kelompok simpan pinjam perempuan, perbankan, dan lembaga keuangan mikro untuk mempermudah akses modal usaha bagi wanita tani.

Pendampingan usaha juga menjadi bagian penting dalam pemberdayaan ekonomi wanita tani. Pendampingan dilakukan mulai dari perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, pemasaran produk, hingga penguatan jejaring usaha. Strategi pendampingan bertujuan membantu wanita tani mencapai

kemandirian ekonomi dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dalam usaha tani.

Penguatan kelembagaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemberdayaan ekonomi perempuan. Kelompok wanita tani dapat menjadi sarana pengembangan usaha bersama, pemasaran kolektif, dan penguatan modal sosial masyarakat. Aziz et al. (2019) modal sosial berupa kepercayaan, jaringan sosial, dan kerja sama kelompok memiliki pengaruh besar terhadap produktivitas pertanian dan keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan.

Selain itu, Pribadi et al. (2021) kelompok wanita tani mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif dan membantu penguatan ekonomi masyarakat desa.

Model Pemberdayaan Wanita Tani Berkelanjutan

Model pemberdayaan wanita tani berkelanjutan perlu dibangun melalui pendekatan *Gender and Development* (GAD). Pendekatan GAD menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak, akses, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pembangunan pertanian. Model ini tidak hanya berfokus pada perempuan, tetapi juga memperhatikan relasi gender dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Pendekatan partisipatif menjadi prinsip utama dalam pemberdayaan wanita tani. Perempuan perlu dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan pertanian. Morgan et al. (2016), pengarusutamaan gender diperlukan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Kearifan lokal masyarakat Tengger juga perlu dijadikan dasar dalam penyusunan program pemberdayaan. Masyarakat Tengger memiliki nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan harmoni dengan alam yang dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Oleh karena itu, program pemberdayaan harus disesuaikan dengan budaya lokal agar dapat diterima dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat.

Model pemberdayaan berkelanjutan juga harus mendukung pembangunan pertanian ramah lingkungan. Wanita tani dapat dilibatkan dalam pengembangan pertanian organik, pemanfaatan pupuk hayati, pengelolaan limbah pertanian, dan konservasi lingkungan. Strategi ini sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, keberhasilan model pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh dukungan berbagai pihak seperti pemerintah, perguruan tinggi, penyuluh pertanian, lembaga keuangan, dan tokoh adat. Kolaborasi multipihak diperlukan agar program pemberdayaan wanita tani dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

BAB V

PEMBERDAYAAN WANITA TANI DAN KEMANDIRIAN EKONOMI RUMAH TANGGA

Pembangunan pertanian membutuhkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang berkontribusi dalam mendukung ketercapaian tujuan pembangunan nasional. Pembangunan ini bersifat inklusi sehingga melibatkan semua elemen masyarakat. Salah satu peran yang melibatkan isu gender adalah peran wanita tani dalam mendukung pembangunan pertanian. Peran ini membutuhkan partisipasi aktif wanita tani dalam pembangunan pertanian. Pemberdayaan wanita tani merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM unggul di bidang pertanian. Pembangunan pertanian tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya, termasuk wanita. Dalam masyarakat pedesaan, wanita memiliki peran penting dalam kegiatan pertanian, pengolahan hasil, hingga pengelolaan konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, pemberdayaan wanita tani menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan ketahanan pangan, kesejahteraan keluarga, dan kemandirian ekonomi rumah tangga. Wanita tani dapat tergabung dalam KWT (Kelompok Wanita Tani) merupakan wadah bagi wanita di pedesaan untuk belajar,

bekerja sama, dan mengembangkan kemampuan dalam bidang pertanian dan usaha agribisnis. Melalui KWT, wanita dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, akses informasi, serta dukungan dalam mengembangkan usaha produktif yang berbasis potensi lokal.

➤ **Partisipasi Wanita Tani dalam Kelompok Tani**

Partisipasi wanita tani dalam pembangunan pertanian dalam skala kecil yaitu rumah tangga sangatlah penting. Hal ini terlihat dari keterlibatan langsung wanita tani dalam budidaya tanaman, pengolahan hasil pertanian, hingga pemasaran produk pertanian. Nursiam Jati *et al.*, (2025) wanita memiliki kontribusi besar dalam sektor pertanian karena mampu menghasilkan lebih dari 50% kebutuhan pangan dunia, berperan dalam penyediaan kebutuhan pangan keluarga, serta memproduksi sekitar 60–80% bahan pangan. Peran tersebut menjadikan wanita sebagai faktor penting dalam mewujudkan ketahanan pangan keluarga, terutama di negara-negara berkembang.

Menurut teori partisipasi Arstein dalam Salehl *et al.*, (2025) tipologi tingkatan partisipasi dibedakan dalam tujuh tingkatan yaitu:

Partisipasi Pasif

Masyarakat terlibat hanya melalui informasi atau pemberitahuan mengenai apa yang akan dan telah terjadi. Informasi tersebut disampaikan secara sepihak oleh pihak pengelola atau pemimpin proyek tanpa memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan. Dalam kondisi ini, informasi sepenuhnya dikuasai oleh pihak luar, bukan oleh masyarakat.

Partisipasi Informatif

Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pihak luar, misalnya melalui survei atau metode serupa. Namun, mereka tidak memiliki kesempatan untuk terlibat lebih jauh dalam proses kegiatan, termasuk tidak dapat memverifikasi maupun memperoleh hasil kegiatan secara langsung.

Partisipasi Melalui Konsultasi

Masyarakat dilibatkan melalui proses konsultasi, di mana pihak luar mendengarkan pendapat mereka. Akan tetapi, pihak luar tetap menentukan permasalahan dan solusi yang dianggap tepat, meskipun ada penyesuaian berdasarkan tanggapan masyarakat. Dalam proses ini, masyarakat tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, dan pihak luar tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi aspirasi masyarakat.

Partisipasi karena Insentif Material

Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan sumber daya, seperti tenaga kerja, sebagai imbalan berupa makanan, uang, atau bentuk insentif lainnya. Bentuk partisipasi ini sering dijumpai dalam kegiatan pengelolaan lahan pertanian, di mana petani hanya menyediakan lahan tanpa ikut terlibat dalam proses pembelajaran maupun uji coba lahan. Partisipasi semacam ini biasanya berhenti ketika insentif tidak lagi diberikan.

Partisipasi Fungsional

Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok guna mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan program dari pihak luar. Keterlibatan ini umumnya terjadi setelah keputusan utama ditetapkan, sehingga masyarakat belum dilibatkan dalam perencanaan. Bentuk partisipasi ini masih bergantung

pada fasilitator atau pihak luar, meskipun dalam perkembangannya masyarakat dapat menjadi lebih mandiri.

Partisipasi Interaktif

Masyarakat terlibat secara aktif melalui analisis bersama dalam penyusunan rencana kerja serta pembentukan atau penguatan kelembagaan lokal. Bentuk partisipasi ini biasanya menggunakan berbagai lintas ilmu dan proses pembelajaran yang sistematis. Dalam kondisi ini, masyarakat memiliki kendali terhadap pengambilan keputusan sehingga mampu mempertahankan kelembagaan maupun praktik yang telah dibangun.

Partisipasi Mobilisasi Diri

Masyarakat berpartisipasi secara mandiri dengan mengambil inisiatif sendiri tanpa bergantung pada lembaga luar untuk melakukan perubahan. Mereka menjalin hubungan dengan pihak luar hanya untuk memperoleh sumber daya atau saran yang diperlukan, tetapi tetap memiliki kendali penuh atas pemanfaatan sumber daya tersebut. Bentuk partisipasi ini mencerminkan kemandirian masyarakat dalam melakukan tindakan kolektif.

Kelompok tani merupakan kelembagaan lokal di bidang pertanian yang menjadi wadah pembelajaran, sarana belajar dan unit produksi petani. Kelompok tani dibentuk berdasarkan persamaan kepentingan dan kebutuhan anggota. Salah satu wadah organisasi wanita tani adalah kelompok wanita tani (KWT). Partisipasi yang dimaksud merupakan keterlibatan aktif wanita tani dalam KWT, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Keikutsertaan wanita tani dalam KWT tidak hanya berfungsi sebagai sarana belajar, unit produksi dan menjalin bekerja sama, namun menjadi wadah

peningkatan kapasitas meliputi keterampilan, pengetahuan, serta kemandirian ekonomi keluarga. Partisipasi tersebut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga, pemenuhan kebutuhan pangan keluarga sekaligus penguatan ketahanan pangan masyarakat. Keterlibatan aktif wanita tani dalam KWT mampu meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan berorganisasi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan di kelompok. Mulyani *et al.*, (2026) menyatakan terjadi perubahan tingkatan partisipasi anggota KWT yang semula hanya sekedar partisipasi konsultatif menjadi menjadi partisipasi interaktif. Semula partisipasi dalam KWT bersifat konsultasi, ditandai dengan penyuluh menggali permasalahan dan kebutuhan anggota, kemudian anggota berpartisipasi dengan menjawab pertanyaan yang diajukan penyuluh. Hasil diskusi tersebut menjadi dasar penyusunan rencana kebutuhan dan penentuan komoditas yang akan dipilih sebagai tanaman pembibitan kelompok. Seiring berjalannya waktu, partisipasi kelompok menjadi partisipasi interaktif (*co learning*). Keputusan diambil oleh kelompok itu sendiri untuk menentukan rencana kebutuhan dan inovasi yang akan dilaksanakan, penyuluh hanya berperan sebagai fasilitator.

Tingkat partisipasi petani dipengaruhi oleh beberapa factor, Andry *et al.*, (2020) partisipasi merupakan bentuk keterlibatan, keikutsertaan, serta kebersamaan masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tingkat partisipasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pendapatan, kondisi sosial budaya, politik, serta jenis pekerjaan. Ditambahkan oleh Eka Putra *et al.*, (2024) peran penyuluh pertanian memberikan dampak positif terhadap tingkat partisipasi petani. Indikator peran penyuluh

pertanian meliputi fungsi sebagai motivator, inovator, dan fasilitator terbukti berpengaruh terhadap keterlibatan petani dalam kegiatan pertanian. Unay-Gailhard & Brennen, (2022) informasi yang diperoleh petani mengenai usaha pertanian berpengaruh terhadap partisipasi petani untuk terlibat dalam kegiatan usahatani. Dalam hal ini, digitalisasi informasi dan komunikasi yang disebarkan melalui internet memiliki peranan yang sangat penting.

➤ **Pemberdayaan Wanita Tani oleh Penyuluh Pertanian**

Pemberdayaan wanita tani merupakan proses memungkinkan dan memandirikan yang dilakukan oleh pihak eksternal salah satunya penyuluh pertanian. Pemberdayaan berkaitan dengan proses perubahan sosial, yaitu terciptanya masyarakat yang memiliki kemampuan dan kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial. Ardiani *et al.*, (2021) pemberdayaan wanita merupakan upaya untuk meningkatkan hak, posisi, kemampuan, peran, kesempatan, kemandirian, serta ketahanan mental dan spiritual sebagai bagian penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Masyarakat yang berdaya ditandai dengan adanya rasa percaya diri, kemampuan untuk menyampaikan aspirasi, memiliki sumber pendapatan, aktif berpartisipasi dalam organisasi, serta mandiri dalam berusaha. Melalui pemberdayaan, wanita tani dapat meningkatkan kapasitasnya. Hal ini didukung oleh Adam *et al.*, (2022) yang menyatakan pemberdayaan petani dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petani dalam meningkatkan faktor produksi pertanian, pemanfaatan input secara hemat biaya, dan pengembangan lahan pertanian. Proses pemberdayaan meliputi penyadaran (*conscientization*), peningkatan kapasitas

(*capacity building*) dan pendampingan. Peran penyuluh dalam pemberdayaan wanita tani adalah sebagai motivator dan fasilitator perubahan sekaligus sebagai mediator untuk mengembangkan jejaring kerja sama dengan stakeholder terkait. Pemberdayaan dilakukan oleh penyuluh pertanian Lapang (PPL). Salah satu program pemberdayaan KWT yang dilakukan penyuluh adalah mendampingi petani dalam program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan lahan pekarangan anggota KWT dengan tanaman produktif. Hal ini dapat meningkatkan kemandirian pangan sekaligus ekonomi anggota, berikut tahapan proses pemberdayaan wanita tani yang difasilitasi penyuluh pada program P2L (Mulyani et al., 2026)

Tabel 3. Tahapan Proses Pemberdayaan Wanita Tani

Tahapan	Tujuan	Bentuk kegiatan
Penyadaran	Meningkatkan kesadaran wanita petani mengenai pentingnya kemandirian ekonomi rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga	Sosialisasi Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
	Meningkatkan kesadaran petani mengenai pentingnya partisipasi aktif anggota KWT	Pertemuan rutin kelompok

Tahapan	Tujuan	Bentuk kegiatan
	Meningkatkan kesadaran petani mengenai pentingnya beradaptasi dalam menghadapi perubahan	Pertemuan rutin kelompok
	Meningkatkan kesadaran petani mengenai pemanfaatan peluang dan memperluas kerja sama dengan berbagai pihak	Penjajakan kerjasama kemitraan petani melalui KWT/gapoktan
	Meningkatkan kesadaran petani dalam mengambil keputusan baik secara pribadi maupun kelompok	Memberikan kesempatan aktif anggota untuk berperan dalam pengambilan keputusan
Penguatan kapasitas wanita tani	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan wanita tani dalam mengelola hasil pekarangan dengan tanaman produktif	Pelatihan manajemen usahatani
	Meningkatkan keterampilan petani dalam budidaya tanaman pekarangan	Pelatihan budidaya tanaman toga
	Meningkatkan pengetahuan dan	Pelatihan pembuatan

Tahapan	Tujuan	Bentuk kegiatan
	keterampilan petani dalam pengelolaan usaha ramah lingkungan	pupuk cair organik
	Meningkatkan kapasitas wanita petani meningkatkan nilai tambah produk hasil panen pekarangan.	Pelatihan pasca panen sampai menjadi produk olahan pertanian
Pendampingan	Memberikan pendampingan wanita tani	Mendampingi wanita tani baik kunjungan langsung ke lokasi maupun melakukan monitoring melalui ketua KWT

Berdasarkan tabel 3 mengenai tahapan proses pemberdayaan maka penyadaran merupakan tahap awal. Tahap ini bertujuan melakukan pendekatan, pengenalan karakteristik sasaran dan potensi sumber daya yang dimiliki. Hasil diskusi dengan petani dan sosialisasi yang diberikan menjadi sumber informasi fasilitator untuk membuat perencanaan program yang mampu memberikan solusi atas masalah yang dihadapi petani, Tahap kedua adalah penguatan kapasitas wanita dengan dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang mendorong petani mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Pendampingan diperlukan untuk memberikan

evaluasi program dan melihat perubahan yang terjadi pada penerima manfaat.

➤ **Peran Wanita Tani dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Rumah Tangga**

Wanita tani memiliki posisi yang penting dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga terutama di daerah pedesaan. Dalam kehidupan rumah tangga petani, wanita tani tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai pelaku usaha, pengelola keuangan keluarga, tenaga kerja pertanian, hingga pengolah hasil pertanian. Keterlibatan wanita tani dalam berbagai aktivitas produktif menjadikan mereka sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung kemandirian ekonomi rumah tangga. Hal ini dapat tercapai dengan peningkatan kapasitas wanita tani melalui pemberdayaan. Pemberdayaan menjadikan petani sebagai subjek dengan melibatkan aktif pada aktivitas yang mendukung penguatan kapasitas. Proses pemberdayaan dapat menumbuhkan kemandirian wanita tani. Kemandirian ekonomi petani erat kaitannya dengan kapasitas petani untuk mendukung usahatani yang berkelanjutan. Pengembangan sumber daya manusia dibutuhkan agar petani tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah maupun perusahaan. Keterlibatan wanita tani dalam pemberdayaan dapat dilihat dari motivasi yaitu kebutuhan ekonomi keluarga, keinginan untuk mandiri, belajar menghadapi tantangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan status sosialnya.

Farrell *et al.*, (2024) upaya mencapai target SDG 5 memerlukan integrasi inovasi wanita tani ke dalam kerangka kebijakan pembangunan pedesaan. Wanita bukan hanya subjek pembangunan, tetapi penggerak utama dalam mengatasi tantangan lingkungan dan ekonomi. Mendukung ke-

pemimpinan wanita dalam kewirausahaan tani akan mempercepat revitalisasi daerah sekaligus menciptakan kesetaraan hak dan isu gender terutama dalam peningkatan kemandirian ekonomi rumah tangga. Pemberdayaan wanita tani bertujuan agar petani mampu menjadi pribadi yang mandiri dan tidak bergantung pada keluarga maupun orang lain dalam menjalani kehidupannya. Sehingga berkontribusi pada kemandirian ekonomi keluarga (Ardiani *et al.*, 2021). Terdapat enam prinsip dasar dalam membentuk kemandirian petani yaitu: keterlibatan dalam pengambilan keputusan, partisipasi inklusif, merancang sumber daya lokal, melakukan manajemen diri, pantang menyerah, dan bertanggung jawab atas tindakannya.

Proses pemberdayaan telah menumbuhkan partisipasi dan kemandirian masyarakat baik di tingkat individu, kelompok maupun kelembagaan. Berhasilnya proses pemberdayaan berdampak kemandirian komunitas dalam mengakses sumberdaya, kesadaran kritis dan mampu mengorganisasikan diri, memiliki kontrol sosial dari segala aktivitas pembangunan yang ada dilingkungannya. Kemandirian berarti masyarakat memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan dan mobilisasi sumber daya di bawah inisiatif dan arahnya sendiri. Hal ini berarti juga adanya penolakan terhadap prinsip perampasan sumber daya orang lain secara eksploitatif. Strategi pembangunan yang menekankan kemandirian berfokus pada meningkatnya hubungan kerja sama dan mengurangi ketergantungan individu dan kolektif dalam penyediaan kebutuhan dasar. Managanta, (2019) pembangunan pertanian akan tercapai jika petani sebagai pelaku usaha telah mampu dan mandiri dalam mengelola usaha tani. Kemandirian petani merupakan bentuk kemampuan petani dalam peningkatan produktivitas maupun

kualitas produk, pengambilan keputusan dan membangun kemitraan. Kemandirian petani dalam memilih informasi yang tepat dan bermanfaat (daya saring), kemampuan meningkatkan mutu dan kuantitas produk yang dihasilkan (daya saing) dan kemampuan bekerja sama dalam bermitra secara menguntungkan dengan pengusaha atau pelaku usaha (daya sanding). Lestari *et al.*, (2023) menunjukkan peran Kelompok Wanita Tani (KWT) tidak hanya terbatas sebagai media pembelajaran dan unit produksi, tetapi juga sebagai mitra kerja sama dalam meningkatkan kontribusi wanita tani terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga. Hal ini terlihat dari aktivitas anggota wanita tani yang menyetorkan hasil panen mereka dalam bentuk segar maupun kering, seperti lemon kering, jahe, daun jati cina, serta berbagai produk herbal lainnya. Para anggota KWT berperan sebagai pemasok bahan baku jamu dan obat herbal yang kemudian diolah serta dikemas oleh KWT. Kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa anggota KWT mampu mendukung kemandirian ekonomi keluarga. Mulyani *et al.*, (2026) menyatakan kemandirian wanita tani dalam mendukung ekonomi rumah tangga dilihat dengan adanya: (1) kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada seperti memanfaatkan lahan pekarang dengan membudidayakan tanaman produktif (2) kemampuan mengatasi hambatan dalam memasarkan hasil panen; (3) kemampuan mengambil keputusan dalam menentukan jenis tanaman yang dibudidayakan dalam rangka optimalisasi lahan pekarangan. Meuwissen *et al.*, (2019) Ketahanan ekonomi rumah tangga petani ditentukan berbagai faktor. Salah satu faktor penentu adalah kontribusi wanita tani dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga. Peran ini dapat berkembang jika wanita tani memiliki kemampuan dalam berorganisasi dalam

mengembangkan kerja sama usahatani. Berikut merupakan peran wanita tani dalam ekonomi rumah tangga:

Sebagai Tenaga Produktif dalam Usaha Tani

Wanita tani memiliki kontribusi besar dalam kegiatan produksi pertanian. Mereka terlibat dalam berbagai tahapan usaha tani seperti penanaman, pemeliharaan tanaman, panen, hingga pasca panen. Keterlibatan wanita tani sebagai tenaga produktif membantu mengurangi biaya tenaga kerja sekaligus meningkatkan produktivitas usaha tani keluarga. Efisiensi dalam pengurangan biaya tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga petani dan tercukupinya kebutuhan rumah tangga karena peran wanita tani sebagai bagian dari tenaga produktif dalam proses produksi pertanian.

Pengelola Keuangan Rumah Tangga

Peran wanita tani sebagai pengelola keuangan keluarga sangat penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi rumah tangga. Wanita pada umumnya lebih teliti dalam merencanakan dan mengatur pengeluaran, menyusun prioritas kebutuhan, serta mengelola hasil usaha tani agar dapat dimanfaatkan secara efektif. Kemampuan wanita tani dalam mengelola keuangan membantu keluarga menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu, seperti gagal panen atau fluktuasi harga hasil pertanian. Pengelolaan keuangan yang baik juga mendorong terbentuknya budaya menabung dan investasi skala rumah tangga.

Pengolah Hasil Pertanian

Selain terlibat dalam produksi, wanita tani juga berperan dalam pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah. Berbagai produk seperti keripik, jamu herbal, abon, tepung lokal, minuman tradisional, hingga produk olahan rempah

merupakan contoh inovasi yang banyak dikembangkan oleh wanita tani. Kegiatan pengolahan hasil pertanian memberikan peluang usaha baru dan meningkatkan nilai ekonomi produk pertanian. Produk yang sebelumnya dijual dalam bentuk segar memiliki nilai tambah sehingga memiliki harga jual lebih tinggi setelah diolah. Hal ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan keluarga.

Mendukung Ketahanan Pangan Keluarga

Wanita tani memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan rumah tangga. Melalui pemanfaatan pekarangan, perempuan dapat menanam sayuran, tanaman obat keluarga, cabai, buah-buahan, maupun memelihara ternak kecil untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Pemanfaatan lahan pekarangan tidak hanya mengurangi pengeluaran rumah tangga, tetapi juga meningkatkan kualitas gizi keluarga. Ketahanan pangan keluarga yang baik menjadi dasar terciptanya kemandirian ekonomi rumah tangga.

Pelaku Usaha dan Wirausaha Pedesaan

Banyak wanita tani yang berkembang menjadi pelaku usaha mikro di bidang pertanian dan pangan. Mereka memasarkan produk melalui pasar lokal, media sosial, hingga platform digital. Kemampuan dalam membangun usaha mandiri menunjukkan bahwa wanita tani memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi pedesaan. Semangat kewirausahaan tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar dan memperkuat ekonomi lokal.

BAB VI

MODEL KONSEPTUAL

PEMBERDAYAAN KELOMPOK

WANITA TANI

➤ Pendahuluan

Pembangunan pertanian di Indonesia tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat pedesaan sebagai aktor utama pembangunan. Dalam konteks tersebut, perempuan memiliki posisi yang sangat strategis karena keterlibatannya tidak hanya terbatas pada aktivitas domestik, tetapi juga mencakup kegiatan produktif yang berhubungan langsung dengan sistem ekonomi rumah tangga dan pertanian. Perempuan pedesaan berperan dalam berbagai tahapan kegiatan pertanian, mulai dari produksi, pengolahan hasil, distribusi, hingga pengelolaan konsumsi keluarga. Namun demikian, kontribusi perempuan dalam sektor pertanian sering kali belum memperoleh pengakuan yang proporsional dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pendekatan pemberdayaan yang mampu memperkuat kapasitas, akses, dan posisi perempuan dalam struktur sosial maupun ekonomi masyarakat pedesaan.

Salah satu bentuk kelembagaan masyarakat yang berkembang dalam mendukung pemberdayaan perempuan di sektor pertanian adalah Kelompok Wanita Tani (KWT). KWT hadir sebagai wadah kolektif perempuan desa untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan ekonomi melalui kegiatan pertanian dan usaha produktif berbasis sumber daya lokal. Keberadaan KWT tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan usaha tani, tetapi juga sebagai media pembelajaran sosial, penguatan solidaritas, dan pengembangan partisipasi masyarakat. Dalam praktiknya, KWT telah berkembang menjadi ruang sosial yang memungkinkan perempuan membangun jaringan, meningkatkan kepercayaan diri, serta memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi dan informasi pembangunan.

Perkembangan Kelompok Wanita Tani menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari dimensi sosial dan ekonomi yang saling berkaitan. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota KWT pada dasarnya dibentuk oleh relasi sosial yang berkembang di dalam masyarakat pedesaan. Hubungan kerja sama, kepercayaan, norma sosial, dan budaya gotong royong menjadi modal penting yang memengaruhi keberhasilan kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi ekonomi menjadi relevan untuk memahami bagaimana interaksi sosial, nilai budaya, dan struktur kelembagaan memengaruhi dinamika pemberdayaan perempuan tani. Perspektif ini menempatkan kegiatan ekonomi bukan semata-mata sebagai aktivitas produksi dan distribusi, tetapi juga sebagai bagian dari relasi sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan pedesaan modern, Kelompok Wanita Tani memiliki potensi besar sebagai agen transformasi ekonomi lokal. Berbagai kegiatan produktif yang dikembangkan oleh KWT, seperti pengolahan hasil pertanian, pemanfaatan pekarangan, usaha pangan lokal, dan pemasaran berbasis digital, menunjukkan bahwa perempuan mampu menjadi penggerak ekonomi keluarga sekaligus komunitas. Kehadiran KWT juga berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan rumah tangga, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, partisipasi aktif perempuan dalam kelompok mendorong terciptanya pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Dengan demikian, pemberdayaan KWT tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi sosial, budaya, dan kelembagaan yang saling terintegrasi.

Meskipun demikian, proses pemberdayaan Kelompok Wanita Tani masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan akses terhadap modal usaha, rendahnya literasi teknologi, lemahnya kapasitas manajerial kelompok, serta masih kuatnya budaya patriarki di sebagian masyarakat pedesaan menjadi faktor yang dapat menghambat perkembangan kelompok. Selain itu, keberhasilan pemberdayaan juga dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan, kebijakan pemerintah, kualitas pendampingan, dan kemampuan kelompok dalam membangun jejaring sosial maupun ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan KWT memerlukan model konseptual yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, budaya, dan kelembagaan masyarakat pedesaan.

Berdasarkan uraian tersebut, bab ini membahas model konseptual pemberdayaan Kelompok Wanita Tani sebagai bagian dari upaya transformasi ekonomi pedesaan. Pembahasan diawali dengan uraian mengenai peran Kelompok Wanita Tani dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan perspektif sosiologi ekonomi dalam memahami proses pemberdayaan perempuan tani. Selanjutnya, bab ini mengkaji model konseptual pemberdayaan KWT beserta faktor-faktor pendukung dan hambatan yang memengaruhi keberhasilannya. Pada bagian akhir, dibahas strategi penguatan Kelompok Wanita Tani sebagai upaya mendorong transformasi ekonomi pedesaan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis potensi lokal masyarakat.

➤ **Peran Kelompok Wanita Tani**

Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan organisasi sosial-ekonomi berbasis masyarakat yang berperan penting dalam mendukung pembangunan pertanian dan pemberdayaan perempuan di wilayah pedesaan. Kehadiran KWT tidak hanya berfungsi sebagai wadah berkumpulnya perempuan tani, tetapi juga menjadi sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi keluarga, serta pengembangan jejaring sosial di masyarakat. Dalam konteks pembangunan pertanian modern, perempuan tidak lagi dipandang hanya sebagai pelengkap aktivitas pertanian, melainkan sebagai aktor utama yang memiliki kontribusi signifikan dalam proses produksi, pengolahan hasil, hingga pemasaran produk pertanian. Keterlibatan perempuan dalam kelompok tani mampu meningkatkan efisiensi usaha tani dan kesejahteraan rumah tangga petani (FAO, 2017; Kementerian Pertanian, 2021).

Peran utama Kelompok Wanita Tani terlihat dalam upaya peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan anggotanya. Melalui kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan, anggota KWT memperoleh pengetahuan mengenai teknik budidaya, diversifikasi pangan, pengolahan hasil pertanian, serta pengelolaan usaha berbasis rumah tangga. Proses pembelajaran tersebut mendorong perempuan menjadi lebih mandiri dan mampu mengambil keputusan dalam aktivitas ekonomi keluarga. Nugraheni dan Haryanto (2019), keberadaan KWT mampu meningkatkan kemampuan perempuan desa dalam mengakses informasi pertanian dan teknologi tepat guna. Selain itu, KWT juga menjadi media transfer inovasi pertanian yang efektif karena pendekatan pembelajaran dilakukan secara partisipatif dan berbasis pengalaman lokal masyarakat.

Dalam aspek ekonomi, Kelompok Wanita Tani memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga. Banyak KWT yang mengembangkan usaha produktif seperti pengolahan hasil pertanian, pembuatan makanan olahan, budidaya tanaman hortikultura, hingga usaha kerajinan berbasis sumber daya lokal. Aktivitas tersebut tidak hanya menciptakan peluang kerja bagi perempuan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, terutama pada saat terjadi krisis ekonomi atau penurunan hasil panen. Sari et al. (2020) partisipasi perempuan dalam KWT berdampak positif terhadap diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga petani. Dengan demikian, KWT menjadi salah satu instrumen penting dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis pemberdayaan masyarakat.

Kelompok Wanita Tani juga berperan dalam mendukung program ketahanan pangan keluarga dan masyarakat. Melalui pemanfaatan pekarangan rumah, anggota KWT didorong

untuk menanam berbagai jenis sayuran, tanaman obat keluarga, dan sumber pangan lokal lainnya. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang banyak dijalankan oleh KWT menjadi contoh nyata bagaimana perempuan mampu berkontribusi dalam penyediaan pangan sehat dan bergizi bagi keluarga. Kementerian Pertanian (2020), optimalisasi pekarangan melalui KWT terbukti mampu meningkatkan ketersediaan pangan rumah tangga sekaligus mengurangi pengeluaran konsumsi keluarga. Peran ini menjadi semakin penting di tengah tantangan krisis pangan global dan meningkatnya kebutuhan akan pangan sehat dan berkelanjutan.

Selain fungsi ekonomi dan pangan, Kelompok Wanita Tani memiliki peran sosial yang kuat dalam membangun solidaritas dan kohesi sosial masyarakat pedesaan. Interaksi rutin antaranggota dalam berbagai kegiatan kelompok menciptakan hubungan sosial yang erat, rasa saling percaya, dan budaya gotong royong. KWT menjadi ruang sosial bagi perempuan untuk berbagi pengalaman, menyelesaikan permasalahan bersama, serta memperkuat posisi perempuan dalam kehidupan masyarakat desa. Putri dan Wijayanti (2021) keberadaan kelompok perempuan di pedesaan mampu meningkatkan modal sosial masyarakat yang berdampak pada penguatan partisipasi pembangunan desa. Dengan adanya modal sosial yang kuat, masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengembangkan kegiatan kolektif yang produktif dan berkelanjutan.

Peran Kelompok Wanita Tani juga berkaitan erat dengan upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan pertanian berkelanjutan. Banyak KWT yang mulai menerapkan praktik pertanian ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk organik, pengelolaan sampah rumah tangga, dan budidaya

tanaman secara alami. Kesadaran lingkungan yang dibangun melalui kelompok ini menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan. Rahmawati et al. (2022), perempuan tani memiliki kepedulian tinggi terhadap keberlanjutan lingkungan karena mereka berhubungan langsung dengan kebutuhan pangan dan kesehatan keluarga. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam kegiatan pertanian ekologis dapat menjadi strategi efektif untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam perkembangan era digital, Kelompok Wanita Tani mulai mengambil peran dalam pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran digital. Anggota KWT tidak hanya memproduksi hasil pertanian atau olahan pangan, tetapi juga belajar memasarkan produk melalui media sosial, marketplace, dan platform digital lainnya. Transformasi ini membuka peluang pasar yang lebih luas dan meningkatkan nilai tambah produk lokal. Handayani dan Prasetyo (2023) literasi digital pada kelompok perempuan tani dapat meningkatkan daya saing usaha mikro di pedesaan. Pemanfaatan teknologi digital juga membantu anggota KWT membangun jaringan pemasaran, memperluas akses informasi, dan mempercepat proses adaptasi terhadap perubahan pasar modern.

Kelompok Wanita Tani memiliki kontribusi strategis dalam mendukung pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan gender. Melalui keterlibatan aktif perempuan dalam kegiatan kelompok, terjadi peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat keluarga maupun masyarakat. Perempuan menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam kegiatan pembangunan desa. UN Women (2020), pemberdayaan perempuan melalui organisasi komunitas dapat

memperkuat kapasitas sosial dan ekonomi perempuan sekaligus mendorong terciptanya pembangunan yang lebih inklusif. Dengan demikian, KWT tidak hanya berfungsi sebagai organisasi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial bagi perempuan pedesaan.

Meskipun memiliki berbagai peran penting, Kelompok Wanita Tani masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan modal usaha, rendahnya akses terhadap teknologi, serta kurangnya pendampingan berkelanjutan. Selain itu, masih terdapat stereotip gender yang memandang perempuan hanya sebagai pelaku domestik sehingga partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi belum sepenuhnya dihargai. Oleh karena itu, dukungan pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan KWT. Budiarti et al. (2021), penguatan kelembagaan dan akses pasar merupakan faktor utama yang menentukan keberlanjutan kelompok perempuan tani di pedesaan. Dukungan tersebut penting agar KWT mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Kelompok Wanita Tani memiliki peran multidimensional dalam pembangunan masyarakat pedesaan. KWT tidak hanya berfungsi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi perempuan, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kapasitas, penguatan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, dan pembangunan sosial masyarakat. Perempuan melalui KWT mampu menjadi agen perubahan yang berkontribusi dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang lebih sejahtera. Dalam konteks pembangunan pertanian berkelanjutan, keberadaan KWT menjadi elemen strategis yang perlu terus diperkuat melalui kebijakan, pendampingan, dan inovasi berbasis kebutuhan masyarakat lokal. Dengan dukungan yang tepat, Kelompok Wanita Tani

dapat menjadi motor penggerak pembangunan desa yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.

➤ **Perspektif Sosiologi Ekonomi dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani**

Perspektif sosiologi ekonomi memandang bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari hubungan sosial, budaya, dan kelembagaan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks pedesaan, kegiatan ekonomi masyarakat tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan material, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai gotong royong, solidaritas, kepercayaan, dan norma sosial yang hidup dalam komunitas. Pendekatan ini menjadi penting dalam memahami pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT), karena keberhasilan kelompok tidak hanya ditentukan oleh modal ekonomi atau teknologi, tetapi juga oleh kekuatan relasi sosial antaranggota dan dukungan lingkungan sosial masyarakat (Putri & Wijayanti, 2021). Dengan demikian, pemberdayaan perempuan tani perlu dipahami sebagai proses sosial yang melibatkan perubahan kapasitas individu, hubungan sosial, serta akses terhadap sumber daya ekonomi secara kolektif (UN Women, 2020).

Dalam perspektif sosiologi ekonomi, Kelompok Wanita Tani merupakan bentuk kelembagaan sosial-ekonomi yang tumbuh dari kebutuhan masyarakat pedesaan untuk memperkuat kehidupan ekonomi keluarga. KWT tidak hanya berfungsi sebagai kelompok produksi pertanian, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang memungkinkan perempuan membangun jaringan kerja sama, berbagi pengalaman, dan memperkuat solidaritas sosial. Hubungan antaranggota kelompok menciptakan rasa saling percaya yang menjadi modal sosial penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi bersama (Wulandari, 2025). Modal sosial tersebut mendorong

terbentuknya kerja kolektif yang mampu meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat desa. Ardiani (2021) keberhasilan pemberdayaan perempuan melalui KWT sangat dipengaruhi oleh kuatnya hubungan sosial dan kohesivitas kelompok dalam masyarakat pedesaan.

Konsep *embeddedness* atau keterlekatan sosial dalam sosiologi ekonomi menjelaskan bahwa tindakan ekonomi selalu melekat dalam struktur sosial masyarakat. Aktivitas ekonomi anggota KWT, seperti produksi pangan, pengolahan hasil pertanian, maupun pemasaran produk lokal, berlangsung dalam jaringan hubungan sosial yang dibangun melalui interaksi sehari-hari. Kepercayaan antaranggota menjadi dasar terbentuknya kerja sama ekonomi yang berkelanjutan. Dalam masyarakat pedesaan, hubungan kekeluargaan dan budaya gotong royong menjadi faktor yang memperkuat keberlanjutan kelompok (Putri & Wijayanti, 2021). Oleh karena itu, pemberdayaan KWT tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan ekonomi formal, tetapi juga harus memperhatikan dinamika sosial dan budaya masyarakat setempat. Perspektif ini menunjukkan bahwa relasi sosial memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan aktivitas ekonomi perempuan tani.

Kelompok Wanita Tani juga dapat dipahami sebagai bentuk pemberdayaan berbasis komunitas yang menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan. Dalam pendekatan sosiologi ekonomi, pemberdayaan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan perempuan dalam mengakses informasi, mengambil keputusan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat (UN Women, 2020). Melalui kegiatan kelompok, perempuan memperoleh ruang untuk belajar, berdiskusi, dan meningkatkan kapasitas diri. Proses tersebut mendorong terbentuknya kesadaran kolektif bahwa

perempuan memiliki hak dan kemampuan untuk terlibat aktif dalam pembangunan ekonomi desa. Dengan demikian, KWT menjadi sarana transformasi sosial yang memperkuat posisi perempuan dalam struktur sosial masyarakat pedesaan (Ardiani, 2021).

Dalam perspektif sosiologi ekonomi, keberadaan KWT juga berkaitan erat dengan penguatan modal sosial masyarakat desa. Modal sosial mencakup unsur kepercayaan, norma sosial, jaringan, dan kerja sama yang memudahkan masyarakat melakukan tindakan kolektif. Melalui kegiatan rutin seperti pertemuan kelompok, pelatihan, dan kegiatan produksi bersama, anggota KWT membangun hubungan sosial yang erat dan saling mendukung. Modal sosial tersebut menjadi kekuatan utama dalam mengembangkan usaha ekonomi berbasis komunitas (Putri & Wijayanti, 2021). Bahkan dalam banyak kasus, kelompok yang memiliki solidaritas tinggi cenderung lebih mampu bertahan menghadapi tantangan ekonomi dibandingkan kelompok yang hanya berorientasi pada keuntungan material semata (Wulandari, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial menjadi fondasi penting dalam keberhasilan pemberdayaan ekonomi perempuan tani.

Pendekatan sosiologi ekonomi juga menyoroti pentingnya peran budaya lokal dalam proses pemberdayaan Kelompok Wanita Tani. Budaya masyarakat pedesaan yang menjunjung nilai kebersamaan dan gotong royong menjadi modal penting dalam pengembangan kegiatan kelompok. Nilai budaya tersebut mendorong anggota untuk saling membantu dalam kegiatan produksi, pemasaran, maupun pengelolaan usaha bersama. Namun di sisi lain, budaya patriarki yang masih berkembang di sebagian masyarakat pedesaan juga dapat menjadi hambatan bagi pemberdayaan perempuan (Sinaga et al., 2024). Perempuan sering kali menghadapi

keterbatasan akses terhadap pengambilan keputusan, kepemilikan sumber daya, dan kesempatan mengikuti pelatihan. Oleh karena itu, pemberdayaan KWT perlu dilakukan melalui pendekatan yang sensitif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat setempat agar perubahan sosial dapat berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan.

Dalam perkembangan ekonomi modern, perspektif sosiologi ekonomi melihat bahwa transformasi ekonomi pedesaan tidak dapat dilepaskan dari kemampuan masyarakat dalam membangun jaringan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Kelompok Wanita Tani tidak hanya berinteraksi di tingkat lokal, tetapi mulai terhubung dengan lembaga pemerintah, penyuluh pertanian, lembaga keuangan, hingga pasar digital. Jaringan tersebut membuka peluang bagi perempuan tani untuk memperoleh akses terhadap pelatihan, modal usaha, teknologi, dan pemasaran produk (Handayani & Prasetyo, 2023). Hubungan antara KWT dengan berbagai aktor pembangunan menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan bersifat multidimensional dan memerlukan sinergi antarberbagai lembaga sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, penguatan jejaring sosial menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan keberdayaan kelompok perempuan tani.

Perspektif sosiologi ekonomi juga menempatkan KWT sebagai agen perubahan sosial dalam pembangunan berkelanjutan. Perempuan tani tidak hanya berkontribusi pada peningkatan ekonomi rumah tangga, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya lokal. Banyak KWT yang mulai menerapkan praktik pertanian ramah lingkungan, pemanfaatan lahan pekarangan, dan pengolahan pangan lokal berbasis sumber daya desa (Permana, 2020).

Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perubahan sosial yang dimulai dari komunitas kecil seperti KWT dapat menjadi kekuatan transformasi yang lebih luas dalam masyarakat pedesaan (Kasim, 2025).

Di sisi lain, pendekatan sosiologi ekonomi menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh program bantuan atau intervensi pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat. Pemberdayaan yang bersifat *top-down* sering kali menghasilkan ketergantungan kelompok terhadap bantuan eksternal. Sebaliknya, pendekatan partisipatif yang melibatkan perempuan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program cenderung menghasilkan kelompok yang lebih mandiri dan berkelanjutan (Kementerian Pertanian, 2021). Dalam konteks KWT, partisipasi anggota menjadi indikator penting dalam menentukan keberhasilan program pemberdayaan. Semakin tinggi keterlibatan anggota dalam aktivitas kelompok, maka semakin besar pula peluang terciptanya kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat desa.

Secara keseluruhan, perspektif sosiologi ekonomi memberikan pemahaman bahwa pemberdayaan Kelompok Wanita Tani merupakan proses yang tidak hanya berkaitan dengan peningkatan ekonomi, tetapi juga perubahan sosial, budaya, dan kelembagaan masyarakat pedesaan. Keberhasilan pemberdayaan perempuan tani dipengaruhi oleh kekuatan modal sosial, jaringan kelembagaan, budaya lokal, partisipasi masyarakat, dan kemampuan kelompok dalam membangun kerja sama kolektif (Putri & Wijayanti, 2021). Dengan pendekatan ini, KWT dipandang bukan sekadar organisasi pertanian perempuan, melainkan sebagai institusi sosial-

ekonomi yang mampu mendorong transformasi ekonomi pedesaan secara inklusif dan berkelanjutan (UN Women, 2020). Oleh karena itu, penguatan Kelompok Wanita Tani perlu dilakukan melalui strategi yang mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi agar tercipta masyarakat desa yang mandiri, berdaya, dan sejahtera.

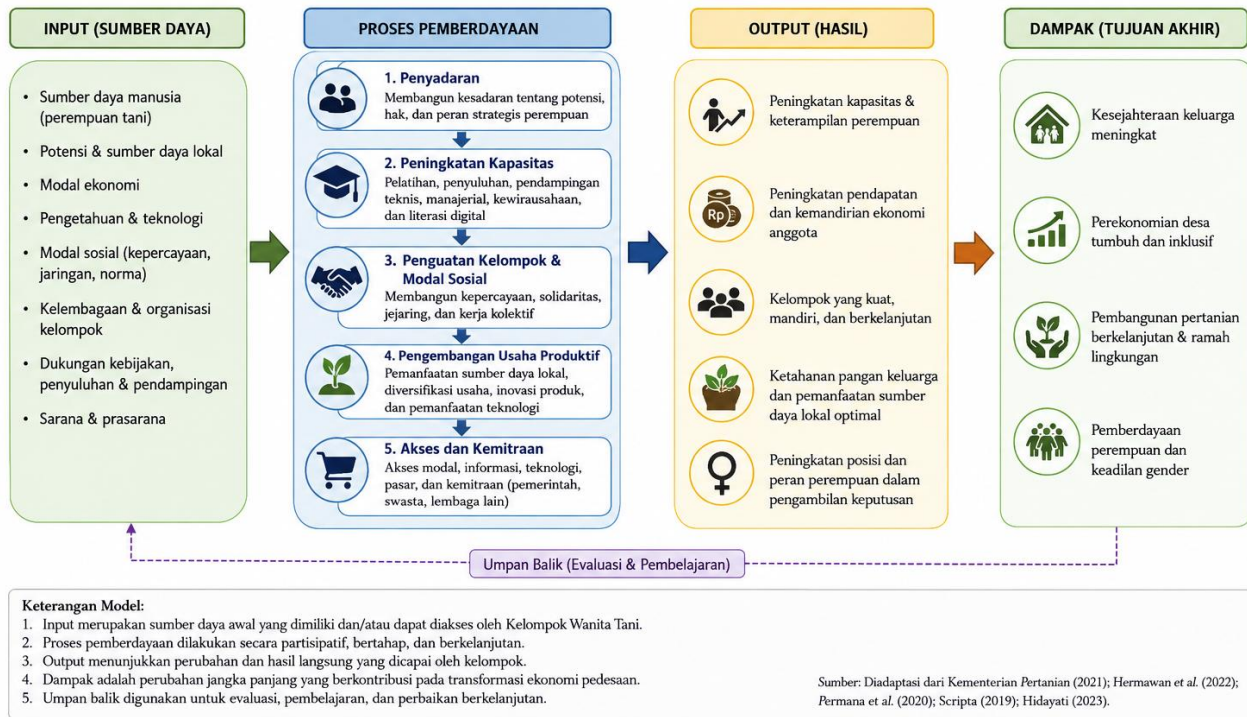
➤ Model Konseptual Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani

Model konseptual pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) pada dasarnya merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan proses, unsur, dan strategi dalam meningkatkan kapasitas perempuan pedesaan melalui kegiatan sosial dan ekonomi berbasis kelompok. Pemberdayaan tidak hanya dipahami sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga sebagai proses penguatan kemampuan individu dan kelompok agar mampu mengakses sumber daya, mengambil keputusan, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa (Hermawan et al., 2022). Dalam konteks KWT, pemberdayaan dilakukan melalui pendekatan kolektif yang menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan yang memiliki potensi untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Model konseptual ini menempatkan perempuan tani sebagai aktor utama yang didukung oleh faktor kelembagaan, modal sosial, pelatihan, serta akses terhadap teknologi dan pasar.

Secara konseptual, model pemberdayaan KWT dibangun atas tiga komponen utama, yaitu input, proses, dan output pemberdayaan (Gambar 1). Komponen input meliputi sumber daya manusia, potensi lokal, dukungan kebijakan, pendampingan, serta sarana dan prasarana kelompok. Input tersebut menjadi modal awal dalam membangun keberdayaan

perempuan tani di pedesaan. Permana et al. (2020), faktor eksternal seperti dukungan penyuluhan, kebijakan pemerintah, dan ketersediaan fasilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat keberdayaan kelompok wanita tani. Selain itu, dukungan lingkungan sosial dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memperkuat keberhasilan pemberdayaan kelompok perempuan tani.

Tahapan proses dalam model konseptual pemberdayaan KWT umumnya dimulai dari tahap penyadaran (*awareness*). Pada tahap ini, perempuan didorong untuk memahami potensi, kemampuan, dan peran strategis yang dimiliki dalam pembangunan ekonomi keluarga maupun masyarakat. Proses penyadaran dilakukan melalui sosialisasi, diskusi kelompok, dan kegiatan pendidikan nonformal yang bertujuan membangun rasa percaya diri perempuan. Tahap penyadaran menjadi dasar penting dalam membangun motivasi anggota kelompok untuk terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan (Hidayati, 2023). Tanpa adanya kesadaran terhadap potensi diri, perempuan cenderung sulit berkembang dan masih bergantung pada pihak luar dalam menjalankan aktivitas ekonomi.



Gambar 2. Model Konseptual Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani

Tahap berikutnya adalah peningkatan kapasitas (*capacity building*) yang dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan berkelanjutan. Pada tahap ini, anggota KWT memperoleh keterampilan teknis maupun manajerial yang mendukung pengembangan usaha produktif. Bentuk pelatihan yang diberikan meliputi budidaya pertanian, pengolahan hasil pertanian, pemasaran digital, pengelolaan keuangan, hingga kewirausahaan berbasis sumber daya lokal. Nugroho (2023), model komunikasi pemberdayaan yang efektif dalam KWT dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang menempatkan anggota kelompok sebagai pelaku aktif dalam proses belajar bersama. Pendampingan yang berkelanjutan memungkinkan perempuan tani mampu meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan teknologi.

Dalam model konseptual pemberdayaan KWT, modal sosial menjadi elemen penting yang menghubungkan seluruh proses pemberdayaan. Modal sosial mencakup kepercayaan, solidaritas, norma sosial, dan jaringan kerja sama antaranggota kelompok maupun dengan pihak eksternal. Keberadaan modal sosial memungkinkan kelompok mampu membangun kerja kolektif yang efektif dalam menjalankan usaha bersama. Kelompok dengan tingkat kohesi sosial yang tinggi cenderung lebih mampu mempertahankan keberlanjutan program pemberdayaan dibandingkan kelompok yang lemah secara sosial (Hermawan et al., 2022). Dengan demikian, keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh modal ekonomi, tetapi juga oleh kekuatan hubungan sosial yang berkembang di dalam kelompok.

Model pemberdayaan KWT juga menekankan pentingnya pendekatan *bottom-up* dalam proses pembangunan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pihak yang menentukan kebutuhan, tujuan, dan bentuk

kegiatan pemberdayaan sesuai dengan kondisi lokal yang dimiliki. Kelompok wanita tani yang dibangun melalui pendekatan partisipatif cenderung memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi karena anggota merasa memiliki program yang dijalankan. Model pemberdayaan berbasis masyarakat mampu meningkatkan partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan kelompok (Scripta, 2019). Pendekatan *bottom-up* juga memperkuat rasa tanggung jawab anggota terhadap keberhasilan program pemberdayaan yang dijalankan secara bersama-sama.

Selain pendekatan partisipatif, model konseptual pemberdayaan KWT juga menempatkan fungsi kelompok sebagai unsur strategis dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Fungsi kelompok tidak hanya sebagai kelas belajar, tetapi juga sebagai wahana kerja sama dan unit produksi ekonomi masyarakat. Melalui fungsi tersebut, anggota kelompok dapat belajar bersama, berbagi pengalaman, dan mengembangkan usaha kolektif berbasis potensi lokal. Permana et al. (2020), fungsi kelompok tani yang berjalan efektif dapat meningkatkan kemampuan anggota dalam mengakses informasi, menerapkan teknologi, serta mengambil keputusan usaha secara mandiri. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan kelompok menjadi bagian penting dalam model pemberdayaan perempuan tani.

Dalam perkembangan ekonomi modern, model pemberdayaan KWT juga diarahkan pada penguatan inovasi dan adaptasi teknologi. Transformasi digital dalam sektor pertanian mendorong perempuan tani untuk mampu memanfaatkan media sosial, platform digital, dan teknologi pemasaran online dalam mengembangkan usaha kelompok. Penguatan kapasitas digital menjadi bagian penting dalam

model pemberdayaan karena mampu memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal. Pemberdayaan berbasis inovasi teknologi mampu meningkatkan keterampilan kewirausahaan perempuan serta memperkuat ekonomi rumah tangga petani (UIN Sunan Kalijaga, 2024). Dengan demikian, model pemberdayaan KWT perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar modern.

Output dari model konseptual pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dapat dilihat dari meningkatnya kapasitas individu dan keberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan ditandai dengan meningkatnya keterampilan anggota, kemandirian usaha, kemampuan mengambil keputusan, partisipasi sosial, serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Selain itu, keberadaan KWT juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan rumah tangga, pengembangan ekonomi lokal, dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan desa (Permana et al., 2020). Dalam jangka panjang, model pemberdayaan yang berhasil akan menciptakan perempuan tani yang mandiri, produktif, dan mampu menjadi agen perubahan sosial di lingkungan masyarakat pedesaan.

Secara keseluruhan, model konseptual pemberdayaan Kelompok Wanita Tani merupakan integrasi antara aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, dan budaya dalam proses pembangunan masyarakat pedesaan. Model ini menempatkan perempuan sebagai subjek utama yang diberdayakan melalui proses penyadaran, peningkatan kapasitas, penguatan modal sosial, partisipasi aktif, dan pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal. Keberhasilan model pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh dukungan kebijakan, kualitas pendampingan, fungsi kelompok, serta kemampuan kelompok dalam membangun jejaring sosial dan ekonomi yang

berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan KWT perlu dilakukan secara komprehensif agar mampu mendorong transformasi ekonomi pedesaan yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.

➤ **Faktor Pendukung dan Hambatan Pemberdayaan**

Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan proses transformasi sosial yang bertujuan meningkatkan kapasitas perempuan pedesaan dalam mengakses sumber daya, memperluas partisipasi, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam perspektif sosiologi ekonomi, aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan tidak berdiri secara terpisah dari struktur sosial, melainkan melekat (*embedded*) dalam relasi budaya, norma sosial, dan kelembagaan masyarakat setempat. Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan perempuan tani tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan ekonomi semata, tetapi juga harus dianalisis melalui faktor sosial, budaya, kelembagaan, dan relasi kekuasaan yang memengaruhi kehidupan perempuan di pedesaan.

Kabeer (1999), pemberdayaan perempuan merupakan proses ketika individu yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses memperoleh kemampuan untuk menentukan pilihan strategis dalam hidupnya. Dalam konteks KWT, pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan rumah tangga, tetapi juga mencakup penguatan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan, peningkatan akses terhadap sumber daya produktif, serta pengembangan kapasitas kolektif masyarakat desa. Dengan demikian, proses pemberdayaan perempuan tani dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat memperkuat maupun menghambat perkembangan kelompok secara berkelanjutan.

Faktor Pendorong Pemberdayaan

Salah satu faktor utama yang mendorong keberhasilan pemberdayaan KWT adalah keberadaan modal sosial dalam masyarakat pedesaan. Putnam (1993) modal sosial terdiri atas jaringan sosial, norma bersama, dan rasa percaya yang mampu meningkatkan efektivitas tindakan kolektif masyarakat. Dalam praktiknya, modal sosial pada KWT tercermin melalui budaya gotong royong, solidaritas kelompok, dan kerja sama antar anggota dalam menjalankan kegiatan ekonomi maupun sosial. Modal sosial tersebut tidak hanya memperkuat kohesi internal kelompok, tetapi juga meningkatkan kemampuan kelompok dalam menghadapi perubahan sosial dan tekanan ekonomi.

Woolcock (2001) membagi modal sosial ke dalam tiga bentuk, yaitu bonding, bridging, dan linking social capital. Bonding social capital terlihat dari kuatnya hubungan antar anggota kelompok yang menciptakan rasa saling percaya dan dukungan sosial. Bridging social capital muncul melalui jejaring antarkelompok atau komunitas lain yang membuka peluang kerja sama ekonomi dan pertukaran informasi. Sementara itu, linking social capital berkaitan dengan kemampuan kelompok membangun relasi dengan lembaga formal, seperti pemerintah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Ketiga bentuk modal sosial tersebut berperan penting dalam memperluas akses perempuan tani terhadap sumber daya, informasi, dan peluang pengembangan usaha.

Selain modal sosial, partisipasi aktif anggota kelompok juga menjadi faktor penting dalam proses pemberdayaan perempuan tani. Chambers (1995) pembangunan partisipatif menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan sehingga masyarakat memiliki ruang untuk menentukan kebutuhan dan arah pengembangan kelompok.

Dalam konteks KWT, partisipasi anggota tidak hanya terlihat melalui kehadiran dalam kegiatan kelompok, tetapi juga keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan usaha bersama, serta pengembangan inovasi lokal. Tingginya partisipasi anggota mencerminkan adanya rasa memiliki terhadap kelompok sehingga meningkatkan keberlanjutan program pemberdayaan.

Keberhasilan pemberdayaan juga dipengaruhi oleh kualitas pendampingan dan dukungan kelembagaan. Mardikanto dan Soebiato (2017), pendampingan masyarakat merupakan proses fasilitasi yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam praktik pemberdayaan KWT, pendamping tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi teknis pertanian, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu perempuan tani membangun kepercayaan diri, kemampuan organisasi, dan akses terhadap jaringan ekonomi. Dukungan kelembagaan dari pemerintah, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, maupun lembaga swadaya masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasitas kelompok perempuan tani.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan digitalisasi ekonomi turut membuka peluang baru bagi pemberdayaan perempuan tani. Pemanfaatan media sosial dan platform digital memungkinkan perempuan tani memperluas akses pasar, meningkatkan promosi produk, dan memperoleh informasi usaha secara lebih cepat. Sari et al. (2022) pemanfaatan teknologi digital pada kelompok perempuan tani mampu meningkatkan efektivitas pemasaran produk lokal dan memperluas jejaring usaha masyarakat desa. Namun demikian, pemanfaatan teknologi digital tetap memerlukan dukungan peningkatan kapasitas dan literasi digital agar dapat

dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok masyarakat pedesaan.

Secara konseptual, faktor-faktor pendorong tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berkaitan dalam membentuk kapasitas kolektif masyarakat. Modal sosial yang kuat mampu meningkatkan partisipasi anggota kelompok, sedangkan partisipasi yang tinggi memperkuat efektivitas pendampingan dan keberlanjutan kelembagaan kelompok. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan tani perlu dipahami sebagai proses multidimensional yang melibatkan interaksi antara faktor sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan masyarakat pedesaan.

Faktor Penghambat Pemberdayaan

Meskipun memiliki berbagai faktor pendukung, proses pemberdayaan KWT masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Salah satu hambatan utama adalah masih kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat pedesaan. Fakih (2013) budaya patriarki menempatkan perempuan pada posisi subordinat sehingga akses perempuan terhadap pendidikan, ekonomi, dan pengambilan keputusan menjadi terbatas. Dalam masyarakat agraris, perempuan sering kali diposisikan sebagai pelengkap aktivitas pertanian keluarga sehingga kontribusinya kurang memperoleh pengakuan sosial maupun ekonomi.

Budaya patriarki juga memunculkan fenomena beban ganda perempuan (*double burden*). Perempuan tani tidak hanya terlibat dalam aktivitas produktif pertanian, tetapi juga tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik dan sosial dalam rumah tangga. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan mengalami keterbatasan waktu dan energi untuk mengikuti kegiatan kelompok maupun mengembangkan

kapasitas diri. Umar (2001), ketimpangan peran gender dalam masyarakat sering menyebabkan perempuan menghadapi tekanan sosial yang lebih besar dibanding laki-laki, terutama dalam pembagian kerja domestik dan publik.

Selain faktor budaya, ketimpangan kepemilikan aset produktif juga menjadi hambatan penting dalam pemberdayaan perempuan tani. Banyak perempuan tani tidak memiliki legalitas kepemilikan lahan sehingga akses terhadap modal usaha, bantuan produksi, dan pembiayaan formal menjadi terbatas. Dalam praktiknya, kepemilikan aset produktif masih didominasi laki-laki sehingga perempuan memiliki posisi tawar yang lebih rendah dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga maupun pengembangan usaha pertanian.

Hambatan lain yang cukup signifikan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan literasi teknologi. Sebagian anggota KWT masih memiliki keterbatasan dalam aspek pendidikan, manajemen usaha, administrasi kelompok, dan penggunaan teknologi digital. Kondisi tersebut menyebabkan kelompok mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha produktif secara lebih kompetitif. Selain itu, digitalisasi ekonomi juga belum sepenuhnya inklusif karena masih terdapat kesenjangan akses internet dan kemampuan teknologi di wilayah pedesaan. Fenomena ini menunjukkan adanya gender digital divide yang menyebabkan perempuan tani belum memperoleh manfaat optimal dari perkembangan teknologi digital.

Di sisi kelembagaan, lemahnya keberlanjutan program pemberdayaan juga menjadi tantangan yang cukup besar. Banyak program pemberdayaan masih bersifat jangka pendek dan bergantung pada bantuan eksternal sehingga kelompok menjadi kurang mandiri ketika program selesai dilaksanakan.

Freire (1970) pemberdayaan yang tidak membangun kesadaran kritis masyarakat cenderung menciptakan ketergantungan terhadap pihak luar. Selain itu, lemahnya kapasitas manajerial organisasi dan rendahnya regenerasi kepemimpinan kelompok juga dapat memengaruhi keberlanjutan kelembagaan KWT di masa depan.

Perubahan iklim dan ketidakstabilan ekonomi juga menjadi hambatan eksternal yang memengaruhi keberlanjutan pemberdayaan perempuan tani. Ketergantungan masyarakat desa terhadap sektor pertanian menyebabkan kelompok rentan terhadap gagal panen, fluktuasi harga komoditas, dan perubahan cuaca ekstrem. Ketika rumah tangga menghadapi tekanan ekonomi, perempuan cenderung kembali diprioritaskan pada peran domestik sehingga partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan mengalami penurunan.

➤ **Strategi Penguatan Kelompok Wanita Tani untuk Transformasi Ekonomi Pedesaan**

Strategi penguatan Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan langkah penting dalam mendorong transformasi ekonomi pedesaan yang lebih inklusif, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan pedesaan, KWT tidak hanya dipandang sebagai organisasi perempuan berbasis pertanian, tetapi juga sebagai institusi sosial-ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat desa. Penguatan kelompok diperlukan karena perempuan pedesaan memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi lokal melalui kegiatan produksi, pengolahan hasil pertanian, pemasaran, dan pengelolaan pangan rumah tangga. Kasim (2025), strategi pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, dan perluasan akses pasar

terbukti efektif dalam meningkatkan peran perempuan tani sebagai agen perubahan ekonomi pedesaan.

Salah satu strategi utama dalam penguatan KWT adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan. Penguatan kapasitas dilakukan agar anggota kelompok memiliki keterampilan teknis dan manajerial yang memadai dalam mengelola usaha produktif berbasis pertanian maupun usaha rumah tangga. Pelatihan yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan teknik budidaya pertanian, tetapi juga mencakup kewirausahaan, pengelolaan keuangan, pengemasan produk, dan pemasaran digital. Ananda (2026) bimbingan teknis dan pelatihan keterampilan mampu meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola usaha ekonomi produktif secara mandiri. Dengan meningkatnya kapasitas anggota, KWT menjadi lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi.

Selain peningkatan kapasitas individu, strategi penguatan KWT juga dilakukan melalui pengembangan kelembagaan kelompok. Kelembagaan yang kuat menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan organisasi dan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui pembentukan struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang terorganisir, pengelolaan administrasi kelompok, serta penguatan kepemimpinan perempuan dalam kelompok. KWT Kelapa Dua Sasak menunjukkan pengembangan kelembagaan mampu meningkatkan efektivitas kelompok dalam menjalankan program pemberdayaan dan memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak (Sabaiti, 2024). Kelembagaan yang kuat juga meningkatkan kepercayaan anggota terhadap kelompok

sehingga memperkuat solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat.

Strategi penguatan berikutnya adalah pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal desa. KWT perlu didorong untuk memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia agar mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah ekonomi. Pengembangan usaha dapat dilakukan melalui pengolahan hasil pertanian, diversifikasi produk pangan lokal, kerajinan rumah tangga, maupun usaha hortikultura berbasis pekarangan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan anggota kelompok, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal berbasis sumber daya desa. Kahfi et al. (2024), transformasi pemberdayaan ekonomi perempuan melalui KWT berbasis potensi lokal mampu meningkatkan kontribusi perempuan terhadap ekonomi rumah tangga dan ketahanan pangan masyarakat.

Dalam era digital, strategi penguatan Kelompok Wanita Tani juga harus diarahkan pada peningkatan literasi teknologi dan pemasaran digital. Perkembangan teknologi informasi membuka peluang besar bagi kelompok perempuan tani untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal. Pemanfaatan media sosial, marketplace, dan platform digital memungkinkan anggota KWT memasarkan produk secara lebih luas tanpa terbatas oleh wilayah geografis. Kelompok tani perempuan “Iye Ape Satu Hati” menunjukkan bahwa implementasi strategi pemasaran digital mampu meningkatkan keterampilan anggota dalam promosi produk dan memperluas peluang ekonomi kelompok (Sinurat et al., 2025). Oleh karena itu, penguatan kapasitas digital menjadi bagian penting dalam transformasi ekonomi pedesaan berbasis pemberdayaan perempuan.

Penguatan modal sosial juga menjadi strategi penting dalam mendukung keberhasilan KWT. Modal sosial mencakup kepercayaan, jaringan sosial, norma, dan budaya gotong royong yang berkembang di masyarakat pedesaan. Melalui hubungan sosial yang kuat, anggota kelompok dapat saling membantu dalam kegiatan produksi, pemasaran, maupun pengembangan usaha bersama. Solidaritas sosial yang tinggi juga meningkatkan keberlanjutan kelompok karena anggota merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan organisasi. Kelompok perempuan yang memiliki kohesi sosial tinggi cenderung lebih mampu bertahan menghadapi tantangan ekonomi dibandingkan kelompok yang lemah secara sosial (Ananda, 2026). Dengan demikian, penguatan modal sosial menjadi bagian integral dalam strategi pemberdayaan KWT.

Strategi penguatan KWT juga memerlukan dukungan kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dunia usaha, dan organisasi masyarakat. Kemitraan menjadi sarana penting untuk memperluas akses kelompok terhadap modal usaha, teknologi, pelatihan, dan pasar. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyediakan program pendampingan, bantuan sarana produksi, serta kebijakan yang mendukung pengembangan usaha perempuan pedesaan. Siaunuar (2025), dukungan pemerintah daerah melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan program pemanfaatan pekarangan terbukti mampu memperkuat peran KWT dalam pembangunan ekonomi desa. Kolaborasi multipihak menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pemberdayaan yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Selain aspek ekonomi, strategi penguatan KWT juga harus memperhatikan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Kelompok Wanita Tani memiliki peran penting dalam mengembangkan pertanian ramah lingkungan melalui pemanfaatan pupuk organik, pengelolaan limbah rumah tangga, dan pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif. Pendekatan ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan keluarga, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam di pedesaan. Pada praktiknya, banyak KWT mulai menerapkan konsep pertanian berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan ekologi dalam kegiatan usaha kelompok (Sabaiti, 2024). Dengan demikian, transformasi ekonomi pedesaan yang dilakukan oleh KWT juga berkontribusi terhadap pembangunan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Strategi lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat keluarga maupun masyarakat desa. Pemberdayaan perempuan melalui KWT harus mampu mendorong perempuan memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan arah pembangunan ekonomi keluarga dan komunitas. Partisipasi aktif perempuan dalam organisasi kelompok dapat meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan komunikasi, dan kapasitas kepemimpinan perempuan pedesaan. Nidia (2026), keberadaan KWT menjadi sarana strategis dalam meningkatkan partisipasi perempuan pada kegiatan ekonomi produktif sekaligus memperkuat posisi perempuan dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, penguatan KWT juga berarti memperkuat keadilan gender dalam pembangunan masyarakat pedesaan.

Secara keseluruhan, strategi penguatan Kelompok Wanita Tani merupakan proses multidimensional yang melibatkan aspek kapasitas sumber daya manusia, penguatan

kelembagaan, pengembangan usaha produktif, literasi digital, modal sosial, kemitraan, keberlanjutan lingkungan, dan partisipasi perempuan. Seluruh strategi tersebut saling berkaitan dalam menciptakan transformasi ekonomi pedesaan yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Keberhasilan KWT tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan ekonomi, tetapi juga dari meningkatnya kapasitas perempuan, kemandirian kelompok, serta terbentuknya masyarakat desa yang lebih inklusif dan sejahtera. Oleh karena itu, penguatan KWT perlu terus didukung melalui kebijakan, pendampingan, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi lokal masyarakat pedesaan.

BAB VII

STRATEGI EKOLOGIS UNTUK PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK WANITA TANI

Penguatan kapasitas Kelompok Wanita Tani (KWT) perlu dibaca melalui dua kenyataan yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, sebagai lumbung pertanian nasional dengan basis rumah tangga usaha pertanian yang sangat besar. Di sisi lain, menghadapi tekanan ekologis berupa penurunan luas panen padi, tingginya jumlah petani gurem, lahan kritis, tekanan pada kawasan hutan, timbulan limbah organik, serta kerentanan rumah tangga tani terhadap fluktuasi iklim dan pasar. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan KWT tidak cukup berhenti pada pelatihan budidaya pekarangan atau pengolahan hasil sederhana. Strategi yang dibutuhkan adalah strategi ekologis: pendekatan yang menghubungkan produksi pangan, konservasi sumber daya, ekonomi rumah tangga, pengurangan limbah, dan penguatan kelembagaan perempuan tani.

Secara kelembagaan, KWT merupakan salah satu bentuk kelembagaan petani yang memberdayakan peran perempuan dalam pembangunan pertanian. Definisi ini penting karena menempatkan KWT bukan sebagai organisasi tambahan yang bersifat seremonial, melainkan sebagai wadah belajar, kerja sama, dan produksi. Perempuan hadir dalam kegiatan produksi, pengolahan pangan, pemeliharaan ternak,

pemasaran lokal, serta pengelolaan pekarangan dan konsumsi rumah tangga.

Namun, tingginya peran perempuan tidak otomatis berarti kuatnya posisi tawar perempuan. Sebagian besar perempuan pekerja pertanian masih berpendidikan dasar. Hal ini tidak boleh dipahami sebagai kelemahan personal, melainkan sebagai pesan kebijakan: model pemberdayaan KWT harus dirancang dengan metode belajar yang aplikatif, kontekstual, dan tidak terlalu administratif. Pelatihan perlu berbentuk demonstrasi, demplot, pendampingan berulang, visualisasi proses, praktik langsung, dan pencatatan sederhana. Dengan cara ini, strategi ekologis dapat menjadi jalan untuk menghubungkan pengetahuan lokal dengan inovasi teknis yang mudah diterapkan.

➤ **Konsep Dasar Strategi Ekologis dalam Pemberdayaan KWT**

Strategi ekologis dalam pemberdayaan KWT dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan kapasitas kelompok melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara hemat, sirkular, dan berkelanjutan. Strategi ini berangkat dari premis bahwa persoalan pertanian kecil tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga dengan relasi antara tanah, air, tanaman, ternak, limbah, hutan, pasar, dan kelembagaan sosial. Dalam kondisi Jawa Timur, premis ini menjadi sangat konkret. Sensus Pertanian 2023 menunjukkan bahwa jumlah RTUP mencapai 5,53 juta rumah tangga. Pada saat yang sama, 82,46% petani pengguna lahan tergolong petani gurem. Ini berarti sebagian besar rumah tangga tani bekerja dalam struktur lahan yang terbatas, sehingga peningkatan kapasitas tidak dapat hanya bertumpu pada perluasan lahan.

Dalam situasi lahan sempit, strategi ekologis menawarkan jalan yang lebih realistis. KWT dapat memperkuat produksi pangan keluarga melalui pekarangan, tabulampot, polybag, vertikultur, tanaman obat keluarga, kebun bibit, dan demplot kelompok. Model seperti KRPL dan P2L relevan karena mengoptimalkan ruang rumah tangga dan komunitas sebagai sumber pangan segar. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa KRPL atau P2L bukan sekadar membagikan bibit, rak tanam, atau polybag. Program tersebut baru bermakna ketika mampu menumbuhkan kebiasaan produksi-konsumsi baru, memperkuat pengetahuan anggota, dan mengurangi sebagian pengeluaran pangan keluarga.

Pendekatan ekologis juga menuntut perubahan cara memandang limbah. Sampah dapur, sisa panen, jerami, daun kering, batang pisang, kotoran sapi, kotoran kambing, dan urine ternak bukan hanya beban lingkungan, melainkan bahan baku ekonomi sirkular. Limbah rumah tangga dapat menjadi kompos atau eco-enzyme; limbah ternak dapat menjadi pupuk kandang, pupuk organik cair, biourine, atau bahan biogas; limbah pertanian dapat menjadi pakan ternak, mulsa, atau bahan kompos. Siklus ini mengurangi ketergantungan pada input eksternal dan membantu menekan biaya produksi rumah tangga tani.

Dalam perspektif sosial, strategi ekologis juga harus menghindari jebakan romantisasi perempuan tani. Banyak program menganggap perempuan “dekat dengan lingkungan”, lalu menambah beban kerja mereka tanpa menghitung nilai ekonominya. Pendekatan yang lebih adil adalah menjadikan kerja ekologis KWT sebagai kerja produktif yang terukur: ada catatan volume produksi, catatan penghematan belanja, catatan penjualan, pembagian tugas, dan akumulasi kas kelompok. Tanpa pengakuan ekonomi dan

kelembagaan, kegiatan ekologis mudah berubah menjadi kerja sukarela yang melelahkan.

Karena itu, strategi ekologis harus diletakkan pada tiga pilar. Pertama, pilar produksi pangan, yakni peningkatan ketersediaan pangan rumah tangga melalui pekarangan, hortikultura, tanaman obat, dan diversifikasi pangan lokal. Kedua, pilar pemulihan ekologis, yakni konservasi tanah-air, pengomposan, penghijauan, agroforestri, dan perlindungan sumber air. Ketiga, pilar ekonomi kolektif, yakni penciptaan nilai tambah dari produk pangan, pupuk organik, bibit, olahan herbal, serta produk berbasis hutan bukan kayu. Ketiga pilar ini perlu berjalan bersama agar KWT tidak hanya menjadi kelompok tanam, tetapi menjadi organisasi sosial-ekologis desa.

➤ **Pemetaan Potensi Ekologis dan Sosial KWT**

Strategi ekologis yang baik selalu dimulai dari pemetaan. Kesalahan umum dalam pemberdayaan adalah menerapkan paket teknologi yang seragam untuk semua desa. Padahal, Jawa Timur memiliki ragam agroekologi yang luas: kawasan sawah irigasi di lumbung padi, wilayah hortikultura dataran tinggi, kawasan tebu dan perkebunan, desa peternakan sapi perah, kawasan hutan rakyat, wilayah pesisir, hingga desa penyangga hutan. Setiap kawasan membutuhkan desain pemberdayaan yang berbeda.

Pemetaan ekologis pada KWT perlu mencakup luas dan kondisi pekarangan, ketersediaan air, jenis tanah, kemiringan lahan, sumber limbah organik, keberadaan ternak, akses terhadap lahan desa, lokasi rawan erosi, keberadaan mata air, dan hubungan desa dengan kawasan hutan. Di desa dengan banyak ternak, misalnya, agenda awal yang logis adalah pengolahan kotoran ternak menjadi pupuk organik. Di desa

hortikultura, prioritas dapat diarahkan pada pengurangan limbah sayuran dan pengolahan produk. Di desa penyangga hutan, agenda strategisnya adalah agroforestri, pembibitan tanaman tahunan, perlindungan sumber air, serta usaha hasil hutan bukan kayu.

Pemetaan sosial juga menentukan keberhasilan. KWT perlu mengetahui jumlah anggota aktif, usia anggota, keterampilan yang sudah dimiliki, kemampuan membaca-menulis administrasi, akses digital, pengalaman menjual produk, pola kepemimpinan, dukungan keluarga, serta hubungan dengan penyuluh, pemerintah desa, BUMDes, PKK, dan pasar lokal. Data perempuan pekerja pertanian di Jawa Timur menunjukkan bahwa mayoritas masih berpendidikan dasar. Artinya, instrumen pemetaan harus sederhana: diskusi kelompok, peta desa, daftar aset, kalender musim, peta aliran limbah, peta pasar, dan kartu masalah-prioritas.

Dalam konteks jumlah kelembagaan, data terbuka mengenai total KWT Jawa Timur masih belum tersaji secara seragam dalam satu portal provinsi. Namun, rujukan sekunder yang mengutip Data Dinas Pertanian Jatim 2025 mencatat 5.624 KWT pada beberapa kabupaten/kota yang ditampilkan, dengan jumlah besar antara lain di Banyuwangi, Jember, Malang, Lamongan, Bojonegoro, dan Tuban. Angka ini tidak boleh dibaca sebagai total final seluruh provinsi, tetapi cukup memberi sinyal bahwa KWT memiliki basis kelembagaan yang luas dan potensial untuk dikembangkan sebagai jaringan pemberdayaan ekologis.

Pemetaan yang partisipatif dapat dilakukan melalui “peta sumber daya KWT”. Anggota menggambar lokasi rumah, pekarangan produktif, kandang ternak, sumber air, tempat pembuangan sampah, lahan kosong, demplot, jalur pemasaran, dan lokasi rawan erosi. Dari peta tersebut,

kelompok menentukan prioritas yang paling mungkin dilakukan. Jika pekarangan sempit, vertikultur dan tabulampot lebih rasional. Jika ada kotoran ternak melimpah, rumah kompos menjadi prioritas. Jika desa berada di lereng, terasering, rorak, tanaman penguat teras, dan penghijauan harus didahulukan. Jika desa dekat hutan, agroforestri dan hasil hutan bukan kayu menjadi pintu masuk.

Pemetaan seperti ini penting karena kapasitas KWT tidak dapat dibangun hanya dengan menambah pengetahuan teknis. Kapasitas dibangun ketika kelompok mampu membaca masalahnya sendiri, memilih teknologi yang sesuai, mengatur kerja kolektif, dan mengevaluasi hasil. Dengan demikian, pemetaan menjadi ruang belajar politik-ekologis: anggota KWT memahami bahwa persoalan pangan, limbah, tanah, air, dan pendapatan bukan hal yang terpisah.

➤ **Penguatan Kapasitas Teknis Berbasis Pertanian Ramah Lingkungan**

Penguatan teknis KWT di Jawa Timur perlu diarahkan pada teknologi yang rendah biaya, mudah dipelajari, dan dapat menghasilkan manfaat cepat tanpa mengabaikan manfaat jangka panjang. Empat kelompok teknologi dapat dijadikan prioritas: pekarangan pangan, pengelolaan limbah organik, integrasi pertanian-peternakan, serta konservasi tanah dan air.

Pertama, pekarangan pangan. Penurunan luas panen padi dan produksi beras pada 2024 memberi pesan bahwa ketahanan pangan rumah tangga tidak boleh hanya bergantung pada beras. KWT dapat mengembangkan pekarangan dengan pola berlapis. Lapisan bawah berisi bayam, kangkung, sawi, selada, dan seledri. Lapisan tengah berisi cabai, tomat, terong, jahe, kunyit, kencur, serai, dan lengkuas. Lapisan atas berisi kelor, pepaya, pisang, jambu, jeruk, atau alpukat. Model ini

dapat dikembangkan dalam polybag, bedengan kecil, rak vertikutur, hidroponik sederhana, dan tabulampot. Hasilnya tidak selalu besar dalam ukuran pasar, tetapi penting untuk memperbaiki akses pangan segar dan mengurangi belanja harian.

Kedua, pengelolaan sampah organik menjadi kompos dan eco-enzyme. Eco-enzyme dapat dijadikan media edukasi pemilahan sampah organik karena bahan bakunya mudah: kulit buah, sisa sayuran, gula merah atau molase, dan air. Namun, klaim penggunaannya harus proporsional. Eco-enzyme tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti semua pupuk atau pestisida. Ia lebih tepat ditempatkan sebagai produk fermentasi rumah tangga yang dapat membantu mengurangi sampah, menjadi cairan pembersih alami, atau input pendukung yang perlu diuji pada skala kecil. Kompos tetap menjadi teknologi utama karena manfaatnya lebih jelas bagi perbaikan struktur tanah dan penyediaan bahan organik.

Ketiga, integrasi pertanian dan peternakan. Populasi sapi potong, sapi perah, kambing, dan domba di Jawa Timur memberikan peluang besar untuk model ekonomi sirkular desa. Kotoran ternak dapat diolah menjadi pupuk kandang matang, kompos, pupuk organik cair, atau biourine. Sebaliknya, limbah pertanian seperti jerami, tebon jagung, batang pisang, daun kacang tanah, dan limbah sayuran dapat dijadikan pakan melalui pencacahan, pengeringan, atau fermentasi. Dalam desain KWT, kegiatan ini dapat dibagi: sebagian anggota mengelola rumah kompos, sebagian mengelola kebun pakan, sebagian mengurus demplot sayuran, dan sebagian mencatat produksi serta penjualan Tabel 4.

Tabel 4. Data produksi/potensi sumber daya dengan model ekonomi ekologis KWT

Komoditas/ potensi	Angka kunci	Sumber	Relevansi
Bawang merah	4.766.656 kuintal	BPS Jatim, 2024	Potensi olahan bumbu, pengeringan, dan rantai pasok dapur rumah tangga.
Populasi sapi perah	297.927 ekor	BPS, 2024	Potensi pupuk kandang, biourine, biogas, dan integrasi tanaman pakan.
Populasi sapi potong	3.617.392 ekor	BPS, 2024	Potensi besar pengelolaan limbah ternak untuk kompos dan pupuk organik.
Komoditas/ potensi	Angka kunci	Sumber	Relevansi
Populasi kambing	4.527.508 ekor	BPS, 2024	Pupuk kandang kambing dapat menjadi input pekarangan dan tanaman hortikultura.

Populasi domba	1.373.466 ekor	BPS, 2024	Integrasi pakan dari limbah pertanian dan rumput konservasi tanah.
Produksi kayu/hutan rakyat	Data spasial Dishut menyebut luas aktual hutan rakyat diperkirakan +739.156,93 ha dengan produksi 3.102.302,8181 m ³	Dishut Jatim, data spasial kehutanan	Agroforestri dan hutan rakyat dapat menjadi ruang ekonomi ekologis, sepanjang fungsi tutupan vegetasi dijaga.

Keempat, konservasi tanah dan air. Pada lahan miring, kegiatan KWT perlu melampaui budidaya sayuran dan masuk ke praktik konservasi: terasering sederhana, rorak, biopori, guludan kontur, mulsa organik, saluran air, tanaman penguat teras, dan penghijauan. Tanaman seperti vetiver, rumput gajah, gamal, lamtoro, kaliandra, dadap, alpukat, nangka, durian, petai, dan tanaman buah lokal dapat dipilih sesuai kondisi lahan. Terasering tidak hanya mempercantik lanskap, tetapi mengurangi kecepatan aliran permukaan dan menahan tanah. Jika KWT mengelola kebun bibit desa, maka konservasi dapat berjalan sebagai kegiatan ekonomi sekaligus ekologis.

Kasus “KWT Rumah Kompos dan Kebun Pangan” dapat menjadi model. Setiap anggota menyeter sampah dapur dan daun kering. Kelompok mengolahnya menjadi kompos di rumah kompos sederhana. Kompos digunakan untuk demplot sayuran dan sebagian dikemas dalam ukuran kecil untuk dijual. Sayuran dikonsumsi anggota dan dijual ke warga atau kantin sekolah. Kelompok mencatat jumlah sampah yang diolah, jumlah kompos yang dihasilkan, volume panen, nilai penjualan, dan penghematan belanja sayur. Model ini sederhana, tetapi memiliki logika pemberdayaan yang kuat karena menghubungkan sampah, pangan, tanah, dan pendapatan.

Kasus lain adalah “KWT Integrasi Ternak-Pekarangan”. Pada desa dengan populasi kambing atau sapi, anggota KWT dilatih membuat pupuk kandang matang, fermentasi pakan dari limbah pertanian, dan kebun rumput konservasi. Kotoran ternak kembali ke pekarangan dan demplot; limbah tanaman kembali menjadi pakan; hasil sayur dan ternak memberi pemasukan. Integrasi semacam ini lebih kuat daripada program tunggal karena ia membangun siklus sumber daya, bukan sekadar aktivitas produksi sesaat.

➤ **Penguatan Kelembagaan, Kepemimpinan, dan Aksi Kolektif KWT**

Teknologi ekologis tidak akan bertahan tanpa kelembagaan. Banyak program pekarangan, kompos, atau demplot gagal bukan karena teknologinya tidak berguna, tetapi karena kelompok tidak memiliki jadwal kerja, pembagian peran, pencatatan keuangan, atau mekanisme pembagian hasil. Karena itu, strategi ekologis harus selalu disertai penguatan organisasi KWT.

Kelompok Wanita Tani perlu memiliki struktur kerja yang tidak hanya administratif. Selain ketua, sekretaris, dan bendahara, kelompok dapat membentuk koordinator pembibitan, koordinator kompos, koordinator pemasaran, koordinator pengolahan pangan, dan koordinator konservasi. Pembagian ini membuat kegiatan tidak bertumpu pada satu orang. Dalam kelompok yang sehat, kepemimpinan bersifat tersebar. Ada anggota yang kuat secara teknis, ada yang pandai mengajak warga, ada yang rapi mencatat, dan ada yang mampu menjual produk. Semua jenis kepemimpinan ini perlu dihargai.

Aksi kolektif menjadi penting karena banyak kegiatan ekologis lebih efisien jika dilakukan bersama. Rumah kompos membutuhkan pasokan bahan baku dari banyak anggota. Kebun bibit desa membutuhkan perawatan rutin. Pemasaran sayur lebih kuat jika volume dikumpulkan. Konservasi mata air tidak dapat dilakukan oleh satu rumah tangga. Penghijauan desa memerlukan kerja bersama, aturan, dan pemantauan tanaman hidup. Karena itu, KWT perlu menyusun aturan sederhana: jadwal piket, iuran, sistem pemanfaatan kompos, pembagian hasil, penggunaan kas, dan sanksi ringan jika anggota tidak menjalankan tugas.

Dalam wilayah hutan dan penyangga hutan, kelembagaan menjadi lebih penting. Jawa Timur memiliki kawasan hutan negara sekitar 1,36 juta ha dan akses perhutanan sosial sekitar 202 ribu ha. Angka ini membuka peluang penguatan KWT melalui agroforestri, pembibitan tanaman tahunan, empon-empon, madu, kopi naungan, tanaman obat, dan olahan hasil hutan bukan kayu. Namun, peluang ini juga membawa risiko: jika ekonomi lebih dominan daripada ekologi, pemanfaatan hutan dapat berubah menjadi pembukaan lahan yang merusak. Karena itu, KWT di kawasan

hutan perlu terlibat dalam aturan kolektif: menjaga tutupan pohon, melindungi mata air, tidak membakar lahan, tidak menanam tanaman semusim secara monokultur di lereng curam, serta menanam tanaman tahunan yang memperkuat fungsi hutan.

Kasus “KWT Agroforestri Kopi dan Empon-Empon” dapat diterapkan di desa penyangga hutan. Kelompok menyiapkan bibit tanaman naungan, menanam jahe dan kunyit di bawah tegakan, mengolah kopi menjadi produk kemasan, serta membuat minuman herbal. KWT juga menyusun aturan lokal agar anggota tidak membuka tutupan pohon baru. Dalam model ini, perempuan tani tidak hanya menjadi tenaga pengolah, tetapi juga penjaga ekologi lanskap. Mereka menghubungkan ekonomi keluarga dengan konservasi hutan.

Penguatan kelembagaan juga harus mencakup literasi data. KWT perlu mencatat volume kompos, jumlah bibit, jumlah pohon hidup, biaya produksi, hasil penjualan, jumlah anggota aktif, serta perubahan pengeluaran rumah tangga untuk sayur dan bumbu. Data sederhana ini berguna untuk mengevaluasi kegiatan, menyusun proposal, membangun kepercayaan mitra, dan menunjukkan kontribusi KWT terhadap desa. Tanpa data, kerja ekologis sering tidak terlihat dan mudah diremehkan.

➤ **Strategi Ekonomi Ekologis: Nilai Tambah, Pemasaran, dan Keberlanjutan Program**

Strategi ekologis harus menghasilkan manfaat ekonomi yang cukup agar bertahan. Namun, ekonomi ekologis berbeda dari ekonomi ekstraktif. Ekonomi ekstraktif mengejar keuntungan jangka pendek dengan menguras tanah, air, dan hutan. Ekonomi ekologis menghasilkan nilai tambah dengan menjaga kapasitas ekosistem. Bagi KWT Jawa Timur, ekonomi ekologis

dapat berbentuk produk pangan lokal, pupuk organik, bibit tanaman, olahan herbal, produk agroforestri, jasa edukasi, dan paket wisata pekarangan atau kebun (Tabel 4).

Komoditas hortikultura Jawa Timur memberi peluang besar. Produksi bawang merah yang mencapai 4,77 juta kuintal dapat dikaitkan dengan pengolahan bumbu, bawang goreng, sambal, dan produk dapur lokal. Pekarangan KWT dapat menghasilkan cabai, tomat, daun bawang, kunyit, jahe, kencur, serai, kelor, dan bunga telang. Produk tersebut dapat diolah menjadi sambal, minuman herbal, teh kelor, serbuk jahe, jamu instan, atau paket sayur sehat. Narasi produknya kuat: lokal, diproduksi perempuan tani, memanfaatkan pekarangan, mengurangi sampah organik, dan mendukung pangan keluarga.

Produk ekologis lain adalah pupuk organik dan media tanam. Dengan populasi ternak yang besar, Jawa Timur memiliki bahan baku pupuk kandang yang melimpah. KWT dapat memproduksi kompos kemasan kecil untuk rumah tangga, sekolah, penghobi tanaman, dan urban farming. Namun, kualitas harus dijaga. Kompos harus matang, tidak berbau menyengat, tidak panas, tidak terlalu basah, dan dikemas dengan informasi penggunaan. Jika kualitas buruk, kepercayaan pasar hilang. Oleh karena itu, pelatihan mutu sederhana sama pentingnya dengan pelatihan produksi.

Pada kawasan hutan, ekonomi ekologis dapat dikembangkan melalui agroforestri dan hasil hutan bukan kayu. KWT dapat mengolah kopi agroforestri, jahe, kunyit, madu, pisang, buah lokal, atau tanaman obat. Namun, klaim “pemanfaatan hutan untuk pertanian” harus dijaga agar tidak menjadi pembenaran pembukaan hutan. Model yang benar adalah pertanian di bawah tegakan, tanaman sela yang tidak merusak pohon, pembibitan tanaman konservasi, dan

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Ekonomi berjalan, tetapi tutupan pohon, mata air, dan fungsi ekologis tetap dijaga.

Pemasaran KWT dapat dilakukan bertahap. Tahap pertama adalah pasar lokal: tetangga, pasar desa, warung, sekolah, kantor desa, dan kegiatan PKK. Tahap kedua adalah pasar kelembagaan: BUMDes, koperasi, katering lokal, hotel, restoran, dan program pangan desa. Tahap ketiga adalah pasar digital: WhatsApp Business, katalog digital, Instagram, TikTok, dan marketplace lokal. Tidak semua KWT harus langsung masuk marketplace besar. Yang lebih penting adalah konsistensi pasokan, kualitas produk, foto yang jelas, harga yang rapi, nomor kontak, dan testimoni.

Keberlanjutan program perlu diukur melalui indikator yang sederhana tetapi tajam. Indikator ekologis mencakup jumlah sampah organik yang diolah, volume kompos, jumlah pohon hidup, luas pekarangan produktif, jumlah lubang biopori atau rorak, dan pengurangan pupuk kimia. Indikator ekonomi mencakup penghematan belanja sayur, pendapatan kelompok, margin produk, pertumbuhan kas, dan jumlah pelanggan. Indikator sosial mencakup keaktifan anggota, jumlah pelatihan, regenerasi anggota muda, rapat kelompok, dan kemitraan. Indikator kelembagaan mencakup buku kas, daftar aset, SOP produksi, pembagian tugas, dan rencana kerja tahunan.

Tabel 5. Matriks strategi ekologis KWT Jawa Timur dan indikator capaian

Strategi	Bentuk kegiatan	Produk/manfaat	Indikator capaian
Pekarangan pangan/ KRPL-P2L	Polybag, tabulampot vertikultur,	Sayur, bumbu, tanaman obat, bibit	Luas pekarangan produktif; jumlah panen;

	TOGA, kebun bibit		penghematan belanja pangan
Strategi	Bentuk kegiatan	Produk/manfaat	Indikator capaian
Eco-enzyme dan kompos	Pemilahan sampah, fermentasi, komposter, rumah kompos	Kompos, cairan fermentasi, media tanam	Kg sampah terolah; kg kompos; jumlah anggota memilah sampah
Limbah ternak menjadi pupuk	Pupuk kandang matang, biourine, POC, biogas kecil	Pupuk organik, slurry, biourine	Volume pupuk; biaya pupuk yang dihemat; penjualan pupuk
Limbah pertanian untuk pakan	Fermentasi jerami, pencacahan tebon jagung, silase sederhana	Pakan alternatif	Kg pakan dibuat; penurunan biaya pakan; kesehatan ternak
Konservasi tanah dan air	Terasering, rorak, biopori, mulsa, guludan kontur	Lahan lebih stabil, air tersimpan	Jumlah rorak/biopori; tanaman penguat teras; area rawan erosi tertangani

Agroforestri/ perhutanan sosial	Kopi naungan, empon- empon, tanaman buah, tanaman konservasi	Kopi, herbal, buah, bibit, HHBK	Jumlah pohon hidup; produk HHBK; aturan perlindungan hutan
Penghijauan desa	Kebun bibit, penanaman sempadan, tanaman peneduh	Bibit, jasa edukasi, ruang hijau	Jumlah bibit ditanam; survival rate; lokasi hijau baru

Penguatan kapasitas KWT di Jawa Timur melalui strategi ekologis harus dipahami sebagai agenda pembangunan yang melampaui kegiatan teknis. Data statistik menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki basis rumah tangga pertanian yang sangat besar, dominasi petani gurem, jutaan perempuan yang bekerja di sektor pertanian, produksi pangan yang penting secara nasional, populasi ternak besar, kawasan hutan luas, dan tantangan lahan kritis. Semua data tersebut mengarah pada satu kesimpulan: KWT dapat menjadi simpul strategis untuk membangun pertanian desa yang lebih sirkular, hemat sumber daya, dan berkeadilan gender.

Namun, strategi ini hanya berhasil jika tidak diperlakukan sebagai proyek sesaat. Bantuan bibit, polybag, komposter, atau alat pengolahan tidak otomatis menciptakan kemandirian. Yang lebih penting adalah kemampuan kelompok untuk memetakan sumber daya, memilih teknologi yang sesuai, membagi kerja, mencatat hasil, mengelola kas, menjaga mutu produk, membangun pasar, dan mengevaluasi dampak ekologis. Di sinilah kapasitas KWT harus diperkuat:

dari kelompok penerima program menjadi organisasi sosial-ekologis yang mampu membaca, mengelola, dan memperbaiki lingkungannya sendiri.

Kasus KRPL/P2L, eco-enzyme, rumah kompos, integrasi pertanian-peternakan, agroforestri, konservasi tanah-air, terasering, penghijauan, dan perhutanan sosial menunjukkan bahwa strategi ekologis bukan ide abstrak. Ia dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari KWT. Tantangannya adalah memastikan agar kegiatan tersebut menghasilkan manfaat nyata, tidak menambah beban perempuan secara tidak adil, dan tidak mengorbankan fungsi ekologis. Dengan desain yang tepat, KWT dapat menjadi aktor penting dalam ketahanan pangan, ekonomi lokal, pengurangan limbah, pemulihan lahan, dan penjagaan ekosistem hutan Jawa Timur.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI MELALUI PENYULUHAN DIGITAL

Kelompok Wanita Tani (KWT) bukan sekadar wadah berkumpul bagi perempuan petani. Ia adalah ruang di mana pengalaman sehari-hari di sawah dan ladang bertemu dengan pengetahuan bersama, kepercayaan antaranggota tumbuh, dan kekuatan kolektif perlahan-lahan dibangun. Sebagai unit kelembagaan primer dalam sistem pertanian Indonesia, KWT menyimpan modal sosial yang sangat berharga dan dalam era digital ini, modal itulah yang menjadi kunci terpenting dalam proses adopsi inovasi teknologi (Purwanto et al., 2025; Widianarko et al., 2025). Memahami karakteristik dan tantangan digitalisasi KWT karena itu bukan semata soal teknologi, melainkan soal manusia, relasi, dan kelembagaan.

Profil dan Kontribusi Wanita Tani dalam Sistem Pertanian Indonesia

Indonesia mencatat lebih dari 29,3 juta rumah tangga pertanian (BPS, 2023). Secara global, perempuan menyumbang 60–80% produksi pangan di negara berkembang (FAO, 2011), dan di Indonesia keterlibatan mereka menjangkau seluruh rantai nilai dari pengolahan lahan, penanaman, panen, pengolahan pascapanen, hingga pemasaran. Namun kontribusi yang besar ini tidak berbanding lurus dengan akses yang mereka peroleh atas sumber daya produktif.

Paradoks gender dalam pertanian Indonesia terdokumentasi secara empiris dan sangat nyata. Perempuan petani hanya menguasai kurang dari 20% kepemilikan lahan dan memiliki akses jauh lebih terbatas terhadap layanan penyuluhan, kredit, dan teknologi dibanding petani laki-laki (FAO, 2011; World Bank, 2022). Mazyza (2026) mendokumentasikan kasus yang mengejutkan: seluruh perempuan petani nilam di Sulawesi terlibat aktif dalam budidaya, namun hanya 15,7% di antara mereka yang berpartisipasi dalam keputusan strategis usaha tani. Mursyidin et al. (2024) menemukan pola serupa pada petani kopi Aceh, sementara Tri Martial et al. (2025) mengonfirmasi bahwa sistem adat patrilineal di Sumatera Utara secara struktural mengeksklusi perempuan dari kepemilikan lahan.

FAO (2011) memperkirakan bahwa apabila perempuan petani mendapat akses setara atas sumber daya produktif, produksi pertanian global dapat meningkat 20–30%, berpotensi mengurangi 100–150 juta jiwa yang kekurangan pangan. Angka ini menegaskan bahwa ketimpangan gender dalam pertanian bukan sekadar persoalan keadilan sosial tetapi hambatan nyata terhadap ketahanan pangan nasional.

Karakteristik Akses Digital Wanita Tani

Perkembangan infrastruktur digital Indonesia membuka peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Data BPS (2025) yang dikutip Rondonuwu et al. (2026) menunjukkan 80,67% penduduk Indonesia kini pengguna internet aktif. Di kalangan petani, 54,4% di Jawa Timur sudah memiliki ponsel (Fatahullah & Firmanda, 2025). Angka ini menggembirakan namun menyembunyikan kesenjangan yang perlu dicermati.

Kepemilikan smartphone di kalangan perempuan petani (31%) masih lebih rendah dibanding laki-laki (38%). Selisih tujuh poin persentase ini bukan sekadar angka statistik ia mencerminkan ketimpangan ekonomi, akses informasi, dan relasi kuasa dalam rumah tangga petani (Fatahullah & Firmanda, 2025).

Tabel 6. Karakteristik Akses Digital Wanita Tani dibanding Petani Laki-laki di Indonesia

Indikator Akses Digital	Perempuan Petani	Laki-laki Petani
Kepemilikan smartphone	31%	38%
Penggunaan internet aktif	Lebih rendah	Lebih tinggi
Akses layanan penyuluhan digital	Terbatas	Lebih mudah
Partisipasi keputusan adopsi teknologi	15,7% (Mazya, 2026)	Dominan
Akses kepemilikan lahan	< 20%	> 80%

Sumber: Sintesis dari Fatahullah & Firmanda (2025), Mazya (2026), FAO (2011), World Bank (2022), BPS (2023; 2025).

Dilihat dari Tabel 6perbandingan karakteristik akses digital berdasarkan gender, yang menarik justru pada keterbatasan itulah KWT menunjukkan kekuatannya. Widianarko et al. (2025) kelompok yang solid mampu menjadi

jembatan: anggota yang lebih melek digital secara organik membantu yang lain dalam proses belajar bersama. Proses ini berlangsung secara alamiah, dalam bahasa yang dipahami bersama, tanpa perlu menunggu program formal dari luar.

Tantangan Struktural Digitalisasi KWT

Hambatan adopsi teknologi digital oleh wanita tani bukan sekadar soal kurang pelatihan, tetapi bersifat struktural dan saling mengunci. Identifikasi delapan hambatan utama yang disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hambatan Adopsi Penyuluhan Digital bagi Wanita Tani

No.	Hambatan	Frekuensi (n=18)	Sumber Utama
1	Literasi digital rendah	12 artikel	Saridewi & Annisa, 2025; Patria, 2025
2	Infrastruktur internet tidak merata	11 artikel	Fatahullah & Firmanda, 2025
3	Kesenjangan gender akses perangkat	10 artikel	Fatahullah & Firmanda, 2025; FAO, 2011
4	Dominasi patriarki pengambilan keputusan	9 artikel	Mazya, 2026; Mursyidin et al., 2024

No.	Hambatan	Frekuensi (n=18)	Sumber Utama
5	Beban ganda (domestik + pertanian)	7 artikel	Zaetun et al., 2026; Tri Martial et al., 2025
6	Biaya perangkat dan kuota internet	7 artikel	Qamara & Widiarta, 2026
7	Konten penyuluhan tidak responsif gender	6 artikel	Pratama et al., 2026
8	Jadwal pelatihan tidak fleksibel	5 artikel	Kurniasari & Soedarto, 2026

Frekuensi= jumlah dari 18 artikel yang mengidentifikasi hambatan tersebut.

Berdasarkan tabel 7 tiga hambatan pertama yaitu literasi digital rendah, infrastruktur internet tidak merata, dan kesenjangan akses perangkat yang membentuk siklus yang mengunci diri. Perempuan tanpa perangkat tidak dapat berlatih; tanpa latihan, literasi tidak berkembang; tanpa literasi, program penyuluhan digital tidak memberikan manfaat apa pun. Siklus ini hanya dapat diputus melalui intervensi simultan di ketiga titik sekaligus.

Di balik hambatan teknis tersebut, ada hambatan yang lebih halus namun sama destruktifnya: dominasi patriarki dalam pengambilan keputusan. Mazyra (2026) dan Mursyidin et

al. (2024) perempuan aktif di level operasional tetapi marjinal dalam keputusan strategis. Bahkan ketika seorang wanita tani memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengadopsi teknologi, keputusannya sering kali bergantung pada persetujuan suami atau kepala keluarga laki-laki.

Beban ganda yang ditanggung wanita tani sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja pertanian juga membatasi waktu yang tersedia untuk pelatihan. Situasi ini diperparah oleh program penyuluhan yang belum banyak dirancang secara responsif gender: jadwal yang tidak mempertimbangkan beban domestik, konten yang tidak relevan dengan kebutuhan nyata perempuan petani, dan metode yang tidak mengakomodasi keberagaman usia serta tingkat literasi anggota KWT.

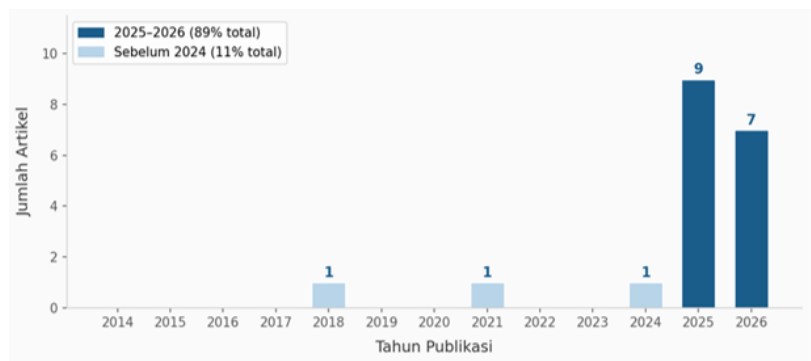
➤ **Proses Penyuluhan Digital melalui Pendekatan Humanis**

Penyuluhan pertanian, dalam pengertian terbaiknya, adalah sebuah percakapan antara penyuluh dan petani, antara pengetahuan ilmiah dan kearifan lokal, antara apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang benar-benar mungkin dalam kehidupan sehari-hari seorang petani. Ketika percakapan itu bermigrasi ke ranah digital, tantangannya bukan hanya teknis. Ia adalah soal mempertahankan kehangatan, relevansi, dan rasa saling percaya yang membuat penyuluhan benar-benar bekerja.

Perkembangan dan Tren Penyuluhan Digital di Indonesia

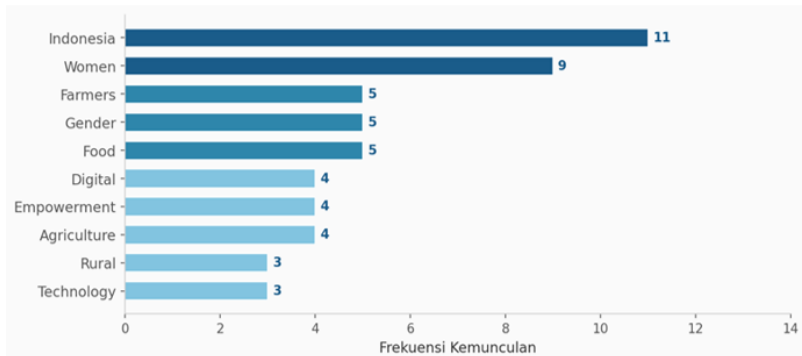
Tren penyuluhan mengonfirmasi akselerasi yang sangat tajam. Dari analisis bibliometrik terhadap literatur 2014–2026, 89% dari total publikasi yang relevan diterbitkan pada periode 2025–2026, sementara hanya 11% berasal dari sebelum 2024. Akselerasi ini konsisten dengan intensifikasi global agenda

digitalisasi pertanian pascapandemi COVID-19, di mana interaksi tatap muka yang terbatas memaksa percepatan adopsi medium digital dalam penyuluhan (Gambar 3).



Gambar 3. Distribusi Publikasi per Tahun: Penyuluhan Digital dan Pemberdayaan Wanita Tani di Indonesia (2014–2026)

Analisis kata kunci bibliometrik mengungkap bahwa tema yang mendominasi adalah interseksi tiga isu besar: gender, digital, dan pertanian-keberlanjutan. Lima kata kunci paling dominan adalah 'Indonesia' (frekuensi 11), 'women' (9), 'farmers' (5), 'gender' (5), dan 'food' (5). Konvergensi ini menunjukkan bahwa peneliti Indonesia semakin tidak dapat memisahkan soal digitalisasi pertanian dari dimensi gendernya sebuah kemajuan konseptual yang penting (Gambar 4).



Gambar 4. Kata Kunci Dominan dalam Literatur Penyuluhan Digital-Gender Pertanian Indonesia (2024–2026)

Platform Digital dan Cara Kerjanya dalam Penyuluhan KWT
 Sebelum merancang program penyuluhan digital untuk KWT, satu pertanyaan sederhana perlu dijawab: aplikasi apa yang sesungguhnya mereka gunakan? Jawabannya jelas: WhatsApp. Platform pesan instan ini disebut dalam 9 dari 18 artikel yang dikaji menjadikannya *platform de facto* penyuluhan digital bagi wanita tani Indonesia (Tabel 8).

Tabel 8. Platform Digital dalam Penyuluhan Pertanian dan Pemberdayaan KWT Indonesia

Platform	Frekuensi	Peran Utama dalam Penyuluhan KWT
WhatsApp	9	Koordinasi internal, diseminasi informasi, pemasaran, jaringan
YouTube	5	Video demonstrasi teknik budidaya dan pengolahan pascapanen

Platform	Frekuensi	Peran Utama dalam Penyuluhan KWT
Facebook	4	Komunitas petani, berbagi pengalaman dan harga pasar
TikTok	3	Konten edukasi singkat untuk wanita tani muda
Telegram	2	Grup penyuluhan berkas dokumen dan materi pelatihan
Cyber Extension	1	Platform resmi pemerintah (belum merata di KWT)
My Agri / iTani	1	Aplikasi pertanian resmi pemerintah (adopsi rendah)

Dominasi WhatsApp bukan kebetulan. Platform ini memiliki sejumlah keunggulan humanis yang membuatnya menjadi pilihan organik wanita tani: antarmuka percakapan yang intuitif, dukungan pesan suara bagi yang memiliki hambatan literasi teks, kemampuan berbagi foto dan video demonstrasi teknik pertanian, serta fitur group chat yang secara struktural menyerupai pertemuan KWT yang sudah terbiasa dilakukan (Patria, 2025).

Dalam praktiknya, WhatsApp melayani empat fungsi utama: koordinasi internal KWT, diseminasi informasi pertanian oleh penyuluh lapangan, pemasaran produk hasil pertanian kepada konsumen yang lebih luas, dan membangun jaringan antarpelaku dari sesama petani hingga pembeli potensial (Zaetun et al., 2026; Bachtiar et al., 2024; Purwanto et al., 2025). Sementara itu, platform penyuluhan resmi pemerintah seperti *Cyber Extension*, *My Agri*, dan *iTani* sebuah

sinyal keras bahwa ada jarak besar antara apa yang dirancang untuk petani perempuan dan apa yang sesungguhnya mereka gunakan sehari-hari.

Dimensi Humanis dalam Proses Penyuluhan Digital

Teknologi hanyalah alat. Yang menentukan keberhasilan penyuluhan digital bukan canggihnya platform yang digunakan, melainkan kualitas relasi manusia yang dibangunnya. Tiga dimensi humanis muncul sebagai kunci efektivitas penyuluhan digital bagi wanita tani.

a. Kepercayaan sebagai Fondasi Adopsi

Winarti et al. (2025), 350 perempuan petani di Kalimantan Tengah menggunakan PLS-SEM, menemukan bahwa kepercayaan terhadap teknologi (*trust in technology*) memoderasi secara signifikan hubungan antara literasi digital dan resiliensi pertanian ($\beta=0,176$). Artinya, meningkatkan kemampuan teknis saja tidak cukup tanpa rasa percaya bahwa teknologi itu bisa diandalkan dan aman digunakan, pengetahuan tidak akan mengubah perilaku. Program penyuluhan yang hanya berfokus pada keterampilan teknis tanpa membangun kepercayaan diri dan efikasi diri petani perempuan cenderung gagal menghasilkan perubahan yang bertahan lama.

b. Pendidikan Non-formal sebagai Jembatan Digital

Zaetun et al. (2026) mendokumentasikan sebuah transformasi yang luar biasa. Program pendidikan non-formal yang dirancang secara partisipatif berhasil meningkatkan kepercayaan diri anggota KWT dari skala rata-rata 1–3 menjadi 8–9,5 dalam skala 10 poin. Dari kepercayaan diri yang tumbuh itulah, adopsi teknologi digital mengikuti secara alamiah, anggota yang lebih percaya diri lebih berani mencoba platform baru dan lebih

aktif berbagi informasi dalam grup. Kuncinya adalah suasana belajar yang aman dan tidak menghakimi, materi yang dikaitkan langsung dengan praktik pertanian nyata, serta pengakuan tulus terhadap pengetahuan lokal yang sudah mereka miliki.

c. Modal Sosial KWT sebagai Katalis Kolektif

Purwanto et al. (2025) dan Widianarko et al. (2025) kekuatan modal sosial dalam KWT kepercayaan antaranggota, jaringan yang solid, dan norma gotong-royong, bekerja sebagai katalis yang mempercepat dan memperluas adopsi digital. Anggota yang lebih mahir secara digital menjadi guru bagi yang lain, bukan karena diperintahkan, melainkan karena relasi kepercayaan itu sudah terjalin sebelumnya. Pembelajaran antarsesama ini jauh lebih efektif dari pelatihan formal satu arah: berlangsung dalam bahasa yang dipahami bersama, konteks yang akrab, dan relasi yang penuh kepercayaan.

Proses penyuluhan digital melalui pendekatan humanis pada akhirnya adalah sebuah perjalanan kolektif dari ketidakpercayaan menuju kepercayaan diri digital. Perjalanan ini tidak bersifat linear dan tidak sama bagi setiap kelompok. Ia memerlukan penyuluh yang memahami konteks sosial-budaya setempat, platform yang tidak mengintimidasi, konten yang relevan dengan kebutuhan nyata, serta KWT yang solid sebagai wadah belajar bersama.

➤ **Model Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Berbasis Digital**

Pemberdayaan KWT berbasis digital tidak terjadi secara spontan dari sekadar kehadiran teknologi. Ia membutuhkan kerangka konseptual yang jelas sebuah model yang menunjukkan bagaimana penyuluhan digital sebagai

intervensi terhubung dengan peningkatan kapasitas perempuan dan pada akhirnya menghasilkan perbaikan nyata dalam kesejahteraan rumah tangga petani.

Kerangka Pemberdayaan yang Telah Digunakan

Literatur tentang pemberdayaan wanita tani Indonesia menggunakan beragam kerangka analitis. Tabel 9 merangkum enam kerangka utama yang teridentifikasi.

Tabel 9. Kerangka dan Model Pemberdayaan dalam Literatur KWT Indonesia

Kerangka / Model	Digunakan oleh	Titik Berat Analitis
WEAI / LWEAI	Winarti et al. (2025)	5 domain pemberdayaan: kontrol produksi, akses sumber daya, kontrol pendapatan, kepemimpinan, keseimbangan waktu
Technology Acceptance Model (TAM)	Saridewi & Annisa (2025)	Persepsi kemudahan dan manfaat sebagai penentu adopsi TIK
Collaborative Governance	Purwanto et al. (2025)	Tata kelola jaringan kelembagaan dalam sistem pangan
Gender & Ketahanan Pangan	Winarti et al. (2025)	Relasi WEAI dengan HFIAS (ketahanan pangan rumah tangga)

Kerangka / Model	Digunakan oleh	Titik Berat Analitis
Difusi Inovasi	Patria (2025); Pratama et al. (2026)	Adopsi teknologi digital oleh petani secara bertahap
Participatory Action	Zaetun et al. (2026)	Pemberdayaan melalui pendidikan non-formal partisipatif

Kerangka WEAI dan turunan lokalnya (LWEAI) yang digunakan Winarti et al. (2025) memberikan kontribusi metodologis terpenting karena menyediakan instrumen pengukuran yang terstandarisasi untuk lima domain pemberdayaan: kontrol produksi, akses sumber daya, kontrol pendapatan, kepemimpinan kelembagaan, dan keseimbangan waktu. *Technology Acceptance Model* (TAM) memberikan perspektif tentang mekanisme psikologis di balik penerimaan teknologi, sementara *Collaborative Governance Framework* menekankan dimensi tata kelola dan jaringan kelembagaan yang sering luput dari model berbasis individu.

Celah Model yang Ada dan Kebutuhan Model Integratif

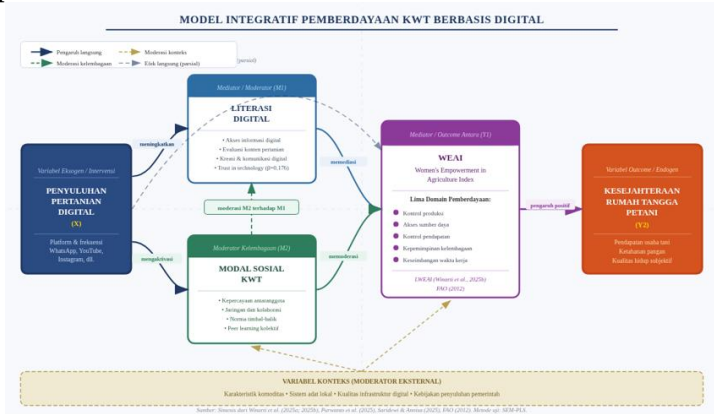
Kekayaan kerangka ini juga menyimpan kelemahan: fragmentasi konseptual yang signifikan. TAM menekankan adopsi teknologi tetapi mengabaikan dimensi pemberdayaan dan kesejahteraan. WEAI mengukur pemberdayaan tetapi tidak secara eksplisit menghubungkannya dengan intervensi digital sebagai penyebab. *Collaborative Governance* menekankan proses kelembagaan tetapi minim dalam mengukur outcome kesejahteraan secara kuantitatif.

Tiga celah konseptual yang paling mendesak teridentifikasi secara eksplisit. Pertama, belum ada model yang secara simultan menghubungkan penyuluhan digital (intervensi), pemberdayaan melalui WEAI (mediator), dan kesejahteraan rumah tangga petani (*outcome*) dalam satu kerangka yang dapat diuji empiris. Kedua, peran moderasi modal sosial KWT belum teruji secara komprehensif. Ketiga, belum ada integrasi metode kuantitatif (SEM-PLS) dengan pendekatan kualitatif (FGD) yang memadai untuk memahami mekanisme pemberdayaan digital secara holistik.

Pada tataran geografis, di Sulawesi dan absennya kajian tentang komoditas jagung, gula aren, dan kelapa komoditas andalan Indonesia Timur adalah celah empiris yang paling mencolok.

Model Integratif Pemberdayaan KWT Berbasis Digital

Bab ini mengusulkan model integratif yang menghubungkan empat komponen utama dalam satu jalur kausal yang dapat diuji (Gambar 5). Model ini dibangun dari celah yang secara eksplisit teridentifikasi dalam studi-studi terdahulu.



Gambar 5. Model Integratif Pemberdayaan KWT Berbasis Digital

Model ini berdiri di atas empat proposisi. Proposisi pertama: penyuluhan pertanian digital diukur melalui jenis platform, frekuensi penggunaan, kualitas konten, dan tingkat interaktivitas berpengaruh positif terhadap literasi digital wanita tani (Saridewi & Annisa, 2025; Patria, 2025). Proposisi kedua: literasi digital dan modal sosial KWT secara bersama-sama memediasi dan memoderasi pengaruh penyuluhan digital terhadap pemberdayaan perempuan (WEAI) (Winarti et al., 2025; Purwanto et al., 2025; Widianarko et al., 2025). Proposisi ketiga: pemberdayaan perempuan dalam lima domain WEAI berpengaruh positif terhadap kesejahteraan rumah tangga petani melalui pendapatan, ketahanan pangan, dan kualitas hidup subjektif (Winarti et al., 2025). Proposisi keempat: seluruh relasi tersebut dimoderasi oleh konteks karakteristik komoditas, sistem adat lokal, dan kualitas infrastruktur digital (Mazya, 2026; Tri Martial et al., 2025).

Tabel 10. Komponen Model Integratif Pemberdayaan KWT Berbasis Digital

Komponen	Peran dalam Model	Indikator Pengukuran
Penyuluhan Pertanian Digital	Variabel bebas	Platform, frekuensi penggunaan, kualitas konten, interaktivitas
Literasi Digital	Mediator	Kemampuan akses, evaluasi, dan penciptaan konten pertanian digital
Modal Sosial KWT	Moderator	Tingkat kepercayaan, kerapatan jaringan, norma gotong-royong

Komponen	Peran dalam Model	Indikator Pengukuran
Pemberdayaan Perempuan (WEAI)	Variabel antara	5 domain WEAI: produksi, sumber daya, pendapatan, kepemimpinan, waktu
Kesejahteraan Rumah Tangga	Variabel terikat	Pendapatan, ketahanan pangan (HFIAS), kualitas hidup subjektif
Konteks Moderasi	Moderator eksternal	Komoditas, sistem adat lokal, kualitas infrastruktur digital

Pengujian model ini direkomendasikan menggunakan pendekatan SEM-PLS yang terbukti sesuai dengan sampel menengah dan model yang mengandung konstruk laten reflektif. Untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif, pengujian kuantitatif perlu dilengkapi dengan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengeksplorasi mekanisme di balik angka statistik pertanyaan mengapa dan bagaimana yang tidak dapat dijawab oleh persamaan struktural semata.

Implikasi Teoritis dan Praktis Model

Implementasi model pemberdayaan KWT berbasis digital yang efektif membutuhkan koordinasi lintas sektor antara pemerintah, perguruan tinggi, NGO, dan komunitas (Tabel 11).

Tabel 11. Rekomendasi Implementasi Model Pemberdayaan KWT Berbasis Digital

Pemangku Kepentingan	Intervensi Utama	Langkah Operasional
Pemerintah	Infrastruktur & kebijakan	Perluas akses internet desa, subsidi ponsel untuk KWT, integrasikan gender dalam kurikulum penyuluhan nasional
Perguruan Tinggi	Riset & pendampingan	Kembangkan model literasi digital kontekstual, lakukan studi SEM-PLS+FGD di Sulawesi dan komoditas strategis Indonesia Timur
NGO & LSM	Program lapangan	Rancang pelatihan berbasis WhatsApp yang responsif gender, waktu fleksibel, dan memanfaatkan peer-mentor dalam KWT
KWT (Komunitas)	Penguatan modal sosial	Identifikasi anggota melek digital sebagai agen pembelajaran internal, bangun budaya berbagi informasi secara kolektif
Sektor Swasta	Inovasi teknologi	Kembangkan fitur penyuluhan dalam platform yang sudah

Pemangku Kepentingan	Intervensi Utama	Langkah Operasional
		digunakan (WhatsApp, YouTube), bukan membangun aplikasi baru yang asing

Tiga prinsip desain program harus menjadi landasan bersama, melampaui sekat-sekat sektoral. Pertama, berbasis platform yang sudah dikenal program yang dibangun di atas WhatsApp dan platform familiar akan memiliki kurva adopsi yang lebih pendek dan keberlanjutan yang lebih tinggi. Kedua, menguatkan modal sosial KWT sebelum dan selama digitalisasi kelompok yang solid adalah prasyarat, bukan produk sampingan dari pemberdayaan digital. Ketiga, literasi digital kontekstual setiap keterampilan digital harus dikaitkan langsung dengan kebutuhan pertanian nyata yang dihadapi anggota, bukan dengan abstraksi teknologi yang terlepas dari kehidupan sehari-hari mereka.

BAB IX

PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI BERBASIS URBAN FARMING

Keterbatasan lahan di wilayah perkotaan atau urban merupakan salah satu hambatan dalam melakukan usaha budidaya pertanian. Namun, saat ini kendala tersebut dapat diatasi dengan menerapkan konsep urban farming untuk mewujudkan kemandirian pangan. Urban farming merupakan suatu cara atau praktik bercocok tanam atau berternak di wilayah perkotaan.

Secara umum *urban farming* merupakan suatu bentuk usaha, komersial ataupun bukan, yang berkaitan dengan produksi, distribusi, serta konsumsi dari bahan pangan atau hasil pertanian lain yang dilakukan di lingkungan perkotaan (Belinda, 2017). Kegiatan usaha ini mulai dari penanaman, panen, dan pemasaran berbagai bahan pangan serta berbagai bentuk peternakan. Cara ini sangat fleksibel untuk diterapkan di area padat penduduk dengan lahan terbatas karena dapat memanfaatkan pekarangan rumah, balkon, atap gedung, tembok vertikal, teras rumah sampai lahan di pinggir jalan. Oleh karena itu urban farming dapat menjadi strategi efektif masyarakat perkotaan dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan karena dapat menanam tanaman konsumsi secara mandiri dan berkelanjutan.

➤ Karakteristik Wilayah Urban

"Urban" berasal dari bahasa Latin "urbs" yang berarti kota. Sejak dahulu kala kota-kota telah menjadi pusat peradaban, tempat berkumpulnya manusia untuk berdagang, berinovasi, dan mengembangkan budaya. Pada awalnya, definisi urban hanya mengacu pada permukiman yang padat dan memiliki pasar atau benteng. Namun setelah munculnya Revolusi Industri, kota-kota tumbuh pesat dan karakteristiknya menjadi semakin kompleks. Terjadilah perubahan definisi yang mencakup faktor demografi, ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang lebih beragam.

Meningkatnya proses urbanisasi tidak terlepas dari kebijaksanaan pembangunan perkotaan, diantaranya kebijakan ekonomi makro yang menjadikan kota sebagai pusat ekonomi (Tjiptoherijanto, 2007). Hal ini sering menjadikan wilayah urban sebagai dikotomi dari wilayah pedesaan, karena kedua wilayah memiliki ciri yang sangat berbeda. Wilayah urban dicirikan oleh kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan, infrastruktur yang lebih lengkap seperti jalan raya, transportasi publik, dan sistem sanitasi modern. Dalam serta sektor ekonomi wilayah urban yang didominasi oleh industri, perdagangan, dan jasa, bukan pertanian. Perbedaan inilah yang menimbulkan ciri-ciri yang khas dari wilayah urban dan pedesaan.

Karakteristik wilayah urban dapat diketahui dari adanya urbanisme atau perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan ke wilayah urban. Ciri yang muncul dapat dilihat dari bentuk-bentuk kebudayaan, pola pikir, dan aktivitas sehari-hari yang menjadi ciri khas masyarakat di wilayah urban. Simmel (*dalam* Gottdiener dan Hutchison, 2011) menyebutkan adanya 8 karakteristik masyarakat urban sebagai akibat adanya urbanisasi, yaitu:

- a. Sikap masa bodoh, *cuek (blasé attitude)*, yang menunjukkan bahwa masyarakat kota kurang memiliki rasa kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya, terutama kepekaan terhadap lingkungan sosial.
- b. Kuantitas waktu bekerja mengalami peningkatan, dengan tujuan adalah untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya agar perekonomian keluarga dan perekonomian kota tetap dapat berjalan lancar.
- c. Pertukaran/perputaran uang yang memperlancar arus perekonomian di kota merupakan implementasi konsep filosofi uang.
- d. Munculnya penyediaan barang atau produsen yang dilakukan secara massal untuk dijual kepada pembeli dimanapun berada.
- e. Semakin banyak muncul pemajangan barang konsumsi yang akan dibeli masyarakat dan ditawarkan oleh penjual.
- f. Semakin rasionalnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan rasional masyarakat tersebut sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat perkotaan.
- g. Lingkungan hanya menjadi fokus kedua setelah pembangunan industri di dalam pembangunan kota akibat dari industri yang mampu memproduksi barang-barang kebutuhan masyarakat kota yang semakin kompleks.
- h. Munculnya pembebasan dalam masyarakat tradisional terkait waktu kerja yang dapat memicu karakteristik individualistis yang melekat dalam kehidupan masyarakat kota.

Berdasarkan pendapat simmel tersebut menunjukkan bahwa personalitas yang khas sering disebut dengan dominasi rasionalitas ekonomis, sosial dan keagamaan hidup dalam populasi urban yang besar. Pada akhirnya kondisi tersebut

menyebabkan aktivitas perekonomian akan terpusat pada suatu area yang memiliki tingkat konsentrasi penduduk yang cukup tinggi yang dapat menyebabkan makin membesarnya area kepadatan penduduk yang tinggi pada wilayah urban. Dampak yang kemudian timbul antara lain:

a. Pemukiman kumuh.

Seiring dengan meluasnya urbanisasi, tumbuh subur kantung-kantung pemukiman kumuh (*slum area*) dan kampung-kampung di tengah kota yang serba menyesak dan liar. Namun pemukiman-pemukiman ini terus mendapat tambahan dari para pendatang baru. Pemukiman-pemukiman kumuh di kota dapat dilihat di daerah pinggiran sungai, di bawah jembatan, daerah pinggiran rel, pusat perdagangan, dan sebagainya.

b. Permasalahan lingkungan.

Pengalihan fungsi lahan secara berlebihan menimbulkan ketidak seimbangan alam akibat pembangunan yang dilakukan tanpa perencanaan terpadu. Pengelolaan sarana dan prasarana kota yang tidak baik juga turut menyumbang terhadap semakin tingginya angka kerusakan alam.

c. Pengangguran dan kemiskinan.

Bertambahnya jumlah pencari tenaga kerja sektor formal dan informal karena tingkat penawaran tenaga kerja jauh melebihi tingkat permintaan yang ada, sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan semi pengangguran di daerah perkotaan. Terbatasnya pendidikan, kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki menjadi penghalang bagi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Tingginya angka pengangguran akhirnya menyumbang pada semakin besarnya komposisi orang-orang atau masyarakat miskin di perkotaan. Permasalahan

tersebut juga terjadi pada masyarakat di Padukuhan Mrican, Condongcatur, Depok, Sleman.

Wilayah Padukuhan Mrican dilewati Sungai Pelang dan menjadi batas dengan wilayah kalurahan Condongcatur. Berdasarkan karakteristik Sumber Daya Alam, padukuhan Mrican berada di tiga kawasan yaitu:

- a. Kawasan Bantaran Sungai yaitu kawasan di sepanjang bantaran Sungai Pelang yang sebagian besar dimanfaatkan warga untuk permukiman (rumah tinggal dan pemondokan / kos-kosan) dengan kepadatan tinggi.
- b. Kawasan Perekonomian, perdagangan dan jasa yaitu berada di sepanjang Jalan Affandi. Di lokasi hampir semua dimanfaatkan untuk usaha pertokoan, perkantoran maupun perhotelan diantaranya Hotel Manohara dan Hotel Yellow Star.
- c. Kawasan Pendidikan yaitu kawasan berdirinya Perguruan Tinggi maupun sekolah. Perguruan Tinggi yang ada di wilayah Padukuhan Mrican yaitu Universitas Atmajaya, Universitas Sanata Dharma dan Universitas Negeri Yogyakarta. Sedangkan sekolah yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok dan Sekolah Menengah Atas Gama. Sehingga di sekitar lokasi Pendidikan tersebut banyak dimanfaatkan untuk pemondokan/ kos-kosan, warung makan maupun usaha jasa seperti laundry dan fotocopy.

Berkembangnya wilayah padukuhan Mrican memberikan dampak positif bagi warga yaitu meningkatnya perekonomian masyarakat dengan terbukanya peluang usaha untuk pemondokan, warung makan maupun jasa lainnya. Tetapi hal tersebut juga memberikan dampak negatif

diantaranya wilayah padukuhan Mrican semakin padat, permukiman kurang tertata dan penuh dengan bangunan serta menempati bantaran sungai yang membahayakan bagi penghuni, tidak terkelolanya lingkungan dengan baik, dan kurangnya ruang terbuka hijau akibat kepadatan permukiman tersebut.

Kebutuhan akan permukiman yang tinggi untuk tinggal di Padukuhan Mrican berpengaruh terhadap ketersediaan lahan hijau (Ruang Terbuka Hijau) serta di beberapa RW menyebabkan permukiman tidak tertata dan kumuh terutama di bantaran sungai. Kawasan Bantaran sungai sudah dilakukan penataan oleh pemerintah kabupaten Sleman dengan program M3K (*Mundhur Mungah Madhep Kali*), dengan program ini semua rumah yang berada di bantaran sungai secara bertahap dilakukan relokasi sehingga tersedia jalan inspeksi disepanjang sungai

➤ **Proses Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Wilayah Urban**

Proses pemberdayaan kelompok tani dilakukan oleh lembaga yang ada diatasnya, seperti Dinas Pertanian dan instansi lainnya. Proses pemberdayaan dilakukan melalui program dan kegiatan *urban farming* atau pertanian perkotaan. Kegiatan *urban farming* di padukuhan Mrican dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sleman melalui Penyuluh Pertanian Kapanewon Depok sebagai fasilitator kepada Kelompok Wanita Tani Srikandi sebagai penerima manfaat. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahap pemberdayaan yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Proses pemberdayaan kelompok wanita tani melalui *urban farming* di padukuhan Mrican yaitu:

Proses Penyadaran.

Proses penyadaran dilaksanakan dengan memberikan pengetahuan dari fasilitator kepada penerima manfaat.

a. Pengetahuan *kognitif* : Pertemuan/ *sharing*

Tahap penyadaran kelompok wanita tani dilakukan dengan kegiatan sosialisasi oleh Dinas Pertanian dengan melibatkan tokoh masyarakat, selanjutnya dilakukan pembinaan untuk mengenalkan *urban farming* oleh pemerintah kalurahan, penyuluh pertanian lapangan ke kelompok wanita tani. Diawal penyadaran kepada kelompok wanita tani mengenai pemetaan potensasi dan masalah yang ada. Kegiatan dipusatkan di rumah dukuh, setelah terbangunnya demplot, kegiatan dipusatkan di demplot dan diseluruh wilayah padukuhan. Kegiatan masyarakat sebelum adanya kelompok wanita tani adalah mengelola kontrakan/kos-kosan, berdagang, membuka warung/ toko, pegawai swasta, PNS, buruh dan IRT. Ibu-ibu tidak banyak yang bergabung di kegiatan masyarakat. Warga kurang peduli dengan lahan yang ada di pekarangan dan belum memanfaatkan untuk penghijauan serta membiarkan mangkrak, karena lahan di padukuhan Mrican sangat sempit yang sebagian besar digunakan untuk permukiman, bahkan tidak menyisakan untuk penghijauan. Penyadaran untuk melakukan penghijauan di pekarangan rumah maupun lahan-lahan kosong di padukuhan Mrican merupakan materi utama dalam sosialisasi.

b. *Believe*

Tahap penyadaran agar kelompok wanita tani tergerak, percaya, yakin dan merasakan manfaat *urban farming* dilakukan dengan adanya lomba pemanfaatan pekarangan terbatas antar RW. Lomba ini merupakan inisiatif dari dukuh agar *urban farming ngremboko* ke masyarakat yang

diselenggarakan mulai tahun 2016. Lomba dilanjutkan oleh KWT Srikandi sebagai agenda rutin setiap 2 tahun sekali. Masyarakat semakin antusias untuk melakukan *urban farming* di pekarangan maupun lahan yang kurang produktif di masing-masing RW. Pada tahap penyadaran ini melibatkan dukuh, pengurus KWT Srikandi, RW, RT serta warga masyarakat.

c. *Healing*

Kekhawatiran kelompok wanita tani terhadap *urban farming* muncul di warga, mengingat Sumber daya alam (lahan, tanah) tidak mendukung atau sulit didapatkan dilokasi serta warga yang tidak mengetahui cara menanam dan takut gagal.

- d. Tahap penyadaran untuk menghilangkan kekhawatiran kelompok wanita tani terhadap *urban farming* dilakukan Dukuh Mrican dengan memberi contoh pemanfaatan lahan pekarangan rumah dan pagar dengan berbagai tanaman sayuran ditengah keterbatasan lahan, media dan cara budidaya. Dukuh juga membagi berbagai benih dan bibit ke warga secara gratis, selanjutnya dukuh juga merintis lomba pemanfaatan pekarangan terbatas antar RW. Dengan kegiatan yang sudah dilakukan dan memberikan manfaat mengurangi kekhawatiran masyarakat dan banyak yang akhirnya mengikuti program kegiatan tersebut. Kekhawatiran semakin berkurang dengan terbentuknya KWT Srikandi dan mengolah demplot di lahan yang tidak produktif, menjadikan warga semakin tertarik dan antusias untuk menanam dengan segala keterbatasan yang ada.

Upaya penyadaran yang dilakukan oleh tokoh masyarakat maupun Kelompok Wanita Tani Srikandi sebagai pelaksana kegiatan, ternyata beberapa masyarakat masih

belum bergerak melakukan dan masih diliputi kekhawatiran karena sebagian besar masyarakat padukuhan Mrican tergantung penghasilannya dari usaha pemondokan/ kos-kosan maupun usaha dagang, mengingat strategisnya wilayah untuk usaha tersebut, sehingga warga memilih memanfaatkan lahan untuk dibangun pemondokan atau tempat usaha daripada untuk pengembangan *urban farming*.

Proses Pengkapasitasan

Pengkapasitasan *urban farming* kepada kelompok wanita tani Srikandi Padukuhan Mrican dilakukan kepada pengurus dan anggota Kelompok Wanita Tani Srikandi. Pengkapasitasan yang dilakukan pemerintah kalurahan maupun dinas, terbatas jumlah peserta karena kuota sudah ditentukan sebelumnya, sehingga secara berjenjang, anggota kelompok harus menyampaikan kepada masyarakat melalui forum lebih kecil di tingkat RT maupun RW.

Pengkapasitasan Manusia

Pengkapasitasan manusia pada *urban farming* dilakukan dengan studi banding mengenai *urban farming*. Materi studi banding tentang teknik atau cara budidaya tanaman di lahan terbatas, pembibitan, pelatihan budiaya jamur tiram, pelatihan hidroponik, pelatihan olahan pisang dan berbagai pelatihan yang lain. Pengkapasitasan manusia dilakukan untuk menambah pengetahuan kelompok wanita tani tentang cara penanaman/ budidaya di lahan terbatas dengan berbagai keterbatasan sumber daya alam.

Pengkapasitasan Usaha

Urban farming yang telah dilaksanakan kepada kelompok wanita tani membuka peluang usaha yang lain dengan memanfaatkan bahan baku pertanian yang dihasilkan untuk

menambah nilai dari produk. Peluang usaha mulai dilirik oleh kelompok wanita tani tetapi terkendala dengan keterbatasan bahan baku maupun kemampuan dalam hal pengolahan hasil.

Pengkapasitasan usaha dilakukan dengan berbagai pelatihan media tanam, pelatihan teknis mengenai *urban farming*, olahan hasil pertanian, packing produk, maupun kewirausahaan untuk menambah nilai dari produk yang dihasilkan. Mulai tahun 2017 Kelompok Wanita Tani Srikandi mulai mendapatkan pelatihan pengolahan pisang, pengolahan jamur, dan setelah adanya program KRPL mendapatkan berbagai pelatihan pengembangan usaha dari *stakeholder* pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi yang selanjutnya akan disampaikan ke masyarakat oleh anggota kelompok.

Pengkapasitasan Kelembagaan

Pengkapasitasan kelembagaan diawali dengan pembentukan kelompok wanita tani sebagai pengelola urban farming di Padukuhan Mrican. Pengkapasitasan kelembagaan ini dilakukan melalui berbagai pelatihan penguatan kelembagaan diantaranya pelatihan penyusunan struktur organisasi, penyusunan AD/ART kelompok, pelatihan pengelolaan keuangan serta pelatihan administrasi dan pembukuan kelompok. Selain juga diberikan pelatihan untuk Pendampingan kelembagaan dan pengelolaan pertemuan kelompok.

Pengkapasitasan Lingkungan

Pengkapasitasan lingkungan dilakukan pada kelompok wanita tani dilakukan dengan pelatihan pupuk organik, pengelolaan sampah organik dan pengelolaan limbah. Pelatihan-pelatihan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman bahwa sejak

awal rintisan kegiatan terkait fungsi dan manfaat *urban farming* untuk penyediaan ruang terbuka hijau khususnya di pekarangan maupun lahan kurang produktif yang dulu banyak dimanfaatkan untuk pembuangan sampah. Pelatihan pengolahan sampah organik dan pelatihan pembuatan komposter sampah rumah tangga (Takakura) yang sudah dihasilkan di RW 06 Mrican. Hasil dari pelatihan ini dapat dimanfaatkan untuk *urban farming* di tingkat rumah tangga. Tetapi memang belum semua warga masyarakat bisa mengelola sampah organik dirumah tangga untuk dimanfaatkan menjadi pupuk tanaman. *Urban farming* ini secara sosial dapat mempererat kerjasama, gotong royong dan kepedulian di masyarakat perkotaan, sehingga warga saling mengenal dan berinteraksi.

Proses Pendayaan/ Pemberian daya

Pelaksanaan *urban farming* di Padukuhan Mrican sudah pada tahapan proses pendayaan/ pemberian daya yaitu dengan diberikannya kewenangan oleh Dinas Pertanian kepada kelompok wanita tani Srikandi untuk bisa berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan kegiatan *urban farmig*. Kewenangan yang diberikan juga termasuk kewenangan mempraktekkan hasil pengkapasitasan yang telah dilakukan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi tanpa tergantung bantuan dari pihak lain.

Proses pendayaan masyarakat dimulai sejak dirintis lomba pemanfaatan pekarangan terbatas antar RW setiap 2 tahun sekali yang telah dilaksanakan mulai tahun 2016, 2018 dan tahun 2020. Kelompok Wanita Tani Srikandi dibantu seluruh masyarakat tanpa menunggu dan bantuan dari pihak lain melakukan kegiatan *urban farming* di wilayah pekarangan masing-masing maupun lahan yang mulai dimanfaatkan untuk

lokasi penanaman. Setiap pelaksanaan lomba selalu ada tematik penilaian yang menjadi indikator pengembangan *urban farming*, hal ini untuk mewujudkan komitmen dan eksistensi dalam menjalankan *urban farming* di tengah masyarakat.

➤ Model Pemberdayaan kelompok Wanita Tani

Model pemberdayaan kelompok wanita tani yang dirumuskan merupakan model gabungan antara model deskriptif dan model naratif. Hal ini karena model ini dibangun dengan menggunakan narasi dalam bentuk tulisan yang digali dari pendapat para pemangku kepentingan dan kondisi di lapangan serta memberikan jawaban terhadap suatu persoalan. Model pemberdayaan yang akan dibangun mengarah pada model sistem pemberdayaan yang dimodifikasi dari model evaluasi Kaufman dan Thomas (1980) yang terdiri dari input, proses, output dan outcome.

Termasuk dalam kategori input adalah potensi dan kebutuhan masyarakat Padukuhan Mrican. Potensi masyarakat terdapat pada modal sosial dan lahan yang sangat sesuai untuk tanaman hortikultura. Modal sosial yang dimiliki kelompok Wanita Tani berupa kearifan lokal yang terwujud dari konsep *Hamemayu Hayuning Bawono*. Konsep ini menjadikan petani di Padukuhan Mrican memiliki pola pikir sederhana yang mengedepankan kebersamaan, gotong royong, dan *tepo seliro*. Kegiatan gotong royong dilakukan secara bersama-sama dalam Kelompok wanita tani secara bergantian, terutama pada saat penyiapan lahan dan pengairan. Pemilik lahan tidak memberikan upah dalam bentuk uang, tetapi hanya menyediakan makan dan minum secukupnya. Dengan adanya gotong royong setiap warga Padukuhan Mrican dapat saling mempererat nilai kekeluargaan antar sesama warga. Hal ini akan mewujudkan asas resiprokal masyarakat di Padukuhan

Mrican yang merupakan salah satu cermin kuatnya ikatan solidaritas warga.

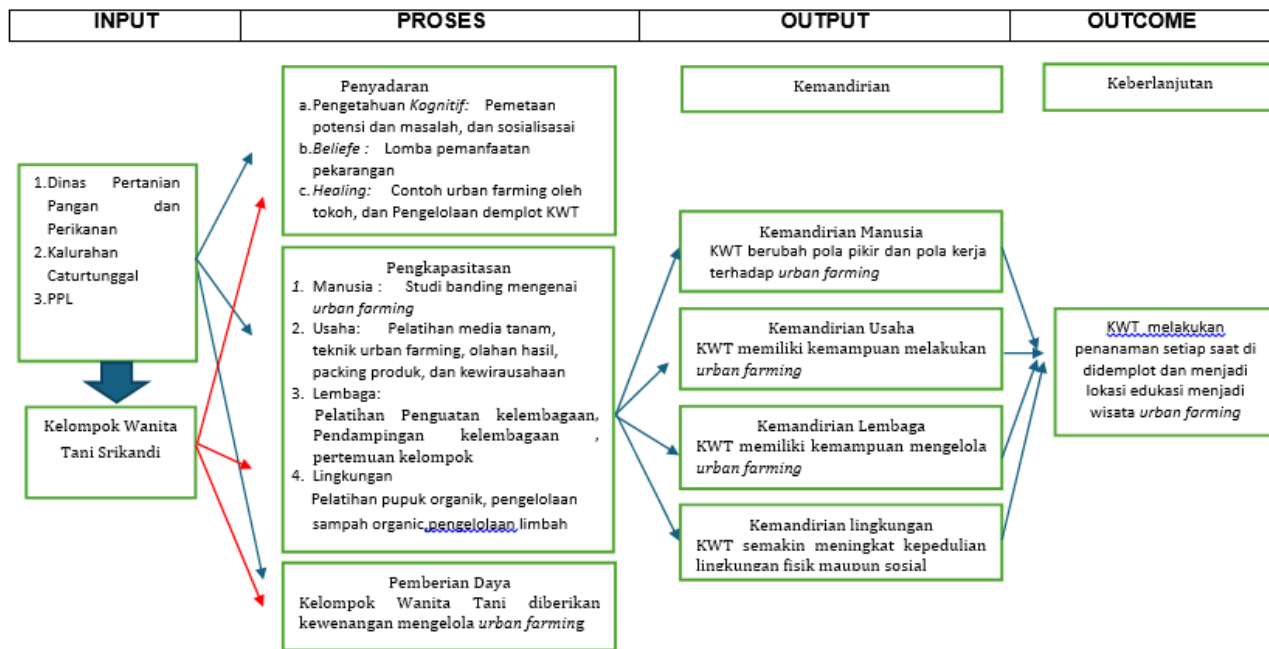
Kearifan lokal masyarakat Padukuhan Mrican juga tercermin dari gaya kepemimpinan dalam kelompok Wanita tani. Gaya kepemimpinan yang dianut merupakan kepemimpinan yang berpedoman dari semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*. Gaya kepemimpinan ini menjadikan seorang pemimpin wajib melaksanakan tugas ketika di depan menjadi contoh atau teladan, ketika di tengah mampu membangun prakarsa atau semangat, dan ketika di belakang mampu mengikuti dengan penuh daya atau mendukung. Gaya ini menjadikan Kelompok wanita tani berada dalam kondisi demokrasi yang berjiwa kekeluargaan, anggota Kelompok wanita tani sebagai kelompok kerja seperti pendapat House (1971), Hersey dan Blanchard (1993), sehingga keberlanjutan partisipasi anggota tidak terganggu dari pemimpinnya.

Gaya Kepemimpinan ini berarti melibatkan anggota Kelompok wanita tani dalam pembuatan keputusan (Dessler, 2007). Hal ini terutama penting ketika pemikiran kreatif diperlukan untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan yang akan berdampak pada anggota Kelompok wanita tani. Dengan penggunaan gaya ini dalam Kelompok wanita tani Mrican ini pengurus dan anggota akan saling tukar menukar ide dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Anggota Kelompok wanita tani didorong untuk berpikir mengenai relevansi cara, sistem nilai, kepercayaan, harapan, dan bentuk organisasi yang ada. Selain itu petani anggota juga didorong untuk melakukan inovasi dalam menyelesaikan persoalan dan berkreasi untuk mengembangkan kemampuan diri, didorong untuk menetapkan tujuan.

Hal ini dapat terjadi karena gaya yang berpedoman dari semboyan Ki Hajar Dewantara ini mencakup aspek-aspek konsultasi, pengambilan keputusan bersama, membagi kekuasaan, desentralisasi dan manajemen yang demokratis. Indikator langsung dari adanya kepemimpinan ini terletak pada perilaku petani anggotanya yang didasarkan pada persepsi terhadap gaya kepemimpinan yang digunakan. Hal ini juga sesuai dengan harapan Kelompok wanita tani bahwa kepemimpinan yang ada di Kelompok wanita tani Mrican dapat mengayomi seluruh anggota dan mampu membawa kemajuan bersama. Salah satu hasil dari gaya kepemimpinan ini adalah keberanian pengurus Kelompok wanita tani dalam merubah struktur organisasi pada saat bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta menjadikan contoh tersendiri bagi petani untuk berani mengembangkan usahatannya.

Letak topografi Padukuhan Mrican merupakan daerah dengan lahan terbatas namun memiliki sumberdaya air yang cukup. Kelompok wanita tani memiliki kemampuan dalam memahami potensi dan kebutuhan dengan baik karena kelompok wanita tani memiliki informasi yang lengkap mengenai potensi wilayah dan sumberdaya manusianya. Hal ini tidaklah mengherankan karena wanita petani sudah hidup bersama dalam waktu yang cukup lama, sehingga menjadikan wanita petani dan Kelompok wanita tani sebagai satu kesatuan masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya yang khas. Hal menjadikan seolah-olah masyarakat Padukuhan Mrican memiliki semacam “sistem informasi manajemen” mengenai potensi dan kebutuhan masyarakat. Sistem ini memungkinkan Kelompok wanita tani untuk mengetahui dan memahami apa potensi yang dimiliki dan apa saja yang menjadi kebutuhan kelompok wanita tani

Model ideal tentatif pemberdayaan kelompok wanita tani berdasarkan analisis lapangan, teori dan harapan Kelompok wanita tani dapat disederhanakan seperti gambar berikut :



Gambar 6. Model ideal tentatif pemberdayaan kelompok wanita tani Srikandi

Keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya alam pada kelompok wanita tani Srikandi dalam penyelenggaraan *urban farming* mengakibatkan kegiatan hanya berjalan apa adanya, sehingga belum pada usaha untuk mengembangkan potensi yang ada. Tanpa adanya komitmen dan sinergitas dalam Kelompok Wanita Tani Srikandi sebagai pelaksana maka kegiatan hanya akan jalan ditempat sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan *urban farming*. Kegiatan *urban farming* apabila tidak didukung dengan kemampuan dan ketrampilan mulai dari produksi sampai pemasaran maka tidak akan lestari dan berkelanjutan pada kelompok wanita tani Srikandi.

Proses pemberdayaan yang terjadi diharapkan berkeberlanjutan dengan berkurangnya pendampingan dari pihak luar dan masyarakat melestarikan program sebagai kegiatan rutinitas yang bermanfaat. Keberlanjutan *urban farming* di padukuhan Mrican membutuhkan komitmen dari kelompok wanita tani Srikandi dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjalankan *urban farming*. Komitmen dan motivasi sangat dibutuhkan dalam menjaga keberlanjutan dan kelestarian *urban farming* agar berkelanjutan.

BAB X

PENGUATAN KELOMPOK WANITA TANI DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan merupakan isu strategis dalam pembangunan pertanian karena berkaitan dengan ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan pangan masyarakat. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup kecukupan pangan, tetapi juga kemampuan rumah tangga memperoleh pangan yang aman, bergizi, dan berkelanjutan (Badan Pangan Nasional, 2024). Tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, pertumbuhan penduduk, dan ketidakpastian ekonomi semakin memperkuat urgensi penguatan sistem pangan nasional melalui diversifikasi pangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal. Dalam konteks ini, perempuan memiliki peran penting (Pratama et al., 2022; Antriyandarti et al., 2024).

Kelompok Wanita Tani (KWT) berkembang sebagai kelembagaan perempuan berbasis komunitas yang mendukung peningkatan kapasitas perempuan tani, pemanfaatan pekarangan, pengembangan pangan lokal, dan usaha rumah tangga pertanian. Secara nasional, Indeks Ketahanan Pangan Indonesia tahun 2023 dengan skor 72,8

(tahan pangan), meskipun kesenjangan akses pangan antarwilayah masih menjadi tantangan (Badan Pangan Nasional, 2024). Pemerintah memperkuat ketahanan pangan melalui RPJMN 2020–2024 dan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), termasuk penguatan kelembagaan KWT. Di Provinsi Riau, KWT berkontribusi terhadap ketahanan pangan keluarga melalui *urban farming*, pemanfaatan pekarangan, dan penguatan kapasitas perempuan tani berbasis penyuluhan dan kelembagaan kelompok (Andriani et al., 2024; Syafrinal et al., 2024).

➤ Konsep Penguatan Kelompok Wanita Tani

Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan kelembagaan sosial-ekonomi perempuan di pedesaan yang berfungsi sebagai media belajar, kerja sama, dan pengembangan kapasitas perempuan dalam mendukung pembangunan pertanian dan ketahanan pangan rumah tangga. KWT tidak hanya menjadi kelompok produksi, tetapi juga wadah pembelajaran sosial (*social learning*) yang memungkinkan perempuan memperoleh pengetahuan, keterampilan, akses informasi, dan penguatan posisi dalam sistem agribisnis pedesaan. Dalam praktiknya, anggota KWT terlibat dalam aktivitas budidaya, pengolahan hasil, pemanfaatan pekarangan, hingga pengembangan usaha agribisnis rumah tangga yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kemandirian pangan. Dari perspektif pembangunan masyarakat, kelompok perempuan tani berperan penting dalam meningkatkan akses sumber daya, kapasitas produksi, dan keberlanjutan sistem pangan rumah tangga berbasis komunitas (Gupta, 2025; Nosratabadi et al., 2020).

Dalam perspektif agribisnis dan pemberdayaan masyarakat, penguatan kelompok pada KWT merupakan proses peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan agar kelompok mampu menjalankan fungsi sosial, ekonomi, dan organisasi secara mandiri dan berkelanjutan. Penguatan tersebut mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan, tata kelola kelompok, jejaring kemitraan, serta kemampuan anggota dalam mengakses informasi, inovasi teknologi, dan peluang usaha pertanian. Keberhasilan penguatan kelompok dipengaruhi oleh partisipasi anggota, pembelajaran sosial, dan keberlanjutan pendampingan, karena semakin tinggi keterlibatan anggota maka semakin besar rasa memiliki (*sense of belonging*) dan tanggung jawab kolektif terhadap keberhasilan kelompok (Windiasih et al., 2023). Selain itu, kelembagaan yang kuat cenderung lebih adaptif terhadap perubahan sosial-ekonomi dan mampu mendukung keberlanjutan usaha pangan rumah tangga berbasis komunitas (Gupta, 2025; Nosratabadi et al., 2020).

Penguatan KWT juga dipengaruhi oleh kepemimpinan kelompok, penyuluhan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Kepemimpinan partisipatif berperan dalam membangun komunikasi, motivasi, kohesi sosial, dan inovasi kelompok, sedangkan penyuluhan pertanian modern menempatkan penyuluh sebagai fasilitator, mediator, dan agen perubahan yang membantu perempuan tani meningkatkan kapasitas agribisnis, keterampilan teknis, kewirausahaan, serta akses pasar. Pendampingan yang responsif gender terbukti meningkatkan partisipasi anggota, adopsi inovasi, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pertanian sehingga memperkuat kontribusi KWT terhadap ketahanan pangan rumah tangga (Antriyandarti et al., 2024; Windiasih et al., 2023; Siaw et al., 2024).

➤ **Kontribusi Kelompok Wanita Tani Terhadap Ketahanan Pangan**

Kelompok Wanita Tani (KWT) memiliki kontribusi strategis dalam memperkuat ketahanan pangan rumah tangga melalui peningkatan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan keluarga. Keterlibatan perempuan dalam KWT memperkuat kapasitas rumah tangga dalam pengelolaan pangan melalui budidaya tanaman pangan, pengolahan hasil pertanian, dan pengaturan pola konsumsi keluarga. Perempuan sebagai pengelola pangan rumah tangga berperan penting dalam menentukan keberagaman konsumsi dan pengelolaan cadangan pangan keluarga, sehingga keberadaan KWT membantu rumah tangga menghadapi kerentanan pangan akibat fluktuasi harga, perubahan iklim, maupun gangguan ekonomi. Partisipasi perempuan dalam kelompok tani terbukti meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan penguatan pengambilan keputusan rumah tangga yang mendukung ketahanan pangan keluarga (Antriandarti et al., 2024; Pratama et al., 2022).

Selain mendukung ketahanan pangan rumah tangga, KWT juga berperan dalam diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Diversifikasi pangan menjadi pendekatan penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu komoditas sekaligus meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Dalam praktiknya, anggota KWT mengembangkan hortikultura, tanaman obat keluarga, pangan lokal, dan produk olahan hasil pertanian yang tidak hanya dikonsumsi keluarga, tetapi juga memiliki nilai ekonomi tambahan. Pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan yang dilakukan melalui KWT turut mendorong perempuan tani lebih adaptif terhadap inovasi pangan dan pengembangan produk bernilai tambah (Windiasih et al., 2023).

Kontribusi nyata KWT terhadap ketahanan pangan juga terlihat melalui pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber produksi pangan keluarga. Melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), anggota KWT didorong mengoptimalkan pekarangan untuk budidaya sayuran, buah, rempah, dan tanaman obat yang mendukung ketersediaan pangan sekaligus mengurangi pengeluaran rumah tangga. Optimalisasi pekarangan juga menjadi media pembelajaran penyuluhan yang efektif dalam meningkatkan partisipasi perempuan dan penguatan kapasitas rumah tangga berbasis sumber daya lokal (Pratama et al., 2022; Widyarini et al., 2021).

Di samping itu, KWT berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha agribisnis rumah tangga, pengolahan hasil pertanian, dan pemasaran produk pangan lokal. Kegiatan tersebut menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus meningkatkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesejahteraan rumah tangga. Penguatan kapasitas perempuan melalui kelompok tani juga terbukti mendukung pengembangan usaha kecil berbasis pertanian dan ketahanan ekonomi keluarga di pedesaan (Antriandarti et al., 2024; Sari et al., 2022).

Selain aspek ekonomi, KWT memiliki kontribusi penting dalam menjaga keberlanjutan pangan lokal melalui budidaya tanaman pangan, konservasi benih, pengolahan pangan tradisional, dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Dalam perspektif pembangunan pertanian berkelanjutan, KWT berfungsi sebagai media pembelajaran, transfer inovasi, dan penguatan modal sosial yang mendukung kemandirian pangan keluarga berbasis komunitas. Dengan demikian, penguatan kelompok perempuan menjadi bagian penting dari pembangunan

pertanian yang inklusif, partisipatif, dan responsif gender dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat pedesaan (FAO, 2022; Windiasih et al., 2023; Widyarini et al., 2021).

➤ **Penguatan Kelompok Wanita Tani dan Ketahanan Pangan: Contoh Studi Empiris di Riau**

Kelompok Wanita Tani (KWT) di Provinsi Riau berkembang sebagai kelembagaan pertanian berbasis masyarakat yang mendukung ketahanan pangan rumah tangga dan penguatan ekonomi keluarga, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di Kota Pekanbaru, KWT berkembang melalui pendekatan *urban farming* dengan pemanfaatan pekarangan, hidroponik, dan *budikdamber*, sedangkan di wilayah seperti Kuantan Singingi dan Indragiri Hilir lebih diarahkan pada usaha tanaman pangan, hortikultura, pengolahan hasil pertanian, dan diversifikasi pangan rumah tangga. Keberadaan KWT tidak hanya menjadi wadah sosial perempuan tani, tetapi juga memperkuat kapasitas anggota dalam mengakses informasi pertanian, teknologi, penyuluhan, dan jejaring usaha produktif yang mendukung ketahanan pangan keluarga (Andriani et al., 2024; Syafrinal et al., 2024).

Aktivitas KWT di Riau umumnya mencakup budidaya tanaman pangan, pemanfaatan pekarangan, pengolahan pangan lokal, pelatihan keterampilan, penyuluhan, hingga pengembangan usaha agribisnis rumah tangga. Anggota KWT memiliki perilaku komunikasi yang baik dalam mengakses informasi melalui penyuluh, kelompok tani, dan media digital sehingga mendukung praktik pertanian perkotaan dan penguatan kapasitas perempuan tani. Kondisi ini menunjukkan bahwa KWT tidak hanya berorientasi pada produksi pangan, tetapi juga menjadi media pembelajaran sosial dan penguatan partisipasi perempuan dalam

pembangunan pertanian berbasis komunitas (Andriani et al., 2025).

Dari aspek usaha, KWT di Riau mengembangkan berbagai kegiatan produktif seperti budidaya hortikultura, pengolahan pangan lokal, usaha olahan berbasis hasil pertanian dan perikanan, serta pemasaran produk rumah tangga. Beberapa KWT di Pekanbaru dan Kabupaten Siak telah mengembangkan produk pangan sehat berbasis ikan, sayuran, dan pangan lokal yang mendukung diversifikasi pangan sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Pendampingan kelompok terbukti memperkuat kapasitas perempuan dalam pengolahan pangan dan mendukung keberagaman konsumsi keluarga sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan lokal (Rahmayuni et al., 2025; Septya et al., 2022).

Penguatan KWT di Riau berkontribusi terhadap peningkatan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan rumah tangga, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan modal, rendahnya intensitas pendampingan, keterbatasan lahan pada wilayah perkotaan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dan partisipasi anggota. Namun demikian, keberhasilan KWT dalam mendorong diversifikasi pangan, konsumsi pangan sehat, dan penguatan ekonomi keluarga menunjukkan bahwa kelompok wanita tani tetap memiliki posisi strategis sebagai kelembagaan perempuan berbasis komunitas dalam mendukung ketahanan pangan di Provinsi Riau (Syafrinal et al., 2024). Keberhasilan dan kendala KWT di Riau dalam mewujudkan ketahanan pangan disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Capaian Ketahanan Pangan, Keberhasilan, dan Kendala Kelompok Wanita Tani di Riau

Aspek	Capaian/Keberhasilan	Kendala
Ketersediaan pangan	Meningkatnya produksi sayuran rumah tangga melalui pekarangan, hidroponik, dan <i>urban farming</i>	Keterbatasan lahan, terutama di wilayah perkotaan
Akses pangan	Rumah tangga memperoleh pangan lebih mudah dan mengurangi ketergantungan pasar	Keterbatasan modal usaha dan sarana produksi
Pemanfaatan pangan	Diversifikasi pangan keluarga meningkat melalui olahan pangan lokal	Pengetahuan pengolahan pangan belum merata
Kelembagaan KWT	Penguatan kerja sama kelompok dan peningkatan kapasitas anggota	Partisipasi anggota belum konsisten
Penyuluhan & pendampingan	Penyuluh membantu transfer inovasi, pelatihan, dan motivasi usaha	Intensitas penyuluhan belum optimal di beberapa wilayah
Ekonomi keluarga	Tambahan pendapatan dari usaha pangan lokal dan olahan hasil pertanian	Akses pasar dan pemasaran digital masih terbatas

Penguatan Kelompok Wanita Tani (KWT) berkontribusi terhadap ketahanan pangan rumah tangga, khususnya pada aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan keluarga. Di Kota Pekanbaru, KWT yang mengembangkan *urban farming* melalui pemanfaatan pekarangan, hidroponik, vertikultur, dan *budikdamber* terbukti meningkatkan ketersediaan pangan rumah tangga secara mandiri. Perempuan tani memiliki perilaku komunikasi yang baik dalam mengakses informasi melalui penyuluh, kelompok tani, dan media digital sehingga mendukung peningkatan kapasitas budidaya dan pengelolaan pangan keluarga. Di Kabupaten Kuantan Singingi, kondisi ketahanan pangan rumah tangga petani juga relatif baik karena tersedianya cadangan pangan dan akses terhadap sumber pangan lokal.

Meskipun demikian, penguatan KWT di Riau masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal usaha, rendahnya intensitas pendampingan penyuluhan, keterbatasan pemanfaatan teknologi digital, dan belum optimalnya partisipasi anggota kelompok. Keberhasilan peningkatan ketahanan pangan juga dipengaruhi oleh kompetensi penyuluh, terutama dalam mendukung pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani. Tantangan lain berupa keterbatasan lahan di wilayah perkotaan dan ketergantungan usaha pangan pada program pemerintah masih menjadi hambatan. Namun, keberhasilan KWT dalam mendorong diversifikasi pangan, konsumsi pangan sehat, dan penguatan ekonomi rumah tangga menunjukkan bahwa kelompok ini tetap strategis dalam mendukung ketahanan pangan berbasis komunitas di Riau.

Secara teoritis, penguatan KWT di Riau menunjukkan keterkaitan dengan teori pemberdayaan masyarakat, modal sosial (*social capital*), dan penyuluhan partisipatif. Keberhasilan

kelompok perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dipengaruhi oleh kapasitas anggota, partisipasi kolektif, penguatan kelembagaan, serta dukungan penyuluhan. Karakter masyarakat Riau yang masih berbasis agraris mendorong berkembangnya KWT sebagai kelembagaan sosial-ekonomi perempuan, baik melalui *urban farming* di wilayah perkotaan maupun usaha hortikultura dan pangan rumah tangga di wilayah perdesaan. Modal sosial berupa kerja sama, jejaring kelompok, dan dukungan kelembagaan terbukti memperkuat kapasitas perempuan tani dalam mendukung ketahanan pangan keluarga (Syafrinal et al., 2024; Andriani et al., 2024).

Salah satu praktik baik (*best practice*) penguatan KWT di Riau terlihat pada pengembangan *urban farming* di Kota Pekanbaru melalui pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber pangan sekaligus tambahan pendapatan keluarga. Dengan dukungan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), anggota KWT mengembangkan hidroponik, vertikultur, *budikdamber*, dan warung hidup untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Praktik ini tidak hanya meningkatkan diversifikasi pangan, tetapi juga mendorong pengembangan produk olahan pangan lokal berbasis hasil pertanian dan perikanan rumah tangga. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh akses informasi, dukungan kelembagaan, pendampingan penyuluh, dan kemampuan anggota dalam menyesuaikan inovasi pertanian dengan kondisi lokal masyarakat perkotaan (Andriani et al., 2024; Septya et al., 2022).

➤ Tantangan, Peluang, dan Prospek Pengembangan

Pengembangan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Provinsi Riau menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang memengaruhi keberlanjutan kelembagaan serta kontribusinya

terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Tantangan internal umumnya berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya partisipasi anggota pada sebagian kelompok, lemahnya administrasi kelembagaan, keterbatasan kepemimpinan kelompok, serta rendahnya keberlanjutan usaha produktif setelah berakhirnya program pemerintah. Selain itu, belum meratanya kemampuan anggota dalam pengelolaan usaha agribisnis dan pemasaran produk juga menjadi kendala dalam meningkatkan skala usaha KWT. Dari sisi eksternal, tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan akses modal usaha, fluktuasi harga pangan, alih fungsi lahan, perubahan iklim, hingga keterbatasan dukungan pasar terhadap produk pangan lokal yang dihasilkan kelompok. Pada wilayah perkotaan seperti Pekanbaru, keterbatasan lahan menjadi hambatan utama sehingga kelompok harus beradaptasi melalui inovasi teknologi pertanian skala sempit seperti hidroponik dan vertikultur. Sementara itu, di wilayah pedesaan tantangan lebih banyak terkait akses teknologi, sarana produksi, dan keberlanjutan pendampingan penyuluhan pertanian (Syafrial et al., 2024; Azra, 2022).

Di tengah berbagai tantangan tersebut, digitalisasi pertanian dan regenerasi anggota kelompok menjadi peluang strategis dalam penguatan KWT di masa depan. Transformasi digital dalam penyuluhan pertanian membuka ruang bagi perempuan tani untuk mengakses informasi budidaya, pemasaran, harga produk, hingga pengelolaan usaha melalui media digital seperti smartphone, media sosial, dan aplikasi pertanian. Pemanfaatan media komunikasi oleh wanita tani telah berada pada kategori baik, terutama dalam mengakses informasi pertanian dari penyuluh dan kelembagaan pertanian. Namun demikian, tantangan digitalisasi masih berkaitan dengan kesenjangan literasi digital, usia anggota kelompok

yang relatif lanjut, serta keterbatasan infrastruktur internet di beberapa wilayah pedesaan. Di sisi lain, regenerasi kelompok menjadi isu penting karena sebagian besar anggota KWT masih didominasi usia dewasa dan lanjut usia. Oleh sebab itu, keterlibatan generasi muda perempuan melalui pendekatan agripreneurship, pertanian modern, dan pemanfaatan teknologi digital menjadi kebutuhan penting agar keberlanjutan kelompok dapat terjaga (Trimayuda, 2025). Capaian ketahanan pangan, keberhasilan, dan kendala Kelompok Wanita Tani di Riau disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Tantangan, Peluang, dan Prospek Pengembangan Kelompok Wanita Tani di Riau

Aspek	Tantangan	Peluang/Prospek
Internal kelompok	Partisipasi anggota belum merata, kapasitas SDM terbatas	Penguatan kapasitas dan kepemimpinan kelompok
Kelembagaan	Administrasi dan tata kelola belum optimal	Penguatan kelembagaan berbasis komunitas
Digitalisasi	Literasi digital masih rendah	Pemanfaatan media sosial dan pemasaran digital
Regenerasi	Minim keterlibatan generasi muda	Pengembangan agripreneur perempuan muda
Dukungan kebijakan	Ketergantungan program pemerintah	Program P2L, UMKM pangan, penyuluhan modern

Aspek	Tantangan	Peluang/Prospek
Pasar	Keterbatasan akses pasar	Permintaan pangan sehat dan lokal meningkat

Prospek pengembangan KWT di Riau relatif menjanjikan seiring meningkatnya perhatian pemerintah terhadap ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan, dan pembangunan pertanian berbasis komunitas. Dukungan kebijakan pemerintah melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), penguatan penyuluhan pertanian, diversifikasi pangan lokal, serta pengembangan UMKM berbasis pangan memberikan peluang besar bagi KWT untuk berkembang menjadi kelembagaan ekonomi perempuan yang lebih mandiri. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan sehat, organik, dan berbasis lokal membuka peluang pasar baru bagi produk hasil KWT. Dalam perspektif pembangunan masyarakat, KWT berpotensi berkembang tidak hanya sebagai wadah pembelajaran sosial, tetapi juga sebagai pusat inovasi pangan lokal, penguatan ekonomi keluarga, dan pengembangan kewirausahaan perempuan berbasis agribisnis. Dengan dukungan penyuluhan yang adaptif, transformasi digital, kemitraan pasar, serta kebijakan pemerintah yang konsisten, KWT di Riau memiliki prospek kuat untuk menjadi aktor utama dalam mewujudkan ketahanan pangan keluarga dan pembangunan pertanian berkelanjutan di tingkat lokal (Andriani et al., 2024; Syafrinal et al., 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L., Jin, J., & Khan, A. (2022). Does the Indonesian farmer empowerment policy enhance the professional farmer? Empirical evidence based on the difference-in-difference approach. *Technology in Society*, 68. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.101924>
- Akter, S., Rutsaert, P., Luis, J., Me, N., Su, S., Raharjo, B., & Pustika, A. (2017). Women ' s empowerment and gender equity in agriculture: A different perspective from Southeast Asia. *Food Policy*, 69, 270–279. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2017.05.003>
- Alfayanti, A., Baga, L. M., & Yusalina, Y. (2021). Kepuasan anggota terhadap peran kelompok dalam pelaksanaan program pemanfaatan pekarangan di kawasan perkotaan (Studi kasus di Kelompok Wanita Tani Kentagor Mandiri Kota Bogor). *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 20(1), 55–68. <https://doi.org/10.31186/jagrisep.20.01.55-68>
- Alpandari, H., & Prakoso, T. (2022). Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dalam Optimalisasi Pekarangan Sebagai Ketahanan Pangan Keluarga. *ABD*, 4(2), 388–393. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/abdi.v4i2.337>
- Amalia, B. R., Yuliati, Y., & Kholifah, S. (2022). Perubahan peran perempuan pada sektor pertanian di desa tandawang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(1), 1–13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jish.v11i1.36899> (Harahap,

- Amheka, A. M., & et al. (2020). Kontribusi Nilai Curahan Tenaga Kerja Wanita terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani Padi Sawah di Desa Noelbaki, Kabupaten Kupang. *Agroecobis*, 3(2); 93-100.
- Ananda, T. (2026). Analisis strategi pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Hijau Lestari di Desa Jati Kesuma. *Jurnal Panthera*, 4(1), 272–284.
- Andriani, Y., Rosnita, R., Yulida, R., & Simanjuntak, L. V. B. (2025). Perilaku komunikasi wanita tani pada pelaksanaan pertanian perkotaan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Agribisnis Unisi*, 14(1), 96–108.
- Andriani, Y., Yulida, R., Rosnita, R., Septya, F., & Herlon, M. (2024). Utilization of media and institutional support for urban farming in Pekanbaru City. In *Proceedings of the 4th International Conference in Social Sciences (ICONISS)*.
- Andry, A., Utama, S., & Widiono, S. (2020). Tingkat Partisipasi Petani pada Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat Tani Berbasis Karet di Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 4(3), 493–506. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2020.004.03.05>
- Antriandarti, E., Ani, S. W., & Suminah. (2024). The dual role of women in food security and agriculture sustainability in rural Java, Indonesia. *Smart Agricultural Technology*, 8, 100511. <https://doi.org/10.1016/j.atech.2024.100511>
- Ardiani, F. D. (2021). Pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Wanita Tani. *Jurnal Sosioprogresif*, 2(1), 45–58.
- Ardiani, F. D., Dibyorini, C. R., (2021). Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) “ASRI” Kalurahan Bendung Kapanewon Semin Kabupaten Gunung Kidul. *Sosio Progresif: Media Pemikiran Studi Pembangunan Sosial*, 1(1), 1–12.

- Ardyati, T., Fajar, Y., Pertiwi, A., & Aprilia, A. (2023). Pendampingan Pengelolaan Sampah Organik Dapur Bersama Ibu Rumah Tangga Dan Unit Usaha Tpst Bumdes Menggunakan Partisipatory Rural Appraisal. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(6), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v7i6.19378>
- Arti, D., Barchia, M. F., & Putra, S. (2022). Strategi Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dalam Pemanfaatan Pekarangan untuk Meningkatkan Sumber Pangan dan Gizi Keluarga. *NATURALIS –Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 11(2), 144–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.31186/naturalis.11.2.24139>
- Aziz, B. W., Kasnawi, T., & Sakaria, S. (2019). Modal sosial petani dalam peningkatan produktifitas pertanian di Kelurahan Biraeng Kecamatan Minasate’ne Kabupaten Pangkep. *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, 3(1), 66–74. <https://doi.org/10.26858/pir.v4i1.19356>
- Azra, H. N. (2022). Potensi dan tantangan penyuluh pertanian dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Kuantan Singingi (Skripsi). Universitas Riau.
- Bachtiar, A., et al. (2024). Inhibiting factors of persuasive communication among extension workers. *International Journal of Religion*, 6(2), 112–128.
- Badan Pangan Nasional. (2024). Buku statistik ketahanan pangan 2024. Badan Pangan Nasional.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). SDGs desa. BAPPENAS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2023). Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I Provinsi Jawa Timur. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025a). Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Jawa Timur 2024 (Angka Tetap). Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025b). Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2025. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025c). Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Jawa Timur, 2024. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Laporan hasil sensus pertanian 2018. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2024/2025). Luas dan Penyebaran Lahan Kritis Menurut Provinsi. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026). Populasi Ternak Menurut Provinsi dan Jenis Ternak (Ekor), 2024. Jakarta: BPS.
- BPS. (2023). Hasil Sensus Pertanian 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2025). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Budiarti, T., Wahyuni, S., & Rahman, F. (2021). Penguatan kelembagaan kelompok wanita tani dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, 16(2), 112–124.
- Chambers, Robert. (1995). Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? *Environment and Urbanization*, 7(1), 173–204.
- Chambers, Robert. (1995a). *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Yogyakarta : LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial).

- Dandona, A. (2015). Empowerment of Women : A Conceptual Framework. *The International Journal of Indian Psychology*, 2(3).
- Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. (2024). Data spasial kehutanan Jawa Timur. Surabaya: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
- Eka Putra, Tience Elizabet Pakpahan, & Maya Sari. (2024). Partisipasi Petani pada Program Pengembangan Cabai Merah (*Capsicum Annum L*) dalam Peningkatan Produksi di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Dan Pendidikan Vokasi Pertanian*, 5(1), 144–156. <https://doi.org/10.47687/snppvp.v5i1.1102>
- Elizabeth, R. (2007). Pemberdayaan Wanita Mendukung Strategi Gender Mainstreaming dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian di Perdesaan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 25(2), 126–135. <https://doi.org/10.21082/fae.v25n2.2007.126-135>
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farrell, M., Sarkki, S., Fransala, J., Murtagh, A., Weir, L., Ahl, H., Lépy, É., & Heikkinen, H. I. (2024). Empowering Women-Led Innovations:Key Players In Realising The Long Term Vision For Rural Areas. *European Countryside*, 16(4), 563–588. <https://doi.org/10.2478/euco-2024-0029>
- Fatahullah, F., & Firmanda, A. (2025). Mobile phones and climate information access among farmers in East Java. *International Journal of Social and Agricultural Economic Studies (IJSAES)*, 3(1), 18–34.

- Fitrah, S., & Luthfiyah, M. A. (2018). Inovasi agraris: Mewujudkan pemberdayaan perempuan tani melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan social capital. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.29040/jie.v8i1.11328>
- Food and Agriculture Organization. (2011). *The State of Food and Agriculture 2010–2011: Women in Agriculture*. Rome: FAO.
- _____. (2012). *Women's Empowerment in Agriculture Index*.
- _____. (2017). *The role of women in agriculture and rural development*. Rome: FAO.
- _____. (2018). *Sustainable food systems Concept and framework*.
- _____. (2018). *The 10 Elements of Agroecology: Guiding the Transition to Sustainable Food and Agricultural Systems*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- _____. (2022). *The State of Food and Agriculture 2022: Leveraging automation in agriculture for transforming agrifood systems*. FAO.
- _____. (2023). *Tracking progress on food and agriculture-related SDG indicators*. Rome: FAO.
- _____. (2024). *The Unjust Climate: Measuring the Impacts of Climate Change on Rural Poor, Women and Youth*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum Publishing.

- Frola, A., Delprato, M., & Chudgar, A. (2024). Lack of educational access, women's empowerment and spatial education inequality for the Eastern and Western Africa regions. *International Journal of Educational Development*, 104,1–19. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102939>
- Garibaldi, S. A., & Frimawaty, E. (2024). Menuju sistem pangan yang berkelanjutan : bergerak dari pangan sebagai komoditas menuju sistem pangan yang berkelanjutan. *PIPS : Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 117–125.
- Gottdiener, Mark dan Ray Hutchison. (2011). *The New Urban Sociology*. Philadelphia: Westview Press. Hal 49–55.
- Gupta, P. (2025). A systematic review on women's participation in agricultural work and nutritional outcomes. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2504.03202>
- Handayani, D., & Prasetyo, A. (2023). Literasi digital dan penguatan pemasaran online pada kelompok wanita tani di pedesaan. *Jurnal Agribisnis dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 45–57.
- Hasibuan, M. F. A., Siswanto, A., Mulyaningtiyas, R. D., Murdiyanto, E., Irawan, E., Wijayanti, P. U., Amran, F. D., Pertiwi, V. A., & Dewiyanti, I. I. (2025). *Sosiologi Pedesaan Era Digital* (A. Kustanti (ed.); November 2).
- Hayati, A., Fadhilah, N., & Yosefina, M. (2024). Gender inequality in economic participation: A socio-economic analysis in Indonesia. *Socious Journal*, 1(5), 37–42. <https://doi.org/10.62872/x05p0k25>
- Hermawan, H., Widiyantono, D., & Kusumaningrum, A. (2022). Pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) di Desa Banyuasin Separe Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. *Surya Agritama*, 11(1), 55–66.

- Hidayati, D. (2023). Model pemberdayaan dan kemandirian perempuan melalui Kelompok Wanita Tani di Desa Lendang Nangka. Mataram: UIN Mataram.
- Husodo, T., Rosada, K. K., Miranti, M., Ratningsih, N., & Suryana, S. (2020). Kewirausahaan dan pemberdayaan kelompok wanita tani di Desa Cinunuk Kabupaten Bandung. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 525–530. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i3.30856>
- Indriani, Y. (2015). Buku Ajar Gizi dan Pangan.pdf. Akura.
- Jamaludin, N.A, (2017). Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya. Bandung. CV. Pustaka Setia
- Junainah, W, Kanto, S & Soenyono. (2016). Program Urban Farming Sebagai Model Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan (Studi Kasus di Kelompok wanita tani Kalurahan Keputih Kecamatan Sukolla Kota Surabaya). *Jurnal Sosial dan Humaniora* Vol. 19, No. 3 (2016) ISSN : 1411-0199. <https://media.neliti.com> > Media> Publications. (diunduh 13 Agustus 2021)
- Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464.
- Kahfi, A., Oktaviani, Y., Fadilah, N., & Mahmudi, I. (2024). Transformasi pemberdayaan ekonomi perempuan: Strategi pemberdayaan Kelompok Wanita Tani berbasis ekonomi Islam di Desa Sri Bandung Banyuasin. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah AICONOMIA*, 3(2), 107–121.
- Kasim, S. S. (2025). Pemberdayaan perempuan tani dan pertanian berkelanjutan dalam pembangunan desa. *Welvaart Journal*, 5(1), 33–47.

- Kasim, S. S., Roslan, S., Supiyah, R., Tawulo, M. A., & Sarpin. (2025). Strategi Pemberdayaan Perempuan Tani dalam Mendukung Pertanian Berkelanjutan. *WELVAART : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 6(1), 40–53.
- Kastanja, A. Y., Patty, Z., Dilago, Z., Kesehatan, S., & Namotemo, U. H. (2019). Pemanfaatan Pekarangan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Masyarakat Desa Kali Upa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat : Darma Bakti Teuku Umar*, 1(1), 173–181.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). Pedoman Pelaksanaan Pertanian Perkotaan (Urban Farming). Jakarta. Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3. Direktorat Pengelolaan Sampah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2020). Pedoman optimalisasi kawasan rumah pangan lestari (KRPL). Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- _____. (2021). Pengembangan kelembagaan kelompok wanita tani menuju pertanian berkelanjutan. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- Kementerian Pertanian, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. (2024). Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian, Agustus 2024. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Kinasih, S. R., & Wulandari, I. (2021). Pembagian Kerja Berdasarkan Gender dalam Pengelolaan Agroforestri di Hulu DAS Citarum. *Umbara*, 6(1); 31-44.
- Kurniasari, D. A., & Krisna Dianto, A. (2021). Analysis of social capital in the women farmers group of Dorang Cinta, Surabaya City. *Agricultural Science*, 5(1), 59–67. <https://doi.org/10.55173/agriscience.v5i1.66>

- Kurniasari, D. A., Prasetyo, A. S., & Aulia, A. N. (2022). Sosial ekonomi petani wanita di Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. *Seminar Nasional dan Call for Paper PSGESI LPPM UWP*, 9(1), 85–92. <https://doi.org/10.38156/gesi.v9i01.190>
- Kadir, & Praseyo, O. R. (2023). Gap Produktivitas Menurut Gender Pada Petani Padi di Indonesia Aplikasi Dekomposisi Blinder-Oaxaca dan Sebaran Kontrafaktual Pada Hasil Survei Pertanian Antar Sensus 2018. *Seminar Nasiona Official Statistics 2023* (pp. 139-150). Jakarta: Politeknik Statistik STIS.
- Kurniasari, D., & Soedarto, T. (2026). Women empowerment through sustainable farming education in East Java. *Agricultural Science Journal*, 8(1), 22–37.
- Lestari, R. D., Setiyani, R., Winahyu, N., Fajeri, S., Agribisnis, P., Sains, F., Teknologi, D., Duta, U., & Surakarta, B. (2023). Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Desa di Kabupaten Sragen. *Jurnal Pertanian Agros*, 25(3), 3237–3246.
- Luthfitah, D. A. S. (2023). Pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Sukoharjo. *Jurnal Sains Agribisnis Indonesia*, 7(2), 120–132.
- Managanta, A. (2019). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kompetensi Petani Kakao di Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Penyuluhan*, 15.
- Manto, R. A., Indriani, R., & Saleh, Y. (2023). Peran kelompok wanita tani (KWT) terhadap peningkatan pendapatan keluarga. *Agri-Sosioekonomi*, 19(2), 761–768. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.v19i2.48301>
- Mardikanto, T dan Soebiato P. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung .CV. Alfabeta.

- Mazya, A. (2026). Beyond market proximity: Gender and patchouli farmers in Sulawesi. *AGRISEP*, 25(1), 1–20.
- Meuwissen, M. P. M., Feindt, P. H., Spiegel, A., Termeer, C. J. A. M., Mathijs, E., de Mey, Y., Finger, R., Balman, A., Wauters, E., Urquhart, J., Vigani, M., Zawalińska, K., Herrera, H., Nicholas-Davies, P., Hansson, H., Paas, W., Slijper, T., Coopmans, I., Vroege, W., ... Reidsma, P. (2019). A framework to assess the resilience of farming systems. *Agricultural Systems*, 176. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2019.102656>
- Morgan, R., George, A., Ssali, S., Hawkins, K., Molyneux, S., & Theobald, S. (2016). How to do (or not to do) gender analysis in health systems research. *Health Policy and Planning*, 31(8), 1069–1078. <https://doi.org/10.1093/heapol/czw037>
- Mougeot, LucJ.A. 2000. UrbanAgriculture: Definition, Presence,Potentials and Risks, and Policy Challenges. InternationalDevelopment Research Centre(IDRC).
- Mulyadi, M. 2015. Mewujudkan Kemandirian Lokal Melalui Upaya Pemberdayaan Masyarakat Lorong di Kota Makasar. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*. Volume 12 Nomor 2 Desember 2017: 179 – 188. <https://jkpjurnal.kalselprov.go.id/index.php/menu/article/view/102/64>. (Diunduh 22 Agustus 2021)
- Mulyani, S. I., Jumiaty, E., & Khasanah, U. R. (2026). Effect of the Sustainable Food Yard (P2L) Program on Farmer Behavior Change: Evidence from Bunyu Island, North Kalimantan. *BIO Web of Conferences*, 208, 1–9. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202620802002>
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press

- Mursyidin, M., et al. (2024). Gender roles and collaboration in smallholder coffee farming in Aceh. *Journal of Madani Society*, 5(2), 88–103.
- Naika, R., & Pawar, S. (2026). Women-led and rural sustainable agricultural livelihoods pathways to achieving *Sustainable Development Goals* by 2030. *Discover Global Society*, 4(3), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s44282-025-00313-2>
- Najiyati, S., Agus, I Nyoman N. Suryadiputra. (2005). Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. *Proyek Climate Change, Forest and Peatlands Indonesia. Wetlands nternational Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada*. Bogor.
- Nasir, M., Riadi, S., Simatupang, H., & Dwi, P. P. (2019). The Role Of Women ' S Farmers Group In Improving The Community. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(1).
- Nataliningsih. (2017). *Penyuluhan Partisipatif Bagi Kelompok Wanita Tani*. Alfabeta, Bandung.
- Nggai, Y. (2022). Kajian tentang gender dari perspektif adat Lio di Desa Mauloo Kecamatan Paga. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(11), 403–412. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i11.1032>
- Nidia, S. (2026). Strategi pemberdayaan perempuan dalam penguatan Kelompok Wanita Tani di pedesaan. *Metro: Universitas Metro*.
- Niyonkuru, P., & Barrett, H. (2021). Gender and intergenerational challenges to women's economic empowerment initiatives in Rwanda. *World Development Perspectives*, 23, 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2021.100340>

- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume I, No 2, Juli 2011.[https://journal.upgris.ac.id > civis> article> view](https://journal.upgris.ac.id/civis/article/view). (diunduh 9 Agustus 2021)
- Nosratabadi, S., Khazami, N., Abdallah, M. B., Lackner, Z., Band, S. S., Mosavi, A., & Mako, C. (2020). Social capital contributions to food security: A comprehensive literature review. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2012.03606>
- Nugraheni, R., & Haryanto, J. T. (2019). Peran kelompok wanita tani dalam meningkatkan kapasitas perempuan pedesaan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 15(3), 201–213.
- Nugroho, R. D. (2023). Model komunikasi pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dalam meningkatkan partisipasi perempuan pedesaan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 21(2), 102–115.
- Nurhayati, N., Nilasari, D. T., & Selvia, J. (2025). Peranan Wanita Tani dalam Ketahanan Pangan Keluarga Petani Cabai Rawit pada Sistem Pertanian Tropis. *Agricore: Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad*, 10(2), 538–556.
- Nurmala, S., & Kahanna, M. (2026). Ketidakadilan Gender Dalam Pengupahan Pekerja Perempuan Pada Sektor Pertanian: Studi Kasus di Kenegarian Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua. *JP2SH*, 11(1); 1-9.
- Nursiam Jati, R., Hariadi, S. S., & Muzayyanah, M. A. U. (2025). Pengaruh Peran Kelompok Wanita Tani dan Faktor Internal Anggota KWT terhadap Keberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Lahan Pekarangan. *Jurnal Penyuluhan*, 21(02), 283–295. <https://doi.org/10.25015/21202560892>

- Oktoriana, S., Suharyani, A., Agribisnis, P. S., Pertanian, F., & Tanjungpura, U. (2021). Peran Wanita Tani Dalam Pengambilan Keputusan Usahatani. *SEPA*, 18(1), 18–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/sepa.v18i1.44150>
- Ollenburger, J. C., Sucahyono, B., Moore, H. A., & Sumaryana, Y. (1996). *Sosiologi wanita*. PT Rineka Cipta. <https://books.google.com.my/books?id=fRdrAQAACAAJ>
- Parsudi, Setyo. (2019). Model, Motivasi Dan Kendala Masyarakat Dalam Melakukan Pertanian Kota (Urban Farming) Di Kota Surabaya. *Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis* ISSN 2301-8607 (cetak) , ISSN 2599-0365 (online) .
- Patria, B. (2025). Strategi transformasi penyuluhan pertanian berbasis digital. *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi*, 4(2), 210–225.
- Permana, Y. (2020). Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui pemanfaatan lahan pekarangan menuju rumah pangan lestari. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(3), 419–426.
- Pertiwi, V. A., Fibriantingtyas, A., & Maulinda, R. (2024). Peran Ganda Perempuan Pedesaan dalam Rumah Tangga Petani Berperspektif Gender The Dual Role of Rural Women in Farming Household from a Gender Perspective. *Agriekstensi*, 23(2), 318–330.
- Pertiwi, V. A., Khatimah, I. K., & Desile, M. K. (2025). Edukasi Masyarakat Pedesaan Pertanian dalam Pemanfaatan Sampah Organik. *ABDI: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(3), 724–733. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/abdi.v7i3.804>
- Pettit, J. (2012). Empowerment and Participation : bridging the gap between understanding and practice. *Institute of Development Studies (IDS) University of Sussex UK*.

- Pratama, D., Witjaksono, R., & Raya, A. B. (2022). Partisipasi anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam kegiatan Pekarangan Pangan Lestari mendukung ketahanan pangan rumah tangga di Kabupaten Gunungkidul DI Yogyakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(1), 19–37. <https://doi.org/10.22146/jkn.71270>
- Pratama, R., et al. (2026). Unlocking the potential of women farmers through digital agricultural extension. *AKSIOMA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 1–18.
- Pratiwi, A. (2020). Pemberdayaan perempuan melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 88–97.
- Pribadi, P. T., et al. (2021). Peran kelompok wanita tani dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 8(2), 284–292. <https://doi.org/10.25157/jimag.v8i2.4866>
- Pribadi, P. T., Setiawan, I., & Isyanto, A. Y. (2021). Peran Kelompok Wanita Tani dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *AGROINFO GALUH*, 8, 284–292.
- Primanthi, M. R., Rumayya, Ajija, S. R., & Rohman, M. S. (2024). Pemberdayaan Perempuan di Sektor Pertanian (Policy Brief: Pemberdayaan Perempuan Di Sektor Pertanian).
- Purwanto, E., et al. (2025). Development communication for collaborative governance in vegetable farming. *International Journal of Interdisciplinary Research in Social Sciences (IJIRSS)*, 4(1), 33–52.
- Putnam, R. D. (1993). *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*. *The American Prospect*, 13, 35–42.

- Putri , A. S., & Anzari, P. P. (2021). Dinamika peran ganda perempuan dalam keluarga petani di . Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial,, 1(6); 757-763 .
- Putri, A. M., & Wijayanti, R. (2021). Modal sosial dan partisipasi perempuan dalam pembangunan masyarakat desa. Jurnal Sosiologi Pedesaan, 9(2), 88–101.
- Qamara, Q., & Widiarta, I. N. (2026). Digital communication strategies for livestock farmers in Indonesia. International Journal of Social Science (IJOSS), 3(2), 55–72.
- Quisumbing, A. R., Meinzen-Dick, R. S., Raney, T. L., Croppenstedt, A., Behrman, J. A., & Peterman, A. (2014). Synopsis of gender in agriculture: Closing the knowledge gap. International Food Policy Research Institute (IFPRI).
- Rahmawati, I., Lestari, P., & Kurniawan, B. (2022). Perempuan tani dan praktik pertanian berkelanjutan berbasis lingkungan. Jurnal Agriecobis, 5(1), 67–79.
- Rambe, N. (2014). Konsep Urban Farming (Pertanian Perkotaan). <http://novisanriarambe.blogspot.co.id/2014/07/konsep-urban-farmingpertanian-perkotaan.html>. (Diunduh 5 September 2022)
- Rayuddin . 2018. Sosiologi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Agribisnis. Bandung. Manggu Makmur Tanjung Lestari
- Rindi, Juliarti. (2019). Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Di PT PIR (Peningkatan Investasi Riau) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat . UIN Sunan Kalijaga.
- Rondonuwu, D. S., et al. (2026). Effects on trade and economy from technology adoption in Indonesian SMEs. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(1), 77–91.
- Radio Republik Indonesia. (2024). Forest Program V, Dorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Hutan Kabupaten Madiun. RRI Madiun.

- Sabaiti, Q. (2024). Strategi pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelapa Dua Sasak Jakarta Barat. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Saleh, J., Sam, M., & Nilwana, A. (2025). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RKPD di Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Teori Partisipasi Arnstein. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 6(5). <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i5>
- Sari, D., Nugroho, A., & Rahmawati, I. (2022). Pemanfaatan Digital Marketing dalam Pengembangan Usaha Kelompok Wanita Tani di Pedesaan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 115–126.
- Sari, N., Widodo, S., & Fitria, D. (2020). Kontribusi kelompok wanita tani terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga petani. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 4(4), 725–736.
- Saridewi, T. R., & Annisa, A. (2025). Use of ICT at the farmer level in Kebumen Regency. *Golden Ratio of Social Science and Education*, 5(1), 15–30.
- Sarungallo, Y. M., Asmirah, A., & Burchanuddin, A. (2022). Kesetaraan gender dalam perspektif masyarakat Kabupaten Toraja Utara. *YUME: Journal of Management*, 5(1), 52–57. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.t757>
- Scripta, U. B. B. (2019). Pemberdayaan perempuan pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Nurjanah Desa Kimak Kabupaten Bangka. *Jurnal Scripta*, 6(1), 15–28.
- Sensus Pertanian 2023. (2023). Jumlah Petani Pengguna Lahan Pertanian dan Petani Gurem Menurut Wilayah. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Septya, F., Rosnita, R., Yulida, R., & Andriani, Y. (2022). Urban farming sebagai upaya ketahanan pangan keluarga di Kelurahan Labuh Baru Timur Kota Pekanbaru. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1–10.
- Setiyo Yuli Handono, Kliwon Hidayat, M. P. (2020). Pemberdayaan Rahmayuni, R., Rosnita, R., Yulida, R., Andriani, Y., Nopiani, Y., Sabrian, F., Rossi, E., & Salman, A. N. (2025). Focus Group Discussion (FGD) dan penyuluhan pengolahan produk pangan lokal berbasis ikan untuk pencegahan stunting di Kabupaten Siak. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 7, 376–383.
- Siaunuar, H. N. (2025). Strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Nyuatan. *eJournal PIN*, 6(2), 55–69.
- Siaw, S. Y., Man, N., Ramli, N. N., Yusuf, M. S. A., & Abdulmumini, U. (2024). The contribution of agricultural extension to empowerment of women for agricultural development. *Journal of Agricultural Extension*, 28(1), 1–15.
- Sinaga, R., Suswatiningsih, T. E., & Purwandari, I. (2024). Pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Wanita Tani di Kalurahan Semoyo Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Organisasi dan Manajemen Pertanian*, 2(3), 1426–1434.
- Sinurat, D. A. J., Agustian, E., Daud, C. T. P., Nastiti, D. W., Zebua, D., Aprilio, H., & Sihombing, M. I. (2025). Transformasi ekonomi kelompok tani perempuan “Iye Ape Satu Hati” melalui implementasi strategi pemasaran hasil tani berbasis digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 9(1), 88–99.

- Siswanto, A., Pertiwi, V. A., Utomo, M. R., Jamroni, M., Dina, Y., Amalia, R., Laili, F., & Handono, S. Y. (2025). Pelatihan Pengolahan Produk Kudapan Bahan Baku Pangan Lokal Training on the Processing of Snack Products Made from Local Food Raw Materials. *Agroinotek : Journal of Research and Community Services*, 006(01), 90–97. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.agroinotek.2025.006.01.08>
- Soetomo. 2018. Pemberdayaan Masyarakat Mungkinhkah Muncul Antitesisnya. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Suarsana, M., Parmila, P., Prabawa, P. S., Suwardike, P., & Pastiniasih, L. (2023). Pemanfaatan Pekarangan Untuk Ketahanan Pangan Keluarga Pada Kelompok Wanita Tani. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pelita Nusantara (JPM-Pelita Nusantara)*, 1(2), 38–43.
- Sugiyono, 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. CV.Afabeta.
- Suparman, Kasnawi, T., & Syukur, M. (2024). Relasi Gender dalam Keluarga Buruh Tani Perempuan. *Eureka Media Aksara*.
- Swanson, B. E., & Rajalahti, R. (2021). Agricultural extension and rural development: Breaking out of traditions. *FAO*.
- Syafrinal, S., Rosnita, R., & Ardian, A. (2024). An analysis of agricultural extension workers' competence in establishing food security in Kuantan Singingi Regency. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 40(1), 72–81. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v40i1.3642> Masyarakat Pertanian. Universitas Brawijaya Press.
- Tjiptoherijanto, Priyono. 2007. Urbanisasi, Mobilitas dan Perkembangan Perkotaan di Indonesia. <http://robbyalexandersirait.wordpress.com>, diakses pada 8 Desember 2025.

- Tri Martial, A., et al. (2025). Women's role in smallholder coffee farming in North Sumatra. *International Journal of Agribusiness and Agricultural Sciences (IJAAS)*, 3(1), 1–18.
- Trimayuda, M. H. (2025). Pengaruh transformasi digital dalam penyuluhan pertanian padi di Kecamatan Bunga Raya (Skripsi). Universitas Riau.
- UIN Sunan Kalijaga. (2024). Pemberdayaan perempuan melalui program Kelompok Wanita Tani Kartini di Mrican Giwangan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- UN Women. (2020). *Women's economic empowerment in rural development*. New York: UN Women.
- Unay-Gailhard, İ., & Brennen, M. A. (2022). How digital communications contribute to shaping the career paths of youth: a review study focused on farming as a career option. *Agriculture and Human Values*, 39(4), 1491–1508. <https://doi.org/10.1007/s10460-022-10335-0>
- Wijaya, A. (2020). Pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Wanita Tani berbasis potensi lokal di Kabupaten Pringsewu. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Widianarko, B., et al. (2025). Transforming food systems through collaborative action in Semarang. *Open Agriculture*, 10(1), 1–15.
- Widyarini, I., Sumardjo, S., Sadono, D., & Tjitropranoto, P. (2021). Strengthening women farmers groups in supporting household food security through yard utilization. *Jurnal Penyuluhan*, 17(2), 187–201. <https://doi.org/10.25015/17202134567>

- Winarti, L., et al. (2025). Gender-inclusive digital literacy and agricultural resilience in Central Kalimantan. *AGRIS on-line*
- Windiasih, R., & et al. (2023). Women Farmers Group Participation in Empowering Local Food Security. *IJCS*, 3(2); 186-194.
- Windiasih, R., Sari, L. K., Prastyanti, S., Sulaiman, A. I., & Sugito, T. (2023). Women farmers group participation in empowering local food security. *International Journal of Community Service*, 3(3), 186–194. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v3i3.200>
- Woolcock, M. (2001). The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes. *Canadian Journal of Policy Research*, 2(1), 11–17.
- World Bank. (2007). *Empowerment in Practice : Analysis and Implementation* (Issue May).
- _____. (2022). *Women in Agriculture: Closing the Gender Gap for Development*. Washington DC: World Bank.
- Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan untuk pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Wulandari, K. (2025). Pemberdayaan perempuan melalui modal sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi pada Kelompok Wanita Tani. Salatiga: Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Wulpiah, W. (2017). Pemberdayaan perempuan dan peningkatan ekonomi keluarga. *Noura: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 1(2), 1–18. <https://doi.org/10.32923/nou.v1i2.854>. *Papers in Economics and Informatics*, 17(2), 1–16.
- Yunus, Suadi dan Fadli. 2017. *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Aceh. Bandar Publishing.

Zaetun, S., et al. (2026). Women's empowerment through non-formal education in organic rice farming. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 21(1), 55–72.

BIODATA PENULIS



Eko Murdiyanto, Lahir di Yogyakarta, 6 Maret 1970. Staf Pengajar Jurusan Agribisnis, Pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta. Memperoleh gelar S.P dari Sosek Pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta (1995); gelar M.Si. dalam Sosiologi Perdesaan dari IPB Bogor (2001), dan gelar Dr dalam Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat dari UNS Surakarta (2017). Aktif meneliti dan menulis tentang Sosiologi Perdesaan, UMKM, Monitoring dan Evaluasi, Perubahan Sosial, Komunikasi dan informasi Pertanian, dan Pemberdayaan Masyarakat.



Kristiyoningsih, lahir di Bima pada 31 Januari 1989. Menyelesaikan pendidikan S2 Jurusan Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang (2015). Saat ini aktif sebagai Dosen di Politeknik Pertanian dan Peternakan Mapena Aktif melakukan pengabdian kepada wanita tani dan kelompok wanita tani dan memiliki minat besar pada Pemberdayaan Wanita Agribisnis.



Vi'in Ayu Pertiwi, SP., MP, lahir di Madiun, 19 April 1990. Dosen Program Studi Agribisnis, Departemen Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya. Memperoleh gelar SP dari Agribisnis Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Brawijaya (2012) dan gelar MP dalam Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (2013). Saat ini aktif sebagai mahasiswa Doktoral di Universiti Putra Malaysia dengan fokus riset Gender dan perempuan dalam agribisnis. Aktif menulis dan meneliti pada bidang gender dalam pertanian, sosiologi ekonomi, sosiologi pedesaan dan pemberdayaan masyarakat.



Dwiyana Anela Kurniasari, S.P., M.Si., lahir di Rembang pada 3 Februari 1993, merupakan dosen tetap Program Studi Agribisnis Universitas Wijaya Putra di Kota Surabaya. Lulus S1 Agribisnis 2015 dan S2 Sosiologi Pedesaan 2017 di Universitas Brawijaya, saat ini sedang menempuh studi doktoral (S3) Agribisnis di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dengan fokus keilmuan pada agribisnis, sosiologi pedesaan, pemberdayaan perempuan tani, penyuluhan pertanian, dan pembangunan berbasis masyarakat, serta aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembimbingan mahasiswa dalam program kompetitif.



Sekar Inten Mulyani, Lahir di Pati, 13 April 1982. Staf Pengajar Jurusan Agribisnis Faperta Univ Borneo Tarakan. Memperoleh gelar S.Pt dari Sosek Fakultas Peternakan UNDIP Semarang (2006), gelar M.Si dari prodi Agribisnis UNDIP (2012) dan gelar Dr dalam Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat dari UNS (2025). Aktif meneliti dan menulis tentang penyuluhan/pemberdayaan di jurnal penelitian nasional maupun internasional serta beberapa buku yaitu : Komunikasi Bisnis Konstruksi Teoritis dan Praktis, Hubungan Masyarakat, Penyuluhan Pertanian Efektif Menuju Kemandirian Petani dan Pemberdayaan Wanita Tani Dalam Implementasi Proklamasi di Indonesia, Smart and Sustainable Agriculture.



Medea Ramadhani Utomo, lahir di Sidoarjo, 31 Maret 1990. Staf Pengajar di Departemen Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya sejak 2016 hingga sekarang. Memperoleh gelar Sarjana Pertanian (SP) di Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang (2012). Kemudian memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) di Program Studi Sosiologi Pedesaan, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang. Saat ini (2026) sedang studi PhD di National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan. Aktif meneliti dan menulis tentang Sosiologi Lingkungan, Resiliensi Sosial-ekologi Petani, Adaptasi Perubahan Iklim, Tindakan Kolektif, Kebijakan dan Stabilitas Pangan, Pembangunan Masyarakat Pedesaan dan Pemberdayaan Masyarakat daerah Hutan.



Fitrotul Laili, S.P., M.P. merupakan dosen di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya dengan bidang keahlian Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis. Ia menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Brawijaya dengan fokus pada ekonomi pertanian dan pembangunan pedesaan.

Penelitiannya berfokus pada relasi sosial-ekonomi, partisipasi masyarakat, konsumsi simbolik, budaya konsumsi generasi muda, pemberdayaan komunitas, serta penguatan kelembagaan masyarakat desa. Berbagai karya ilmiah dan pengembangan naskah akademik yang disusunnya banyak menyoroti pentingnya pendekatan humanis, partisipatif, dan berkelanjutan dalam proses pembangunan masyarakat. Selain aktif meneliti, ia terlibat dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan kapasitas pertanian berkelanjutan. Fitrotul juga menulis buku *Menghianati Pembangunan Desa* (UB Press, 2021) dan memiliki hak cipta karya *Colors of Semarang: A Journey Through Contemporary Art* (2023).



Miqdad Muhammad merupakan praktisi di bidang keberlanjutan yang berfokus pada *Corporate Social*. Saat ini menjadi *Community Development Officer* (CDO) di PT Pertamina Patra Niaga FT Malang. Aktivitas profesionalnya banyak berkaitan dengan penguatan kelembagaan masyarakat,

konservasi lingkungan, pemberdayaan ekonomi, serta pengembangan program sosial berkelanjutan di wilayah *rural* maupun *urban*.

Aktif mengembangkan berbagai inisiatif *community development* yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, termasuk program pemberdayaan perempuan, konservasi dan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, serta penguatan kapasitas kelompok masyarakat lokal. Pengalaman profesional dalam mendampingi berbagai program sosial dan lingkungan di berbagai wilayah Indonesia menjadi landasan dalam pengembangan gagasan mengenai pembangunan masyarakat yang partisipatif, inklusif, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan sosial maupun lingkungan.



Ir. Moh Muchlis Djibran, S.P., M.A lahir di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada tanggal 17 April 1989. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta pada tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan magister pada Program Studi Magister Agribisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, dan selesai pada tahun 2015.

Sejak tahun 2015, penulis bekerja sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan mulai tahun 2023 dipercaya menjabat sebagai Ketua Program Studi Agribisnis di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Penulis aktif mengikuti seminar, mempublikasi artikel pada jurnal nasional dan internasional bereputasi. Selain itu, penulis terlibat aktif dalam berbagai organisasi profesi, antara lain Perhimpunan Agronomi Indonesia Komisariat Daerah Gorontalo (PERAGI), Asosiasi Agribisnis Indonesia (AAI), Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Persatuan Insinyur Indonesia

(PII), dan Ikatan Program Studi Agribisnis Indonesia (IPSAGRI).



Dr. Ir. Rosnita, M.Si

Penulis dilahirkan di Tanjung Balai Karimun Tanggal 02 Juli 1962. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian sejak Tahun 1988 sampai sekarang. Pendidikan S1 ditempuh di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (SOSEK) Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Tahun 1981 dan lulus tahun 1986. Pendidikan S2 dijalani pada Tahun 1998 pada Program Studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) lulus tahun 2001. Kemudian Tahun 2006 melanjutkan pendidikan S3 pada Program Studi Ilmu Pertanian Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung dan lulus pada Tahun 2011. Tertarik melakukan riset terkait Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Kelembagaan Pertanian, Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat, Peranan Wanita dan Gender di bidang pertanian khususnya masyarakat kelapa sawit, karet, sagu, yang pendanaan bersumber dari DIPA UNRI, DRTPM, BPDPKS, dan Balitbang Daerah.